



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN
SEKJEN, DIRJEN PSP, DIRJEN PKH, DIRJEN HORTIKULTURA, KEPALA
BADAN KETAHANAN PANGAN, DAN KEPALA BADAN PPSDMP
KEMENTERIAN PERTANIAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II (dua)
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu/12 Februari 2020
Waktu	: Pukul 11.00 s.d. 18.50 WIB
Tempat	: Ruang rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat Acara	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP) : Tindak Lanjut Rapat tanggal 18 November 2019 membahas: 1. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020; 2. Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020; dan 3. Lain-lain
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo, (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI : dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan 5 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI

2. Drs. I Made Urip, M.Si.
3. Ono Surono, S.T.
4. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
5. DR. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.

2. Fraksi Partai Golongan Karya

3 Dari 8 orang Anggota

1. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
2. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
3. Ir. Panggah Susanto, M.M.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

6 dari 7 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil ketua
2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Sumail Abdullah
4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
6. Dr. H. Azikin Soltthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

3 dari 5 orang Anggota

1. H. Sulaeman L. Hamzah
2. Fauzin H. Amro, M.Si.
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan/Wakil Ketua
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
4. Edward Tannur, S.H.
5. Drs. H. Ibnu Multazam.

6. Fraksi Partai Demokrat

4 dari 5 orang Anggota

1. DR. Suhardi Duka, M.M.
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos, M.Si.
4. Muslim, S.H.I., M.M.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

4 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.

3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

- dari 4 orang Anggota (ijin Fraksi)

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

1 dari 2 orang Anggota

1. Ema Umiyyatul Chusnah.

10. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah

1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.Si. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
3. Dr. drh. I Ketut Diarmita. M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
5. Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
6. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Yang terhormat, Saudara Sekretaris Jenderal, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Hortikultura, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian beserta jajarannya;

Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat dengar pendapat ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Bamus pada tanggal 16 Desember 2019, dan Keputusan Rapat Internal pada tanggal 15 Januari, pada hari ini Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen, Dirjen Sarana Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Hortikultura, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam rangka membahas Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Usulan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI saat ini RDP telah dihadiri dan ditandatangani oleh 19 anggota, terdiri dari 7 fraksi. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia rapat pendapat hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.50 WIB)

Akan tetapi karena yang baru datang 19 anggota, 7 fraksi, berarti belum korum, sementara saya skors dulu 5 menit.

(RAPAT DISKORS)

Rapat hari ini kita mulai pada pukul 11.00, dan akan diakhiri pada pukul 17.00. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Eselon 1 Kementerian Pertanian terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Eselon I Kementan;
5. Kesimpulan;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak, Ibu yang saya hormati.

Rapat Dengar Pendapat ini adalah merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Menteri Pertanian pada tanggal 18 Nopember 2019 terkait Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020. Dalam rapat kerja tersebut Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendapatkan penjelasan usulan rencana kerja di lingkup:

1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan anggaran Rp3,5 triliun;
2. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan anggaran Rp2,022 triliun;
3. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan anggaran Rp1,7 triliun;
4. Dirjen Hortikultura dengan anggaran Rp1,082 triliun;
5. Badan Ketahanan Pangan dengan anggaran Rp663,563 miliar.

Selain itu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga mendapatkan penjelasan mengenai usulan rencana perubahan komposisi anggaran, dimana Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian berkurang sebesar 250 miliar menjadi 3,25. Ini baru usulan ya Pak ya? Teman-teman, ini baru usulan. Akan diputuskan pada nanti. Bukannya sudah putus.

Penambahan anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar 340 miliar, sehingga menjadi 2,04 triliun. Dan penambahan Badan Ketahanan Pangan sebesar 160 miliar hingga menjadi 823 miliar.

Pada Rapat Kerja yang lalu Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi seluruh pelaksanaan kebijakan pertanian, dan mempersiapkan *road map* kebijakan pengembangan.

Oleh karena itu rapat dengar pendapat hari ini Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ingin mendapatkan penjelasan secara mendetail terkait hal tersebut. Kami minta dalam penyusunan rencana kerja dilakukan secara teliti dan menggunakan basis data yang valid serta sinkron. Jadi jangan pakai *copy paste*. Kalau *copy paste* nanti pasti ada yang keselip pasti ketahuan, serta saya juga minta data valid, jangan data yang bohong.

Kami mengingatkan agar rencana yang disusun harus sesuai kebutuhan, sehingga tepat guna dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya petani. Kami tidak ingin mendapat laporan seperti dulu, antara lain terjadi praktek jual beli atau kutipan bantuan alsintan. Jadi masih ada isu-isu di lapangan dilakukan oleh oknum, baik itu oknum di daerah maupun oknum dari anggota dewan sendiri. Nanti tolong dibuatkan/dijelaskan juklak/juknisnya kepada seluruh Eselon I.

Terdapat petani yang enggan menerima bantuan alat dan mesin pertanian akibat ketidaksesuaian kondisi lahan dengan bantuan yang diberikan. Jadi, Bapak/Ibu, jangan dipaksakan. Kalau lahannya itu misalnya berbukit

minta Komben, itukan anggota dewannya yang bukan 'goblok' lah, istilah gampangnya "gagal paham".

Maupun laporan mengenai bantuan alsintan yang tidak dimanfaatkan secara optimal akibat terbatasnya pengetahuan petani penerima dan operasional, dan perawatan bantuan tersebut. Jadi kami juga minta sama Kementerian, jangan hanya kasih alsintan tetapi tidak memberikan edukasinya. Jadi nanti bilang sama yang menyuplai, minimal 2 bulan sekali/3 bulan sekali mendatangi kelompok-kelompok yang mendapat bantuan, kira-kira ada masalahnya apa, *trouble*-nya apa. Karena setahu saya kalau sudah, mohon maaf ini, ada petani yang sudah mendapatkan bantuan, "ngapain Gua urus, nanti nggak ada Gua minta lagi", inikan tidak boleh terjadi.

Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain terkait validasi dan sinkronisasi data, perhitungan akan kebutuhan pupuk maupun benih yang akurat. Kemarin saya lihat di medsos nampaknya Dirjen PSP di demo ya masalah pupuk. Serta benih yang akurat sehingga optimalisasi, dan peningkatan kapasitas pengembangan sumber daya manusia sektor pertanian menjadi meningkat.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar yang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Eselon I Kementerian Pertanian untuk menyampaikan penjelasan hal-hal tersebut diatas. Jadi di beberapa wilayah pupuknya masih dianggap jauh memenuhi kuotanya.

Yang kedua, saya juga menjelaskan disini, waktu itu sudah ada RDP dengan PSP, perwakilan dari Menko Ekuin, himpunan bank-bank negara, serta produsen pupuk. Mereka tetap *ngotot* akan menjalankan Kartu Tani. Dan kami atau Komisi IV DPR RI RI hampir semua fraksi menginginkan ditunda dulu. Karena kalau kita lihat di Jawa saja baru yang teralokasi Kartu Tani 60 persen. Di Pulau Jawa. Apalagi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kemarin saya menyarankan selaku Pimpinan Komisi IV DPR RI meminta Pulau Jawa dulu diselesaikan, karena menyangkut pihak-pihak lain, misalnya BTS dan lain-lain.

Jadi saya minta nanti pulang konsultasikan dulu kepada Saudara Menteri perihal Kartu Pupuk Tani tersebut. Jangan sesuatu yang dipaksakan. Mungkin Saudara Sekjen tahu hal ini jaman menteri Pak Suswono pernah dilakukan *launching*, kalau tidak salah di Purwakarta atau di Kerawang. Pernah tidak, Pak Sekjen? Betul? Gagal total? Ya gagal. Karena apa, perencanaannya tidak matang.

Ini uang besar, uang negara, jangan ada istilahnya "ah coba-coba, gagal nanti ulang lagi, saya tidak mau. Karena suksesnya Kementerian Pertanian adalah kebanggaan seluruh Snggota Komisi IV DPR RI.

Silakan Saudara Sekjen, terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV DPR RI, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran *Allah Subhaanahuata'aala* atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan rapat dengar pendapat *Insya Allah* semuanya dalam keadaan sehat wal'afiat.

Mengawali RDP pada hari ini perkenankan kami dari jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan RDP hari ini yang merupakan tindak lanjut RDP yang telah dimulai pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, serta menindaklanjuti arahan Bapak Pimpinan Komisi IV pada saat kami para Eselon I (Satu) diberikan waktu untuk mengkonsultasikan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Pada laporan Rapat Dengar Pendapat yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan utama, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi anggaran tahun 2020 sebesar 21,05 triliun yang telah dialokasikan pada 11 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2020, dan mendasari pada arahan Bapak Pimpinan Komisi IV yang terhormat tanggal 11 Februari 2020, Kementerian Pertanian mengusulkan realokasi anggaran sebesar 250 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekjen yang semula 50 ini mengalami penambahan 25 miliar. Digunakan untuk pengadaan infrastruktur pembangunan AWR;
2. BPSDMP mengalami penambahan anggaran sebesar 125 miliar, semula 350 miliar, yang dipergunakan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan petani;
3. Badan Ketahanan Pangan ini mengalami penambahan 100 miliar, yang semula 160 miliar. Ini digunakan untuk mendukung program terobosan pengentasan daerah rentan rawan pangan melalui *family farming*.

Penambahan anggaran pada tiga Eselon I tersebut.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Sekjen.

Teman-teman mohon semuanya mencermati ini. Supaya jelas. Nanti disamping juga ada di buku, tapi dicermati juga.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Penambahan anggaran pada tiga Eselon I diusulkan diambil dari anggaran Dirjen Ketahanan Pangan, yang semula 400, ini hanya 150 miliar. Dan Dirjen PSP yang semula 250 menjadi 100 miliar.

Terkait dengan pendalaman Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 pada hari ini, dan *Insyah Alloh* esok hari tanggal 12-13 Pebruari 2020 sesuai perubahan, ijin pada hari ini dan esok hari ini para Eselon I untuk dapat memaparkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 pada Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV yang terhormat.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Demikian beberapa poin. Untuk selanjutnya ijin para Eselon I untuk bisa menyampaikan paparannya. Dimulai dari Dirjen Hortikultura. Barangkali pointer perubahannya saja. Nanti dilanjutkan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Dirjen PSP.

Kami persilakan Dirjen Hortikultura.

Mohon ijin Pak.

KETUA RAPAT:

Saya minta Saudara Sekjen untuk memberikan realokasi anggaran itu untuk dibagikan ke anggota, supaya semua anggota tahu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Baik Pak, segera ditindaklanjuti.

Mohon ijin, Pak Ketua, Pak Dirjen Horti.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik, terima kasih Pak Sekjen.

Mohon ijin, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua yang kami hormati, seluruh Anggota Komisi IV, perkenalkan kami menyampaikan Rencana Kerja dan Komposisi Anggaran Dirjen Hortikultura Tahun Anggaran 2020 setelah kemarin mendapatkan saran dan masukan pada saat RDP pertama dengan Pak Sekjen dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Ini yang semula kemarin pada saat pembahasan pertama, jadi ini ada bawang putih. Menurut saran-saran dari anggota ada perubahan. Nanti ini yang semula perubahannya nanti seperti apa. Jadi ini gambaran yang pertama seperti ini.

Lanjut perubahannya, perubahannya untuk kawasan bawang putih, dari tadinya...

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, sesuai saran saya kemarin waktu RDP disini, tolong dipisahkan antara wajib tanam dengan APBN, dan infokan wilayahnya ke seluruh anggota untuk fungsi pengawasan. Jangan digabung-gabung, saya tidak mau.

Terima kasih.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Siap Pak. Nanti kami paparkan Pak.

Jadi ini yang APBN saja Pak, ini yang APBN, jadi ada 4.050 hektar di tahun 2020 dengan nilai 150 miliar. Terus ini untuk penambahannya perubahannya. Jadi untuk sarana nilai tambah jadi dialihkan ke sarana nilai tambah. Dari tadinya 264 unit bertambah 234 unit, jadi totalnya 498 unit. Terus prasarana nilai tambah dari 52 unit menjadi 152 unit. Jadi ini bertambah, ini penambahannya/perubahannya.

Terus data dukung untuk kegiatan dukungan manajemen dari 230. Ini untuk kegiatan dukungan manajemen perubahannya. Jadi untuk kegiatan bimbingan teknis, belanja modal, peralatan kantor, untuk dukungan manajemen, terus belanja pegawai dan operasional, gaji, tunjangan, alat tulis, keamanan, *cleaning service*. Layanan dukungan manajemen ada 107 satker, ini totalnya Rp. 295.178. 367.000.

Terus untuk selanjutnya, jadi untuk sebaran kawasannya, jadi untuk bawang merah seluas 5.704 hektar. Ada di 33 provinsi, ini data-datanya ada semua. Di 179 kabupaten kawasan bawang putih ada 4.050 hektar. Di 17 provinsi, 40 kabupaten, kawasan sayuran lainnya ada 860 hektar di 12 provinsi, 22 kabupaten. Kawasan tanaman obat 700 hektar di 13 provinsi, 31 kabupaten. Dan kawasan aneka cabai di 13.328 hektar di 33 provinsi, 368 kabupaten.

Untuk kawasan buah dan flori kultura. Ada kawasan jeruk, kawasan manggis, kawasan buah lainnya, kawasan flori kultura, kawasan pisang, kawasan mangga, dan kawasan durian. Untuk pengelolaan dan pemasaran hortikultura ini kegiatannya untuk penetapan *good handling practise*. Untuk bangsal pasca panen ini *good handling practise*. Untuk buah-buahan dan flori kultura, sayuran, dan tanaman obat, ada 50 kelompok.

Untuk registrasi kebun dan lahan usaha ada 2.100 unit. Sarana nilai tambah ada 498 unit, tadi yang sudah disampaikan. Prasarana nilai tambah, dari tadinya 52 menjadi 152 unit. Terus sertifikasi dan standarisasi *good agriculture practise, good handling practise* ini ada 350 unit.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, saya rasa masalah *GAP* ini harus dibahas dulu. Ini ujung-ujungnya nanti praktek monopoli antara pengusaha importir dan eksportir. Saya sangat tahu sekali ini. Karena nanti yang bisa *GAP* ini cuma PT ini dan negara ini. Saya minta ini dikaji ulang dulu. Itu yang pertama.

Yang kedua, masalah organik. Organik ini awalnya iya. Dijamin 100 persen organik, besok-besok organiknya 50 persen, yang pakai pestisida 50 persen. Ujung-ujungnya ekspornya ditolak sama negara tujuan. Masalah *GAP* ini sesudah saya pelajari ini nanti sama juga dengan kartel atau monopoli. Nanti kalau mau mendalam, perlu penjelasan, disini boleh, kita diskusi boleh.

Terima kasih.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Lanjut terkait dengan bawang putih yang tadi lokasi-lokasinya bisa ditampilkan, lokasi yang pemisahan sesuai dengan saran Pak Ketua yang APBN dan yang importir wajib tanam. Bisa ditampilkan? Tolong dibantu biar cepat. Dimana saja yang APBN, dimana saja yang importir tanam, bisa ditampilkan?

Jadi, mohon ijin Pak Ketua, ini di lokasi di Jawa Barat. Ini kabupatennya, ini untuk APBN Pak, ini yang wajib tanam. Jadi ini lokasinya di Bandung. Kabupaten Bandung ada 30 hektar, untuk yang wajib tanam ada 3,2 hektar.

KETUA RAPAT:

Ini masih digabung ya lokasinya?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Lokasinya satu kabupaten.

KETUA RAPAT:

Saya paham.

Seperti saran saya awal tadi, di kabupaten ini hanya untuk apb, di kabupaten ini hanya untuk wajib tanam. Jadi saya tidak mau sebelah-sebelahan saling mengklaim bahwa "ini saya punya", ini wajib tanam APBN,

ini wajib tanam importir. Saran saya akan datang tolong dipisahkan kabupatennya. Kalau tidak bisa ya jangan ada APBN nya, kita hilangkan APBN tanam bawang putihnya. Bisa tidak?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik, siap ditindak lanjuti.

KETUA RAPAT:

Jadi untuk pengawasannya lebih melekat.

Karena, mohon maaf, ada juga oknum importir yang nakal. Pak Dirjen tahulah orangnya. Jadi saya tidak mau terjadi misalnya Jawa Barat ini khusus APBN, atau Jawa Tengah khusus APBN. Kewajiban importir kabupaten lain. Itu yang saya minta.

Dan juga saya minta para anggota, wilayahnya disini sudah terlihat, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, tolong kalau sempat datang ke lokasi untuk mengecek. Kebetulan tidak lama lagi kita reses untuk mengecek.

Terima kasih.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Terima kasih Pak, siap ditindaklanjuti.

Saya kira demikian paparan dari kami, kami serahkan ke Pak Sekjen.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Wa'alaikum Salam.

Selanjutnya, Kepala Badan Ketahanan Pangan.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat, Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota Komisi IV DPR RI.

Saya akan paparkan mengenai rencana kegiatan dan anggaran dari Badan Ketahanan Pangan.

Jadi ada 5 (lima) kegiatan fokus kita:

1. Pengentasan rentan rawan pangan dan *stunting*;
2. Penguatan pasokan dan distribusi cadangan pangan;

3. Pengembangan diversifikasi pangan dan industri pangan lokal;
4. Penguatan keamanan pangan;
5. Kajian-kajian atau analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan.

KETUA RAPAT:

Pak Agung, *slide*-nya balikin lagi.

Saya mau tanya 'pengentasan daerah rentan rawan pangan dan *stunting* ini bagaimana? Supaya semua anggota jelas.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Saya akan jelaskan Pak. Lanjut saja ke *slide* nomor 5.

Jadi yang kita lakukan yang pertama adalah kita mengidentifikasi daerah-daerah rentan pangan, kemudian identifikasi aspek apa yang berpengaruh. Ini sudah kami lakukan. Yang ketiga ini yang kita lakukan kita melakukan intervensi program. Kemudian kerjasama lintas sektor. Dan kita melakukan evaluasi tiap tahun.

Bapak, Ibu, Pak Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati.

Kami sudah melakukan identifikasi Pak. Di Indonesia itu ada 88 kabupaten, tepatnya 956 kecamatan. Ini yang sesuai dengan kriteria yang kita lakukan, termasuk lokasi rentan rawan pangan. Kalau kita lihat di peta sana sebetulnya yang warnanya merah Pak. Tapi itu kan peta se-Indonesia, jadi agak global. Sedangkan kita punya peta per kecamatan, ini yang kemudian kita intervensi secara bertahap.

KETUA RAPAT:

Cukup, Itu "kecamatan garis miring kostra tani", apa artinya?

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Kronis Pak, ini nanti dikaitkan dengan Badan SDM. Karena tiap kecamatan ada kostra tani, kita minta mereka yang mengawal.

KETUA RAPAT:

Memang sudah ada persetujuan pergantian nomenklatur 'kostra tani'? Atau dibuat sendiri begitu?

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Belum Pak, ini kita utamanya disini adalah kecamatan.

KETUA RAPAT:

Kecamatan ya kecamatan saja. Tidak perlu ada 'kostra tani'. Saya minta itu di revisi, Pak Sekjen.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Siap Pak.

Jadi kemudian kita lihat lanjut aspek yang berpengaruh apa. Ini ada 9 aspek. Terutama memang paling dominan adalah aspek ketersediaan pangan. Disini adalah kita menghitung rasio konsumsi normatif perkapita terhadap ketersediaan pangan.

Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, intervensi program yang kita lakukan ada dua hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Yang pertama adalah perbaikan logistik pangan. Tetapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan *cost*-nya akan lebih tinggi. Kementerian Pertanian tentu condong pada intervensi yang b, yaitu mendorong masyarakat pangan untuk mampu menyediakan pangannya sendiri yang lebih beragam, bergizi, dan seimbang. Kita siapkan beberapa intervensi kita. Yang pertama adalah melalui pertanian keluarga/*family farming*.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Kepala Badan, tolong kami bisa dijelaskan "pertanian keluarga atau *family farming* berbasis kecamatan" tolong dijelaskan, dan juga pertanian masuk sekolah. Yang pekarangan pangan lestari kayaknya kita sudah mengerti. Tapi ini ada anggota yang mungkin belum mengerti, tolong dijelaskan satu persatu ini apa Pak.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Siap kami jelaskan, Pak Wakil Ketua, pada *slide* berikutnya Pak.

Silakan.

KETUA RAPAT:

Jangan Pak. Sekarang saja Pak apa yang ditanyakan oleh Pimpinan. Supaya fokus, jangan lari-lari, dijelaskan dulu. Balikkan lagi *slide*-nya, jelaskan satu persatu.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Pertanian keluarga atau pertanian berbasis kecamatan, jadi disini adalah kita memberdayakan kecamatan-kecamatan yang rentan rawan pangan tadi kita berdayakan masyarakat disana, kita beri bantuan untuk

budidaya, termasuk benih, pupuk, dan kemudian mereka lakukan budidaya. Dan itu sifatnya *sustain*.

Kemudian pertanian pekarangan. Ini yang nomor tiga dulu saya jelaskan. Pertanian pekarangan lestari ini sebetulnya kelanjutan dari KRPL, ini yang kemarin dipakai untuk mendukung dukungan Kemtan terhadap intervensi spesifik terhadap pengentasan *prevalensi stunting*.

Pertanian masuk sekolah kita lakukan pada provinsi-provinsi rentan rawan pangan juga. Disamping kita ingin membangun masyarakat, artinya anak-anak muda mencintai pertanian, tentu juga kita ingin menguatkan perbaikan gizi di sekolah-sekolah. Ini yang kita lakukan Pak.

Nah, kemudian lanjut.

KETUA RAPAT:

Perbaikan gizi sekolah dengan bagaimana tadi. Perbaikan gizi dengan pertanian coba, balikan lagi tolong.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Jadi kita membangun memperkenalkan sistem pertanian di dalam sekolah-sekolah. Kemudian disamping itu untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian, itu juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan pangan disekolah. Artinya apa, biar kita upayakan mereka bisa melakukan bisnis disitu khususnya untuk memenuhi kantin mereka sendiri Pak, utamanya adalah itu.

KETUA RAPAT:

Saya masih agak kurang paham. Jadi anaka-anak disekolah diberikan pengetahuan.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Pengetahuan, budidaya, kita berikan bantuan untuk budidaya dengan memanfaatkan pekarangan sekolahan, kemudian yang selanjutnya hasilnya itu biasanya digunakan untuk keperluan mereka sendiri.

KETUA RAPAT:

Satu kali atau bergulir atau bagaimana.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Ini sustain Pak. Jadi kita disitu paketnya ada rumah bibit dan segala macam, sehingga kita berikan satu kali dan itu kita.

KETUA RAPAT:

Satu sekolahan dapat berapa?

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

50 juta Pak untuk budidaya. Tahun ini sudah kita lakukan untuk dua sekolahan/provinsi, kemudian akan kita eskalasi pada tahun-tahun berikutnya.

KETUA RAPAT:

Kalau yang pertanian keluarga?

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Pertanian keluarga itu masyarakat secara umum yang pada kita berikan bantuan budidaya. Ini nilainya cukup besar, satu kecamatan kita beri bantuan 200 juta.

KETUA RAPAT:

Yang bertanggung jawab?

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Yang bertanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi yang bertanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kecamatan tentunya.

KETUA RAPAT:

Bapak percaya.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Kalau misalkan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jangan bilang usahakan, ini uang rakyat lho Pak. Jangan nanti dikasih, mohon maaf, dikasih gagal, besok coba lagi ganti judul lagi. Jangan main-main ini uang rakyat lho Pak. Saya ingatkan tadi untuk anda join ini berapa cukup besar anggarannya ini, tambah saja hampir 100 miliar ini. Badan

Ketahanan Pangan dapatnya 763 miliar. Setahu saya dulu Ketahanan Pangan fungsinya adalah membantu, membangun lumbung padi atau apa.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Masih ada itu Pak.

KETUA RAPAT:

Benar saya paham Pak, saya sudah baca juga, tapi ini tolong dikaji ulang. Tolong dikaji ulang pertanian keluarga, pertanian masuk sekolah ini tolong dikaji ulang, saya orangnya paling gampang Pak. Kalau memang logika dan pengawasannya baik, hasilnya untuk rakyat baik, kalau perlu kami tambahkan anggarannya, tapi kalau tidak, ini saya rasa ini masih mentah, program ini masih mentah. Nanti tolong tanggapan teman-teman semua, bagaimana dengan program ini.

Lanjutkan.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Baik Pak Ketua.

Mohon ijin Pak Ketua.

Kami sudah pengalaman pertanian pekarangan Pak, kita sudah lakukan di 1600 titik setiap tahun, itu kita juga bekerja sama dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Jadi kita intinya nanti disetiap titik itu kita mempunyai pendamping Pak, kita bekerja sama coba dilanjutkan dislide pertanian keluarga. Disana ada tim pembina provinsi, dukungan lintas sektor dan tim teknis kabupaten. Tapi kita bekerja sama dengan BPTP, bekerja sama dengan tentunya para pendamping yang kita tunjuk untuk mendampingi mereka. Nah Pak Ketua, ini sebetulnya kita pengalaman saya sampaikan tadi, kita pengalaman 1600 titik untuk pertanian pekarangan yang sudah kita lakukan selama ini dan itu telah memberikan dampak yang positif terhadap pengurangan stunting Pak. Jadi ini kami sebetulnya kami fokus Badan Ketahanan Pangan adalah daerah-daerah rentan rawan pangan, karena kita tidak menginginkan adanya berita lagi yang mengatakan bahwa ada kelaparan disana, kelaparan disini. Oleh karena itu kita mencoba mengidentifikasi daerah-daerah tadi sudah kami lakukan, sedangkan kita menentukan intervensinya.

Mungkin saya ingin sampaikan juga Pak Ketua, bahwa....

KETUA RAPAT:

Sekarang saya tanya tadi yang RPL berapa pak, yang pernah meluncur berapa banyak, seribu berapa tadi Bapak bilang?

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

1600 Pak.

KETUA RAPAT:

Yang berhasil berapa?

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

1600 rata-rata semuanya hidup Pak, karena kami.

KETUA RAPAT:

Bukan hidup Pak, kalau saya tanam pohon juga pasti hidup Pak, yang berhasil dan berkembang. Itu lho yang penting Pak. Ia kalau Bapak bilang hidup ia tanam pohon, saya di rumah saya tanam pohon mangga saja hidup. Yang penting berhasil, berguna, bermanfaat. Jadi kalau bilang 1600 itu berhasil semua, bohong, saya tegaskan disini. Saya bisa buktikan dengan anda ke Lampung dan saya minta di *break down* kecamatan/kabupatennya mana, nanti saya minta seluruh anggota Komisi IV untuk memantau. Kalau bilang 1600 tadi bilang berhasil, tidak mungkin.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Siap Pak, kami akan *break down* nanti.

KETUA RAPAT:

Tolong sekarang disiapkan bahannya, sebelum rapat berakhir, anggota sudah menerima, langsung saya suruh cek masing-masing. Yang masalah tadi itu tolong dikaji dulu, nanti saya minta persetujuan teman-teman, apakah disetujui atau tidak, kita lihat nanti pada akhir kesimpulan.

Lanjutkan.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Baik lanjut saja.

Ini lokasi untuk pertanian keluarga kita, kita sudah tentukan lokasinya. Kemudian untuk pertanian masuk sekolah, tadi sudah sedikit sudah kita jelaskan. Ini untuk pekarangan-pekarangan, lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah kerja sama yang kita lakukan dengan kementerian lain kita sudah menginisiasi Pak Ketua, ini dengan para Eselon I dari Kementerian lain, kita sudah bekerja sama, kita sama-sama menyepakati apa yang kita kerjakan dan mereka kerjakan.

Lanjut saja, ini adalah terget kita untuk sampai Tahun 2024, kita punya tanaman pangan 18%. 18% kita coba turunkan menjadi 10%. Sedangkan

yang kanan, ini adalah target penurunan stunting. Ini adalah yang ditetapkan oleh Bappenas yaitu sampai 2024, 14%.

Tadi Pak Ketua sampaikan mengenai distribusi pangan, lumbung pangan juga kita lakukan. Lanjut. Baik itu untuk cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan pangan cadangan pangan masyarakat. Ini semua kita lakukan termasuk, lanjut saja mengenai panel harga pangan juga kita lakukan.

KETUA RAPAT:

Itu CBP nya Bulog satu sampai satu juta setengah, 1 juta atau 1,5 atau 2 juta.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Satu juta sampai dengan satu juta setengah Pak. Target cadangan pangan ditetapkan dalam Rakortas satu juta setengah.

KETUA RAPAT:

Target cadangan.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Cadangan pangan pemerintah.

KETUA RAPAT:

Sekarang cadangannya ada berapa, Bapak tahu di Bulog.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Satu koma delapan.

KETUA RAPAT:

Berarti itu kan cuma target cadangan. Terus kalau Bulog nanti membeli beras lagi, salurnya kemana. Sampai hari ini belum ada ketetapan pemerintah, bahwa yang mendapat bantuan tunai itu wajib beli beras Bulog. Ini harus dipikirkan juga, produksinya bagaimana, penyerapannya bagaimana, penyelurannya bagaimana?

Lanjutkan saja Pak.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Kemudian kita untuk panel harga kita juga mempunyai hampir 1022 enumerator yang mengukur harga ditingkat produsen dan konsumen. Kemudian terkait dengan pengembangan industri pangan lokal, kita mencoba

membangun industri pangan lokal kita Pak, dengan beberapa komponen yang kita lakukan mulai peningkatan SDM, penguatan kelembagaan, pembinaan, pendampingan. Kita targetkan sampai 2024 ada 1000 UMK yang kita bangun, masing-masing setiap tahunnya ada 200.

KETUA RAPAT:

Saudara, Pengembangan Industri Pangan Lokal itu apa sih maksudnya, saya tidak paham.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Industri berbahan baku lokal Pak.

KETUA RAPAT:

Maksudnya.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Industri Pangan berbahan baku lokal.

KETUA RAPAT:

Ia maksudnya, lokal itu apa.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Contohnya, talas Bogor misalnya, itu yang kita misalnya kemudian di Lampung banyak dari Singkong. Itu yang akan kita coba perbuat Pak.

KETUA RAPAT:

Percuma. 9 Tahun yang lalu saya sama Pak Fachmi, launching. Launching beras berbahan baku singkong, setelah launching wassalam.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Yang kita coba lihat Pak, kalau.

KETUA RAPAT:

Ia, Bapak cek saja sehari, sekarang cek ke Lampung pernah tidak ada launching. Launching beras berbahan baku singkong.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Kalau beras berbahan baku singkong memang tidak akan layak, saya yakin itu tidak akan layak.

KETUA RAPAT:

Bukan tidak layak, anda salah mengatakan tidak layak, orang bentunya seperti beras sama dicetaknya.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Harganya Pak.

KETUA RAPAT:

Harganya pun mempuni. Persoalannya pemerintah pusatnya tidak serius membantu. Silakan di cek Pak ke Lampung ya. Jadi waktu itu launching saya sama Pak Romi Ketua Komisi ke Lampung, launching sambil dimakan enak, harganya masih berkaitan karena bahan baku singkong itu paling mahal di Lampung kalau lagi tidak panen, ia kurang lebih 1200 kalau panen harga 800 Rupiah singkongnya. Tapi tidak jalan. Jadi ada Litbang ini maksud saya, coba dulu industri pangan lokal itu di Litbang apakah berhasil atau tidak, baru dikembangkan, sudah jalan baru diluncurkan, jangan habis launching wassalam, sudah. Cobalah, karena begini, egosektoral itu masih terlampau besar, saya Dirjen ini tidak ada urusan sama kamu, Dirjen itu jangan. Coba antara Litbang dengan Badan Ketahanan Pangan duduk. Kalau ini kita kembangkan menjadi apa ya, ini jadi apa ya. Harus dikembangkan, dicoba dong, jangan Litbang hanya membuat bibit, benih, kemudian tidak jelas juga. Ini saya protes bukan karena apa Pak, saya tidak mau Kementerian Pertanian gagal. Itu saja.

Lanjutkan.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Pak Ketua ijin Pak Ketua.

Industri Pangan Lokal memang kita bekerja sama dengan Litbang, bahkan kita sudah punya *list directory*-nya Pak. *Directory* yang kita akan kuatkan, jadi kita tidak memulai dari nol sebetulnya, kita mengembangkan SDM nya penguatan kelembagaannya dan pembinaan pendampingan untuk kemudian dia bisa meningkatkan produksinya. Itu yang kita harapkan. Jadi ini sebetulnya sudah kita identifikasi Pak, kita sudah lakukan identifikasinya, di setiap provinsi itu ada berapa dan sebagainya.

Selanjutnya terkait dengan kampanye mengenai promosi diverifikasi pangan, ini juga akan kita terus kita lakukan, karena ini ada kaitannya juga mendorong pangan yang beragam dan seimbang. Keamanan pangan tetap menjadi bagian apa yang kita lakukan, tapi kita sifatnya lebih koordinasi yaitu koordinasi sosialisasi keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, segar asal tumbuhan baik pre market maupun pos market.

Yang terakhir adalah kajian dan analisis kebijakan ketahanan pangan yang kita lakukan, mulai dari hasil analisis ketersediaan, analisis harga

pangan dan analisis konsumsi pangan. Ini semua kita lakukan dan kita evaluasi, termasuk HPP yang sekarang kita sedang lakukan evaluasinya.

Itu Pak Ketua dan Wakil Ketua yang saya hormati yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Anggota yang terhormat, ini kan ada 5, ada lima Eselon I. Apakah setelah presentase tadi, mau diadakan tanya jawab dulu supaya masih ingat apa yang diucapkan, atau mau nanti sekaligus lima. Saya minta persetujuan anggota.

.....:

Lanjut Ketua.

KETUA RAPAT:

Pakai Mic lah, siapa yang bicara.

.....:

Sekalian saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Sekalian, iya sudah.

Ya kalau sekalian, berarti dilanjutkan Eselon I lainnya.

F-PKS (drh. SLAMET)

Tapi Pimpinan, dilanjutkan dengan catatan pertanyaan-pertanyaan Pak Ketua tadi, dijawab Pak, karena sebagian sudah terwakili.

KETUA RAPAT:

Ya karena saya tahu maunya Bapak-bapak apa, karena Bapak-bapak ini lebih pintar dari saya Pak, saya hanya menyampaikan saja Pak.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Lanjut Dirjen PSP.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Terima kasih.

Bapak Ketua, Bapak anggota yang saya hormati dan saya muliakan.

Dari Direktora Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, ada 5 kegiatan utama, yang pertama kaitan dengan mekanisasi pertanian, khususnya prapenen. Itu ada pengadaan disana traktor roda dua, roda empat, pompa air, rice transplanter, kultivator dan hand sprayer. Kemudian disana juga ada kegiatan pengadaan UPPO, unit pengolahan Pupuk Organik, kemudian ada optimalisasi pemanfaatan Pupuk Organik dan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Kemudian ada kegiatan diperluasan dan perlindungan lahan, itu perlindungan melalui LP2B. Jadi kita upayakan bahwa sawah-sawah yang sudah beririgasi bisa di LP2B kan. Kemudian pemetaan lahan pertanian, ini kita juga masih banyak di daerah yang data lahannya ada, tapi belum tercover ATR/BPN, karena data spasialnya belum lengkap. Kemudian ada optimalisasi lahan rawah dan kering. Untuk lahan-lahan rawah dan optimalisasi lahan kering ini, kita juga berupaya untuk mengoptimalkan sawah-sawah tada hujan yang biasa tanam satu kali bagaimana bisa tanam dua kali.

Kemudian kegiatan kaitan dengan irigasi pertanian, disitu ada rehabilitas jaringan irigasi, pembuatan embung dan dam parit, long storage. Kemudian ada juga irigasi perpompaan dan perpipaan. Kemudian dari Direktorat Pembiayaan, ada untuk perlindungan asuransi usaha tani dan pemanfaatan fasilitasi kredit usaha rakyat pertanian, yang Tahun 2020 ini Kementerian Pertanian dibebankan oleh pemerintah lebih kurang 50 triliun dengan bunga 6% untuk fasilitasi budidaya dan usaha pasca panennya.

KETUA RAPAT:

Balik lagi keslide awal.

Sekarang yang paling penting adalah saya ingatkan. Yang penting PSP ini antarlain alat mesin pertanian serta jaringan irigasi. Ini yang paling penting harus diperbaiki. Ada alatnya, ada benihnya, ada pupuknya, tetapi jaringan irigasinya berantakan, percuma tidak ada guna. Jadi saya minta kepada semua anggota, apabila pulang ke dapilnya, di foto termasuk wilayahnya kalau perlu titik koordinatnya, disampaikan, ini loh kerjanya Dirjen PSP yang jaringan irigasinya belum diperbaiki, segera usulkan. Karena yang lebih tahu di lapangan kita itu dibandingkan dengan Bapak-bapak di depan ini. Beliau-beliau ini paling satu bulan, satu kali belum tentu, kecuali jadi tim horenya Menteri Pertanian, kemana pergi, ia, kalau tidak belum tentu ini tahu lapangan, yang tahu itu kita-kita semua. Ya Pak ya. Saya mengkritisi masalah irigasi pertanian itu yang paling penting.

Kemudian yang saya tanyakan lagi, masih ada alat berat di Kodim, statusnya apa itu, karena ini jadi pertanyaan diseberang lho. Jawab dulu Pak, apa statusnya.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Brigade. Jadi Brigade di Kodim, sekarang sudah mulai kita tarik dan kita kita alokasikan ketinggian kecamatan dan lain sebagainya.

KETUA RAPAT:

Saya minta juga Saudara Dirjen ia, ada juga juklak-juknis mengenai peminjaman alat Brigade. Contohnya, saya minjam brigade pertanian di provinsi. Inikan tidak jelas. Yang setahu saya ongkos angkut dan pulangnya saya yang bayar, BBM nya saya yang membayar, operatornya saya yang membayar, cuma alat. Nah alat itu nanti bagaimana maintenancenya, apakah dikenakan misalnya okelah untuk excavator besar satu jam 100 ribu. Karena sampai hari ini antara Kabupaten/provinsi masih belum jelas ini. Kemarin saya sama Pak Irjen, sama Pak Agung yang kecamatan Natar itu, itu saya membuka embung yang sudah sekian puluh tahun, sudah lebih tinggi dari jalan, itu excavator yang saya pinjam itu 4 bulan Pak, terbayang tidak berapa puluh juta saya harus bayar BBM. Nah ini teman-teman juga tidak tahu ini, teman-teman terutama anggota yang lama juga ada yang tidak tahu, apalagi yang baru. Jadi nanti tolong dijelaskan juga ya jangan lupa. Cara minjamnya bagaimana, sewanya perjamnya berapa, apalagi kewajibannya. Kerena nanti umumnya kalau Kepala Daerahnya orang Golkar, saya minjampun mungkin tidak dikasih, kalau saya bukan anggota Komisi IV. Berhubung saya anggota Komisi IV, dia boleh pakai tapi semua biaya saya yang menanggung. Tolong nanti dijelaskan pada akhir. Kalau perlu kasih catatan di dalam di luar kesimpulan rapat.

Silakan lanjutkan.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ijin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak mau meminjam excavator juga.

Iya silakan.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Pak Ketua, saya setuju Pak ketua, kami ini kan taat dengan Pimpinan, maksudnya begini ketua, sangat setuju kami pulang kedapil dalam reses ini, kami foto, mana irigasi-irigasi yang itu, yang rusak ketua. Cuma setelah kami foto, barang ini bagaimana Ketua. Kalau sekedar usulan saja, sudah maklum

ketua. Kita mau juga ada jawaban Pak Ketua, atau alokasi anggaran ini kita buat itu ketua, berapa perprovinsi untuk itu, pasti bisa seluruh teman-teman ini mencari, apa lagi Pak Khalid, banyak sekali irigasi yang tidak bagus.

KETUA RAPAT:

Terus apa yang dirusak sama Pak Khalid maksudnya.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

la saya sama Pak Khalid satu apa Pak ketua. Satu lagi sekedar masukan Pak Ketua. Asal Pak Ketua jangan marah-marah sama saya, saya kasih masukan Pak Ketua. Begini Pak Ketua, sekilas kami baca tadi Pak Ketua, ada aspirasi kita Pak Ketua, maunya jangan pihak Dirjen yang menentukan, Aceh jangan menentukan kabupaten ini, kabupaten ini, tanya dengan anggota.

KETUA RAPAT:

Ini hal apa, ini hal apa yang ditanyakan.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Penentuan seperti bantuan ternak.

KETUA RAPAT:

Yang tidak boleh dirubah itu Al-Quran sama Al-Kitab. Kalau cuma masalah realokasi boleh. Sudah cukup, jelas.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Oke, siap Pak Ketua.

F-PKS (JOHAN ROSIHAN, S.T.)

Bukan Pak Ketua, saya tambah. Ada kasus misalnya, saya minta dihitung sebagai anggota Komisi IV Pak Ketua. NTB itu Pak ini NTB I ada dua orang Pak, jangan suruh saya berkelahi sama Brodin Bojo.
Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

la sudah. Nanti saya yang bertanggung jawab, termasuk juga tadi Pak Asikin sudah menyampaikan kesaya, segera kami buat catatan. Sudah jangan dipermasalahkan. Percaya sama saya, saya akan turut membantu.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Ketua Sumail Ketua, belakangnya Pak Khalid. Memperkuat apa yang disampaikan Pak Salim Ketua, seperti disampaikan ketua tadi bahwa, begitu ada infrastruktur yang rusak di foto-di foto, maka harapannya masyarakat itu biasanya itu harus segera diselesaikan, kalau tidak diselesaikan dieksekusi ketua, dampaknya kekita itu. Mohon ini terus diperjelaslah, diclearkan Pak ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Begini Pak Sumail, kita ini bukan pesulap, begitu ini rusak diusulkan besok harus jadi, ya tidak mungkin lah.

F-GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Maksud saya juga bukan demikian.

KETUA RAPAT:

Jadi begini kurang lebih Pak, nanti saya jelaskan. Setelah usulan Bapak-bapak dikumpulkan, saya panggil Sekjen, saya panggil Dirjen PSP, ini bagaimana penyelesaiannya, kerena disini harus dibaca juga. Jaringan irigasi tersier kurang lebih ada 160 miliar perbaikannya, ia silakan Bapak masih pulang ini, kan mau pulang maru reses ini, foto-foto, usulkan, betul Pak. Karena disini dialokasikan 160 miliar. Ia kalau yang tidak butuh, bagaimana. Tetap saja pulang ke dapil, foto, usulkan. Jelas, sudah. Makanya ini dibaca. 160 miliar untuk perbaikan jaringan irigasi. Kalau memang merasa tidak cukup, ia semuanya belum dibelanjakan juga pada Bulan Maret, ia kita suruh realokasi dulu, jangan main tambah-tambah saja, anda bukan anggota Bangsa tidak punya hak untuk menambah.

Jelaskan. Jadi nanti mereka pulang, mereka foto paling tidak, ia tidak semua aspirasi misalnya yang rusaknya irigasinya 50 hektar minta diperbaiki semuanya, ia tidak lah, tapi bertahap diperbaiki. Jadi menunggu juga aspirasi dari teman-teman. Jelas?

Ia lanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baik, terima kasih.

Kegiatannya seperti kita lihat, disini memang ada rehabilitasi jaringan irigasi tersier, ini ada 160 miliar rupiah, ini ada 135.600 hektar. Jadi bagi anggota yang memang nanti setelah berkunjung ke daerah ada irigasi yang rusak, ia silakan diusulkan, tapi memang dananya terbatas, mungkin seperti

yang disampaikan oleh Ketua, mungkin tidak semuanya kita realisasikan. Jadi nanti akan kita atur, sehingga semuanya merata, begitu.

Kemudian juga disini ada irigasi perpompaan dan perpipaan. Kemudian ada pemetaan, ada asuransi kemudian ada padat karya juga disini kaitan dengan dari sana ada JITUT/JIDES, kemudian ada pupuk ini unit pengolahan pupuk organik disini ada 1000 unit kita sudah sepakat bahwa masing-masing anggota dapat 10 unit, nanti bisa diusulkan CPCL nya, tentunya kami setuju bahwa CPCL itu akan menunggu dari para anggota.

Kemudian kaitan dengan alat mesin pertanian juga, kita sudah kita sampaikan, bahwa disana ada traktor roda dua, roda empat, pompa air, transplanter, cultivator dan hand sprayer yang jumlahnya 819 miliar rupiah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa kita ada realokasi lebih kurang 250 miliar rupiah, yang 100 miliar rupiah untuk dialokasikan ke SDM dan 150 miliar rupiah khusus untuk jaringan irigasi dan padat karya lainnya.

Kemudian disini juga ada optimalisasi pemanfaatan pupuk organik, itu ada lebih kurang 4 juta liter, lebih kurang ada 300 miliar, ini mengambil dari cetak sawah. Cetak sawah untuk tahun ini sementara ditunda, karena tahun ini kita mencoba mengevaluasi sawah-sawah yang sudah dicetak itu apakah sudah dimanfaatkan secara optimal atau belum. Yang kita optimalkan di tahun ini, sehingga semua sawah yang sudah kita cetak bisa termanfaatkan secara optimal.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Interupsi Pak Ketua.

Pak Ketua, ada dua hal yang mau saya sampaikan, tergantung apa yang baru dibicarakan. Pertama, tadi pupuk 10 unit ya untuk anggota. Saya kira ini tidak tambah, karena ini lebih riil, kurangi anggaran pupuk organik yang padat itu, yang POG. POG masih adakah.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

POG sudah tidak ada Pak.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Oh, sudah tidak ada. Kurangi yang cair itu. Kalau tetap diadakan yang cair, tidak diperbolehkan dipusatkan pembeliannya. Ini sumber malah petaka nanti ini. Saya yakinkan anda, ini sumber malah petaka. Jual air ini Pak, tapi kalau dianggarkan itu Pak Ketua, lewat DAK diberikan ke tiap-tiap daerah, ia silakan dibagi-bagi lewa sana, itupun angkanya dikurangi 4 juta liter itu banyak Pak. Kalau sudah digantikan dia sebagian ke UPPPO, ia tinggal diberi tahu kepada mereka, pupuk cair itu antarlain kecing UPPO itulah, kan kira-kira begitu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini menjadi perhatian kita semua, agar jangan Eselon I kena masalah. Pak Mindo ini sudah sangat khatam di Komisi IV, 5 periode, tadinya mau naik kelas, jadi di Kelas V, tapi Beliau tetapi di Kelas IV saja. Tolong ini diperhatikan ya, kalau tadi memang usulan bisa dikurangi, ia dikurangi. Tapi mohon maaf Pak Mindo, kalau di DAK kan saya kurang setuju, karena apa, contohnya benih Jagung yang di Lampung, akhirnya jadi temuan di Kejaksanaan. Betul tidak Pak Momon yang di Lampung ada temuan kan. Jangan sampai ada lagi temuan, kan kita tau..

Lanjut.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S..P, M.M.):

Baik terima kasih.

Ini kaitan dengan penyediaan alat mesin pertanian prapanen 2020, ada traktor II, pompa air, transplanter, cultivator, dan hand sprayer. Kemudian ini fasilitas infrastruktur pertanian, ini disini ada rehabilitasi jaringan irigasi, kemudian ada pengembangan sumber air dimana disana ada perpompaan dan perpipaan, kemudian pemanfaatan sumber-sumber air yang tersedia sebagai irigasi, kemudian disana juga untuk satuan kegiatan berupa unit sesuai dengan komoditas yang didukung baik komoditas tanam pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Luas layanan itu lebih kurang 20 hektar, untuk tanaman pangan dan perkebunan, kemudian 10 hektar untuk hortikultura dan peternakan. Kemudian disana juga kita membangun Embung, kemudian juga ada Dam Parit, *Long Storage* yang kita anggarakan. Kemudian ada rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

KETUA RAPAT

Ini tadi saya lihat disini ada optimasi lahan rawa dan SID. Maksudnya apa ini.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Jadi, optimalisasi lahan rawah.

KETUA RAPAT:

Ini yang serasi itu kan.

Terus lanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Yang serasi jadi ada optimalisasi lahan rawa, kemudian SID nya jadi sebelum kita optimalkan, ada survey investigasi dulu ada hasil surveynya da gambarnya, baru kita optimalkan.

KETUA RAPAT:

Ini program serasi ini sedang menjadi perhatian ia, apa lagi ini nilai SID nya cukup besar 300 miliar lebih. Ini sudah menjadi perhatian oleh kantor seberang, ya Pak. Saya minta ini dulu dievaluasi lagi, karena ini sudah ada tanda kutib ketidak beresan data. Jadi nanti kalau perlu kita *break* kita *break* untuk masalah Serasi ini. Kemarin kan sudah saya jelaskan Bapak kan, ini ada masalah datanya yang tidak konkrit, tidak jelas, kurang lengkap, itu temuan seberang loh Pak, bukan temuan saya.

Kemudian teman-teman kalau memang ini disini juga ada program pembuatan embung kurang lebih 400. Kalau memang butuh bisa diusulkan tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, ada peraturannya. Contohnya kepemilikan tanah, kegunaannya dan lain-lainnya. Nanti secara Juklak dan Juknisnya tolong disampaikan supaya Anggota tahu.

Lanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Siap Bapak Ketua, mungkin kami sampaikan bahwa untuk optimalisasi rawa ini memang sedikit ada masalah sehingga disana kita judulnya optimalisasi lahan rawa dan lahan kering Pak. Lahan kering ini kita fokus nanti di lahan-lahan tadah hujan yang biasa tanam satu kali bagaimana kita bisa mengoptimalkan dengan mencari sumber-sumber air sehingga nanti bisa tanam dua kali. Jadi nanti kalau misalnya rawanya nanti kira-kira tidak bisa kita laksanakan bisa ke lahan keringnya Pak. Jadi itu lahan rawa dan lahan kering.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, di beberapa wilayah banyak sawah tadah hujan dan tidak ada airnya. Saya juga pernah coba bicara dengan PU, dengan Komisi V DPR RI minta bantuan pompa air. Dikasih kurang lebih 10 titik untuk saya di Lampung, *alhamdulillah* dari 10, 11 rusak semua. Tidak, ini supaya jelas karena apa? begitu ada masalah dikit mereka tidak ada yang mau ngurus, kelompoknya banyak yang kurang beres. Misalnya listriknya mati atau gensetnya mati ya sudah biarin saja. Inikan mahal sekali loh, itu di atas 100 juta loh pompa celup itu yang mencapai 120 meter itu mahal.

Jadi tolong saran saya lebih banyak lebih baik dibuatkan embung penampungan saja. Ini saya rasa lebih efektif, kenapa? Misalnya teman-

teman bisa membuat embung di wilayahnya, otomatis di sekelilingnya itukan bisa ditanam pohon dari hortikultura. Kemudian teman-teman juga nanti bisa minta program dari Kementerian Kelautan untuk budidaya perikanan. Jadi embung ini gunanya bukan hanya untuk tandoan air, seperti yang saya bilang tadi 4 bulan saya kerjakan di Kecamatan Natar Itu saya kasih sekelilingnya tanamin pohon, kemudian kita kasih bibit ikan. Jadi minimal ada manfaatnya selain penampungan air. Ini minta tolong nanti kalau bisa embungnya ditambahkan lagi, di-*break down* lagi.

Lanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baik, terima kasih.

Mungkin langsung kehalaman 14, disini ada kegiatan fasilitas pembiayaan, yaitu asuransi usaha tadi padi, kemudian ada juga asuransi usaha ternak sapi. Pelaksanaanya sesuai dengan surat penugasan Menteri Keuangan, yaitu ditugaskan kepada asuransi Jasindo. Ini mungkin kami sedang mengusulkan apakah bisa dilaksanakan oleh asuransi lainnya sebagai competitor sehingga pelayanannya akan lebih baik.

Mungkin itu Bapak Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini hanya masukan, di dinas itu kadang-kadang tidak mengerti Pak. Saya mau bayar asuransi bagaimana? tidak mengerti. Cobalah dicek, kemudian mengklaimnya, disinikan Cuma bilang premi asuransi 36 ribu per hektar yang dibayar oleh petani, lainnya disubsidi oleh Pemerintah cq. Kementerian Pertanian. Betul Pak? iya kan, disebabkan banjir, hama, dan penyakit.

Inikan masih mental sebetulnya penjelasannya, yang menentukan siapa. Kemudian minimal kalau 1 hektar rusak, coba bagaimana mekanismenya karena saya sering sekali mendapatkan complain termasuk kemarin saya dapat perintah juga dari Bapak Made Urip mengenai asuransi pertanian ini harus didengungkan, karena ini kurang greget. Banyak rakyat yang tidak tahu cara bayarnya gimana, mengklaimnya gimana, mekanismenya bagaimana. Mereka ke KUPT, KUPT-nya belum datang, besoknya lagi kurang sehat, besoknya lagi nengok orang sakit, tahu-tahu lahan padinya sudah banjir, sudah puso.

Jadi tolong dijelaskan asuransi usaha tani itu apa kewajibannya, apa haknya, termasuk juga tentang hak. Nanti saja jelasinnya, kalau perlu berikan bahan ini secara singkat nanti dibagikan kepada Anggota. Saya yakin seperti

Mbak Vita misalnya ini temannya Bapak Budi ini ya, kalau ditanya asuransi tani gimana caranya?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDI SATRIO DJIWANDONO):

Ketua, maksudnya apa barusan Ketua?

KETUA RAPAT:

Tidak, kan saya bilang Mbak Vita kan Anggota baru, kalau Bapak Budi Anggota lama lebih paham.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Walaupun sama-sama bujangan.

KETUA RAPAT:

Ya, saya tidak ngomong Bapak Ketua, tapi paling tidak berikan selebaran inilah, hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? petani membayar 36 ribu, haknya apa? mekanisme klaimnya bagaimana. Karena ini mohon maaf, kalau saya masuk asuransi waktu saya ditagih polis saya ini seperti malaikat dicari loh Pak, pagi, siang dan malam untuk bayar polis. Giliran saya mengklaim, kemarin saja saya cukup kencang berantemnya, asuransi waktu itu tiap hari datang kerumah untuk saya masuk asuransi anak saya. Begitu anak saya sakit Pak, 24 jam tidak ada pelayanan dari asuransi jawabannya tidak ada. Sampai akhirnya saya bilang mau ribut atau mau diurus asuransinya.

Jadi tolong Pak, nanti Bapak tinggal perintah staf Bapak dibelakang dibuatkan hak dan kewajiban terhadap petani dan cara mengklaimnya bagaimana. Jelas ya Pak? dilanjutkan, ada berapa lagi Pak Momon.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Bapak Ketua, asuransi tadi kan sudah diusulkan kalau bisa tidak hanya Jasindo. Itu kita dukung, janganlah ditunjuk satu itu melanggar persaingan usaha sehat juga itu.

KETUA RAPAT:

Monopoli itu.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Jadi memang kita pastikan saja tidak satu, siapa itu? urusan Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Ya, kita tidak boleh ikut campur.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Kita hanya mendukung jangan satu, menghindari monopoli.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau perlu kalau masih tidak jelas tanya Mbak Vita yang ngurus asuransi.

Lanjutkan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Baik, terima kasih Bapak Ketua.

Selanjutnya Dirjen PKH.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Terima kasih.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Bapak Sekjen beserta seluruh Eselon I.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Lanjut, kami tentang harmonisasi data kebijakan dan target program Ditjen PKH tahun 2020, kemudian program kegiatan anggaran tahun 2020 dan target kegiatan prioritas tahun 2020.

Lanjut, yang pertama ini adalah terkait dengan data harmonisasi, data kami dengan BPS. Jadi BPS telah mengakui data yang kami sampaikan. Lanjut, ini adalah kebijakan dan target program peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020 dengan titik fokus itu pada populasi sapi potong dan sapi perah, serta kerbau. Kemudian produksi daging, kemudian terkait dengan rencana ekspor.

Kemudian strategi raihannya ini melalui dengan adanya KUR dan kemudian investasi. Kemudian mendorong terbangunnya UMKM-UMKM baru. Kemudian sehingga dengan demikian kita bisa meningkatkan tenaga kerja kita sekitar 5,2 juta dengan NTP naik.

Lanjut, untuk program kegiatan anggaran mohon ijin kami sampaikan bahwa anggaran per kewenangan dan per jenis belanja kegiatan tahun 2020. Kami mendapatkan anggaran sebanyak Rp2,022 triliun. Jadi per jenis belanjanya itu kami bagi 3, yaitu belanja modal, kemudian ada belanja pegawai, kemudian ada belanja barang dengan proporsional seperti....

Nah, untuk per kewenangan itu ada kami berikan di daerah, kemudian di pusat, kemudian ada di 22 UPT yang kami miliki....

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen, itu yang untuk daerah 1,1 triliun lebih?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Pengawasannya bagaimana?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Pengawasannya seperti kami jelaskan bahwa disitu nanti kita ada fakta integritas....

KETUA RAPAT:

Kenapa?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Ada fakta integritas yang harus kami lakukan dengan Kabupaten dan Provinsi.

KETUA RAPAT:

Bukan MoU lagi ya?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Bukan.

KETUA RAPAT:

Kemarin kan anda ngomong MoU, saya tidak setuju. Fakta integritas apa kurang lebih bunyinya?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Diantaranya terkait dengan kesiapan mereka untuk melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawab mereka. Kemudian evaluasi dan pelaporannya, dan termasuk pengawasan pekerjaan yang mereka lakukan.

KETUA RAPAT:

Hanya itu saja, sanksi tidak ada?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Sanksinya nanti untuk kegiatan berikutnya kami tegur atau kami hentikan bantuan.

KETUA RAPAT:

Saya tidak setuju, kemarin anda mengatakan sama saya MoU. Saya yang tidak setuju, MoU itu *Memorandum of Understanding*, nota kesepahaman, betul? Saya minta dirubah fakta integritas. Kalau fakta integritas tidak ada sanksinya ya wassalam. Tidak, saya tidak setuju, nanti kita bahas ulang lagi ini yang 1,1. Saya mau tahu fakta integritas itu apa? jangan nanti tahu-tahu sapinya dijual, sapinya hilang. Bisa tidak begitu terjadi?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Bisa saja Bapak Ketua.

Mohon ijin, nanti kami lampirannya model fakta integritasnya.

KETUA RAPAT:

Tolong ada fakta integritas, ada kewajiban, ada hak, ada sanksi.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Karena apa? kalau dia bilang “oh, sapinya hilang”, berarti orang itu yang tidak punya akal sehat. Kenapa? Kan ada kewajiban dari Pemerintah, ada asuransi peternakan. Betul? Jadi dicantumkan juga kalau ada dapat bantuan ini wajib ikut asuransi peternakan. Saya nanti lihat dulu, ini pecahan anggaran ini saya masih akan berunding sama Anggota dulu. Karena termasuk fakta integritas apa sih bunyinya, apa sih sanksinya?

Pak, saya memberikan bantuan Alsintan, saya selalu didampingi oleh Polisi, oleh Koramil, oleh Dinas. Karena apa? saya sebutkan bantuan ini tidak ada pungutan satu pihak pun, kalau ada pungutan ini ada Polisi, ada Tentara, ada dari Dinas. Jadi nanti fakta integritasnya ditayangkan dulu, baru nanti kita sebelum kesimpulan saya minta fakta integritasnya diperlihatkan. Karena apa? untuk efek jera kepada daerah yang mendapatkan bantuan ternak. Tujuannya apa? melindungi anda Pak, supaya anda jangan salah kasih, jangan tidak tepat sasaran.

Lanjutkan.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Baik, mohon ijin halaman terakhir ditayangkan.

Ini contohnya, mohon ijin Pak Ketua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kami mencoba untuk menampilkan fakta integritas perjanjian kinerja tahun 2020 terhadap seluruh provinsi yang kami berikan bantuan. Kemudian ini kami contohkan untuk Jawa Timur. Jadi disini sebenarnya sudah terurai terkait dengan kinerja tahunan dan berapa uang untuk apa disitu.

Pertama, Kepala Dinas membuat perjanjian kinerja dulu, setelah dia membuat perjanjian kita membuat fakta integritas perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dengan Dirjen PKH. Nah, ini yang ada symbol dua.

KETUA RAPAT:

Pelan-pelan dulu, teman-teman tolong dicermati.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Ini kerja bulanan ini yang depanan Pak, yang ada logo 2. Terus, ini fakta integritasnya tolong dibiarkan dulu.

KETUA RAPAT:

Terus, naikkan lagi bawahnya apa, pelan-pelan.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Karena disini mewujudkan target kinerja tahap pertama itu, mewujudkan target sesuai dengan lampiran perjanjian, nanti terlampir perjanjian itu. Kemudian melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terhadap bantuan yang diberikan. Nomor tiga, bertanggungjawab terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja.

KETUA RAPAT:

Pengertian bertanggungjawab itu apa?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Bertanggungjawab itu artinya begini, ketika misalnya sapi itu mati ternyata tidak mati atau hilang dilaporkan mati, nanti mereka harus bertanggungjawab untuk mengembalikan. Jadi mereka ini tidak boleh diberikan, sudah mati Pak, sudah hilang Pak, artinya semua harus ada bukti-bukti kuat yang menyebabkan mereka apakah dikenai *punishment* atau tidak. Mungkin itu Pak.

KETUA RAPAT:

Naikkan lagi sedikit, saya mau lihat bawahnya. Coba teman-teman tolong dilihat ini fakta integritas atau fakta apa ini. Sementara di kementerian Pertanian ada asuransi ternak, kenapa tidak dimasukkan disini, wajib mengikuti asuransi ternak. Jangan nanti kalau hilang ya hilang saja sudah. Yang membuat program ini Kementerian Pertanian loh, paling tidak kan wajib juga mengikuti asuransi peternakan, kemudian bertanggungjawab terhadap keberhasilan, kegagalan, pencapaian target kinerja, ya bentuk tanggungjawabnya gimana. Kalau saya bilang ini mah bukan fakta integritas, Cuma basa-basi saja ini mah. Sanksinya tidak ada kan Pak, ini Cuma bertanggungjawab terhadap keberhasilan, kegagalan. Kemudian pihak kedua melakukan supervisi, evaluasi, pengambilan tindakan berupa teguran sampai penghentian pemberian bantuan pada tahun berikutnya. Ini tidak ada sanksi hukumnya Pak. Tahun ini gue dapat, tahun depan tidak dapat ya sudah tidak apa-apa, nanti 2 tahun lagi gue ajuin lagi *insya allah* dapat. Saya maunya dicantumkan permasalahan hukumnya. Ini kalau dikasih sudah mati ya mati saja sudah.

Satu lagi Bapak Ketut, masih ingat program ayam bekerja. Berapa ratus miliar yang lalu.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Sekitar 500.

KETUA RAPAT:

Di Litbang?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Kurang hafal saya.

KETUA RAPAT:

Bapak Momon di Litbang berapa?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

250 miliar.

KETUA RAPAT:

250 lebih miliar, jadi kurang lebih hampir 800 miliar. Apa evaluasinya? Ada jawabannya, apa evaluasinya ayam bekerja? Coba dijawab.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Mohon ijin Bapak Ketua, sebenarnya kami sudah melakukan evaluasi. Dan kami sudah cetak itu karena yang menjadi Ketua Tim Supervisi Evaluasi itu adalah Bapak Bibit Slamet Rianto mantan Ketua KPK. Jadi beliau sudah memberikan masukan dan kelemahan serta kekurangan atau keberhasilan yang kita raih selama ini.

KETUA RAPAT:

Terus.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Sebenarnya kalau kita bilang itu gagal, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena ada juga bukti *success*.

KETUA RAPAT:

Pak Ketut, jangan pakai bahasa, saya tanya mencapai tidak 50% keberhasilannya? Wilayah mana tunjukkan kepada saya.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Jember misalnya.

KETUA RAPAT:

Sekarang bukan hanya Jember loh, hampir seluruh Indonesia ada. Lampung saja dapat banyak, coba dihitung sampai tidak 50%. Ada laporan temuan BPK, kalau program yang tidak bagus jangan dilanjutkan. Karena ayam bekerja itu program yang coba-coba. Kalau anda bilang diatas 50%, bohong. Taruhan sama saya kita audit, kalau kementerian tidak punya dana, pakai dana saya untuk audit. Program ini program yang dicoba-coba tapi gagal. Hampir 800 miliar loh itu. Jadi anda jangan bilang Cuma sukses di Jember, nanti kalau saya turutin tim audit sana ternyata tidak sampai 50% masalah lagi kita.

Bapak Sekjen, saya minta setiap kegiatan yang sudah dilakukan dievaluasi dulu kesuksesannya berapa, keberhasilannya berapa, yang ngomong siapa, datanya dari mana. Orang sudah jelas kok tadi saya sampaikan, ini ayam bekerja ini gagal total ini. Kenapa saya sangat keras, kenapa saya sangat kritis karena saya tidak mau uang rakyat terbuang percuma. Kemarin sudah saya jelaskan kepada Bapak Ketut, DOC bantuan saja yang ayam kecil bantuan dari Jawa Timur ke Sumatera Barat saja sekian puluh ribu mati di jalan ayamnya. Betul Pak, iya kan?

Jadi kalau program ini belum jelas, belum matang tolong bantu dikaji ulang. Karena cara mekanismenya saja saya ngikutin wah ini sudah tidak benar. Satu kepala keluarga dikasih sekian ekor, dikasih kandang, dikasih pakan. Begitu 3 bulan kemudian yang mengevaluasi juga tidak datang, tidak melihat, ujung-ujungnya "ayamnya mana?", "ayamnya pergi, kabur". "ayamnya mana?" "ayamnya mati". Cobalah kalau anda tidak percaya anda sama saya ke Lampung ke lapangan.

Jadi saya minta tolong setiap program yang gagal jangan ditutup-tutupin. Nanti saya minta persetujuan semua Fraksi ini, sebelum Rapat Dengar Pendapat saya minta laporan evaluasi kinerja dulu baru bahas anggaran. Jelas ya Bapak Ketut ya? ini bukan salah Bapak Ketut, saya paham Pak, anda hanya pelaksana, ada yang lebih salah dari Bapak Ketut.

Ada lagi Pak Ketut?

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Ketua, mengingatkan saja masalah fakta integritas. Boleh apa tidak?

KETUA RAPAT:

Bapak apapun juga boleh disini. Bapak kan Partai Nasdem, partainya Bapak Menteri.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Bukan, ijin ini mengingatkan bahwa dalam fakta integritas itu saya juga jadi Anggota DPR RI karena ada fakta integritas dengan stake holder. Jadi

saya mengingatkan saja bahwa fakta integritas itu harus detail Pak, jangan bertanggungjawab seperti yang dikatakan Bapak Ketua tadi, bertanggungjawabnya kalau hilang ganti, itu tidak jelas Pak. Maksud saya harus sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya sehingga bantuan yang Bapak berikan itu tepat guna dan tepat sasaran. Apa yang dikatakan Bapak Ketua tadi ada benarnya, integrasi antara Jasindo, asuransi dengan Kementerian PKH itu harus integrasi Pak. Jasindo jangan sampai jalan sendiri, PKH juga jangan sampai jalan sendiri.

Nah, saya mengingatkan saja bahwa fakta integritas ini harus sedetailnya Pak, sanksinya apa, kalau hilang gimana, siapa yang bertanggungjawab, sehingga para kelompok atau Gapoktan penerima itu tidak main-main. Hilang dibilang mati, dijual dibilang mati, ini kejadian Bapak Darori. Nah, ini hanya mengingatkan saja supaya Bapak Ketut lebih detail.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Bapak Ketut.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Baik Pak Ketua, terima kasih.

Terima kasih masukannya nanti kami akan sempurnakan terkait dengan fakta integritas ini. Karena terus terang saja memang kami tidak mempunyai waktu yang cukup tadi malam membuat sampai jam 12 malam. Karena siangnya kami Rapat Dengar Pendapat disini untuk dengan Bapak Pimpinan dan eselon I kemarin, lanjut malam sampai jam 12 kami selesaikan ini dan lain sebagainya.

Nah, ini karena saya Dokter Hewan bukan ahli hukum. Jadi saya terpaksa nyontek-nyontek di google isinya. Nah, kalau ini mendapatkan perbaikan dan bila perlu kami mohon dengan hormat copy-nya yang Bapak punya kami contoh. Mungkin jauh lebih bagus dan lebih cepat gitu.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Nanti tuker tempat duduk Pak.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Baik, coba dilanjut dengan halaman berikut.

Halaman 8, mohon ijin Bapak Pimpinan kami lanjutkan.

Baik Bapak Pimpinan serta Bapak Anggota, terkait dengan kegiatan ini kami bagi menjadi 3 yang dipusat, kami bagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok satu untuk Direktur Perbibitan mungkin uang kami banyak terserap disitu, karena terkait dengan bantuan-bantuan ke petani. Kemudian itu terserap hampir 1,1 triliun lebih.

Kemudian untuk pakan ternak yang terkait dengan ternak yang kami adakan itu juga menempatkan urutan nomor 3. Kemudian untuk kesehatan hewan juga kami dorong untuk bagaimana menangkal secara preventif maupun pengendalian penyakit termasuk pemberantasannya. Kami prioritaskan disitu sekitar 290 miliar. Kemudian untuk pengolahan dan pemasaran hasil terkait dengan program kami untuk peningkatan ekspor. Kemudian kesehatan terkait dengan standar-standar yang harus kami penuhi dan lengkapi termasuk pengendalian betina produktif yang kita hadapi di masyarakat.

Lanjut, target kegiatan kami halaman 10. Jadi mohon ijin Bapak dan Ibu, kalau target si Komandan ini istilahnya adalah Tetapi sebenarnya kami berikan sapi indukan andalan komoditas negeri. Jadi sapi, kerbau andalan komoditas negeri. Jadi total populasi kami sekarang ini untuk sapi potong kita itu ada 18,821 ribu ekor. Jadi dari tahun 2014 sampai tahun 2019 ini kami baru bisa meningkatkan populasi itu sekitar 4.000.821.

Kemudian dari 18 juta ini ada asektor, artinya sapi yang siap kawin. Itu sebanyak 3.730.000 ekor untuk sapi potong. Dan sapi perah kita hanya 277.000 selanjutnya ada kerbau 53.000. Ini yang siap kawin. Nah, di samping hal-hal seperti ini kita juga mengalami kenyataan bahwa tidak semua sapi yang kita pelihara itu adalah sapi yang bisa kita handle dengan baik. Tentu disini ada sapi yang lahir karena kawin alam, tidak melalui intervensi. Untuk itu, kami dari populasi baik dari intervensi maupun kawin alam kami berharap ada kelahiran sapi nanti tahun 2020 akhir tahun 2020 sekitar 4 juta ekor sapi.

Kemudian, lanjut. Langkah-langkah yang mendukung yang kami sampaikan, untuk meraih target 4 juta itu adalah sebagai berikut. Jadi betina produktif kita untuk asektor kita semua itu akan melahirkan IB sebanyak 4 juta, itu ada 5.836.000 kita akan IB sebanyak 4.000.061, kemudian kawin alamnya ada 1.774.000 ekor. Nah, ini betina produktifnya kami total semua sekitar 6.177.629 ekor. Kemudian dari sini kami akan lakukan artifisial termasuk artifisial ensiminasi. Kemudian yang kami sasar itu adalah sapi potong, sapi perah dan kerbau. Jadi tingkat persen keberhasilan kami sudah akan tercantum disini, bahwa sapi potong itu 7%, sapi perah kemungkinan berhasilnya 80%, kemudian kerbau itu sangat rendah, yaitu 40%. Itu tingkat keberhasilan perlakuan IB.

Tentu disini kami akan sangat membutuhkan terkait dengan semen beku sekitar 5,5 juta dosis. Kemudian pelaporan terkait dengan adanya kawin alam, kemudian BOP layanan termasuk PKB (Pemeriksaan Kebuntingan). Sebenarnya kami juga selain mentraining petugas IB, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain kami sebenarnya perlu mengetahui terkait dengan adanya gangguan reproduksi.

Lanjut, nah ini kami mohon ijin kami lanjutkan terkait dengan asektor. Target asektor kami di 34 provinsinya sebarannya. Jadi contohnya, misalnya di Jawa Timur itu sapi potongnya ada 1.700.000 kemudian sapi perahnya ada 164.000, kemudian kerbaunya ada 3000. Nah, ini kemudian Bali lanjut NTB, NTT, sebarannya seperti ini dengan jumlah seluruhnya sapi potong kit aitu 3.000.730 dan kemudian sapi perah 277.000 dan kerbau ada 53.000 dan kawin alam yang kita target sekitar 1.774.000. karena kawin alam ini banyak terjadi terutama di NTT, kemudian di Kaltara, Kalimantan dan beberapa daerah di Sulawesi.

Bapak-bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sangat kami hormati.

Target kelahiran Komandan tahun 2020 itu cara-cara hitungnya seperti ini, sehingga kami mendapatkan angka 4.077.760 ekor. Terutama kami bagi menjadi daerah provinsi termasuk provinsi utama ada 6 provinsi, provinsi andalan ada 4 provinsi. Jadi provinsi-provinsi utama itu adalah provinsi-provinsi yang warnanya kuning. Kemudian provinsi-provinsi andalan itu adalah yang warnanya merah bata. Kemudian provinsi pengembangan itu ada 24 provinsi warnanya hijau. Dari sekian provinsi ini ada kriteria yang harus kami tentukan.

Pengembangan khusus ini kami juga melakukan intervensi atau program terkait pengembangan sapi wagyu, galaxian blown dan Belgian blue. Karena terus terang saja Bapak Ketua, kami ingin membuat terobosan terkait peta sapi potong Indonesia, karena selama ini sapi kita seperti sapi Bali, sapi Aceh, sapi Madura itu adalah plasmanutfah sebenarnya yang suatu saat nanti kita dapat kritikan dari dunia internasional ketika itu yang kita potong terus. Mungkin itu kami....

KETUA RAPAT:

Yang dimaksud BIB itu apa, saya tidak ngerti ini. Kemarin sudah saya ingatkan, tolong kalau ada singkatan dikasih keterangan. Yang ngerti kan Cuma Bapak Ketut saja, mungkin Agung juga tidak tahu.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Kami sebenarnya sudah, mohon ijin Bapak Ketua, Pak Dedi ini sudah kami siapin dibawahnya ada catatan, tapi ada yang hilang, ada yang masih. Jadi terus terang mohon ijin Bapak Ketua, untuk BET itu adalah Balai Embrio Ternak. Jadi dia khusus menghasilkan terkait embrio dan sperma. Kalau untuk BIB itu artinya Balai Inseminasi Buatan, jadi tempatnya orang artifiial insiminasi. Nah, khusus dia bagaimana cara meng-IB, khusus dia menghasilkan sperma sapi-sapi dan jenis-jenis sapi yang berkualitas dan ini posisinya ada di Indra Puri, kemudian ada di Singosari, Malang, Palembang dan seterusnya.

KETUA RAPAT:

Pak Ketut, saya minta penjelasan.

Populasi sapi potong kita ada berapa? Kebutuhannya ada berapa? Coba, kemudan kerbau berapa. Jangan nanti waktu menghadapi lebaran ya seperti kebingungan pemadam kebakaran, "wah ini tidak bisa, sudah impor daging kerbau dari India". Saya yang paling tidak setuju impor daging kerbau dari India. Kenapa saya katakan tidak setuju? Cobalah pikirkan, beku diminus berapa Bapak Ketut, daging beku minus berapa?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Minus 21 boleh.

KETUA RAPAT:

21, oke. Waktu dari *cool storage* minus 21, begitu keluar jadi berapa? Ini loh Pak, ini sapi ini daging ini beku ini. Di dalam *cool storage* minus 21 derajat. Begitu ini pintu *cool storage* dibuka pasti drop, langsung minusnya bisa 13-14. Untuk naikkan 21 lagi butuh waktu kira-kira 1-2 jam untuk mencapai titik tadi minus 21. Kemudian daging kerbau ini dibawa ke pasar diangkut pakai mobil box, mobil box itu minusnya berapa? Tidak mungkin sampai 21. Dari mobil box dimasukkan ke box warna merah atau orange, kurang lebih di box itu mungkin dikasih es, jadi minus berapa? Jagan-jangan sudah plus itu. Kira-kira masih higienis tidak?

Jadi maksud saya itu impor ya boleh, tapi tolong perangkatnya itu disiapkan secara matang. Saya tidak yakin setiap pasar tradisional yang jual daging kerbau itu punya *cool storage* mini, rata-rata kan pakai cool box Pak. Ini loh, Bapak yang mengeluarkan rekomendasi loh, impor daging itu atas perintah atas. Bapak yang mengeluarkan tapi Bapak tidak memandu mereka, harusnya dipandu, minimal harus punya *cool box* di pasarnya. Jangan dari *cool storage* masuk ke mobil sudah berapa banyak bakteri yang disitu. Dan ini tanpa disadari, Bapak bilang Bapak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan termasuk daging. Bapak tidak ngerti tidak maksudnya Pak, apa yang saya katakan Bapak ngerti tidak? Kira-kira terkontaminasi tidak, kira-kira saja Pak.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Ketua, terkait dengan membawa daging apalagi di daerah tropis seperti ini, itu sebenarnya perkembangan bakteri itu, baik jamur maupun bakteri itu sebenarnya terhambat. Tetapi pada hal-hal tertentu di daerah lembab seperti di pasar becek itu ya memang sumbernya bakteri.

KETUA RAPAT:

Sekarang begini, saya mengeluarkan rekomendasi untuk anda impor kerbau minimal yang diberi tugas itu memberikan box-nya kepada pasar tradisional. Jadi begitu minus 21 dibuka masuk ke mobil box yang ngantarkan itu sudah minus 15, masuk ke box kecil dikasih es batu, *insya allah* itu kalau ada es batunya. Kalau tidak ada es batunya ya sudah, jadi disarankan Pak, anda masukin ini, anda harus memberikan cool box-nya di pasar. Kasihan Pak, mungkin rakyat kita tidak berpikir sampai sana, yang penting harga dagingnya murah. Ini untuk Bapak, untuk kebaikan Bapak, bukan untuk kebaikan saya loh.

Nanti waktu pendalaman saya minta tolong tampilkan stok sapi potong, stok kerbau dan yang lain serta kebutuhan. Dan yang paling penting sumbernya dari Budi atau dari siapa sumber data itu. karena kalau sumber datanya tidak jelas ya sudah *wassalam*.

Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ketut.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Saya mau sampaikan sebenarnya mohon ijin Bapak Ketua, bahwa kami di Ditjen PKH bekerja terkait dengan produksi. Terkait dengan hilir, itu sebenarnya juga diatur oleh Permendag Nomor 96 Tahun 2018 bahwa itu ditugaskan kepada Bulog.

KETUA RAPAT:

Itu dalam Ratas iya, saya paham.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Untuk itu, kami sebenarnya agak jauh kejangkauan kami untuk mengatur Bulog.

KETUA RAPAT:

Bukan ngatur Bulog, rekomendasi anda yang mengeluarkan, Kemendag SPI loh.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Ijinnya ada di Kemendag.

KETUA RAPAT:

Rekomendasinya?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Dari kami.

KETUA RAPAT:

Maksud saya waktu Bapak mengeluarkan rekomendasi cantumkan, diminta kepada Bulog yang mendapatkan tugas untuk menyiapkan pendingin yang temperaturnya sekian. Bukan Bapak ikut campur, bukan Pak, nanti kalau misalnya dagingnya dimakan dalam keadaan bermasalah, peternakan yang disalahkan loh Pak, bukan perdagangan Pak.

Jadi waktu Bapak mengeluarkan rekomendasi paling tidak dicantumkan Pak. Mohon agar suhu yang terbaik sekian, saran kami kepada importir Bulog untuk memberikan alat bantuan. Alat itu tidak mahal, palong mahal 5 juta yang pendingin itu loh.

Paham Pak?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Sarankan itu lih Pak, bukan maksudnya Bapak jangan bilang itu terlalu jauh. Tidak, sarankan saja.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Nanti waktu pendalaman saya minta data yang tadi saya minta dilengkapi. Ada lagi?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Kami kira cukup Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Terima kasih.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ijin, terima kasih Pimpinan.

Ketua yang saya hormati, Wakil ketua yang saya hormati beserta anggota Komisi IV DPR RI,

Pak Dirjen, saya mau tanya saja. Karena tadi sudah disinggung oleh importir, standarisasi dan masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh ketua. Saya juga ingin meminta, daging-daging yang di impor dari luar itu, daging sapinya berapa? Daging kerbaunya berapa atau daging-daging lain yang di impor dari luar, kami juga minta data.

Sekalian juga, kan tadi sudah diminta oleh ketua, kami minta juga data untuk daging-daging yang dari hasil dalam negeri. Kebutuhan kita keseluruhannya berapa dan kita importir berapa banyak.

Terima kasih, itu saja ketua, Terima kasih.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, tambahan sedikit Pimpinan, sebelah kiri.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak Slamet. Saya kalau jalan sama Bapak aman, karena selalu slamet Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Dirjen, saya justru terkait dengan impor. Saya ingin mendapatkan data yang negara-negara mana yang bebas PMK. Justru ini yang paling membahayakan Pak.

Jadi ketika kemudian kita bicara kerbau, bicara India, mungkin nanti permintaan data tolong ditambahkan negara mana yang bebas PMK, negara mana yang tidak bebas PMK.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, tolong dicatat nanti Pak Ketut.

Lanjutkan Pak Sekjen. Yang ini yang terakhir ya?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S):

Baik, saya akan persilakan kepala badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia.

KETUA RAPAT:

Kepala badan penyuluhan setelah selesai presentasi kita isoma dulu. Takutnya nanti Bapak-bapak dan Ibu didepan ini belum makan jawabnya agak-agak miring karena kepalanya pusing.

Silakan.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, seluruh anggota Komisi IV DPR RI yang saya muliakan pula.

Mohon ijin pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana kerja dan anggaran ya, BPPSDMP ya, terus. Ya terus, jadi di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, itu ada kegiatan utama.

Yang pertama penyuluhan, kedua, Pendidikan dan ketiga pelatihan. Kemudian ditambah dengan reformasi birokrasi. Kemudian loncat di nomor 10 biar cepat ya. Ini adalah sasaran utama kita adalah balai utama pertanian atau yang biasa disingkat BPP.

Nah, posisi BPP ada di kecamatan. Nah ini adalah kondisi BPP kita. Dari 7.232 kecamatan itu ada 5.646 BPP. Nah sisanya sekitar 1586 itu belum ada BPP nya, karena memang tidak potensi untuk pertanian atau ada juga yang kecamatannya itu pemekaran, jadi yang di kecamatan yang baru belum ada BPP nya. Kemudian ini status, kondisi, seperti itu.

Kemudian ini dari 7.323 ini ada 83.880 desa atau kelurahan dan diantara lalu ada sekitar 15.192 pos ludes. Jadi ini kondisi sasaran kita ya. Kemudian menginjak ke halaman 27, silakan biar cepat. Ini adalah rincian kegiatan kita.

Pak ketua, Pak wakil ketua dan seluruh anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Jadi saat ini alokasi anggaran untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian itu ada kurang lebih 1.7 triliun ya. Antara lain. Pertama untuk kegiatan pemantapan system penyuluhan pertanian itu ada 630 miliar. Untuk system pelatihan pertanian ada 296 miliar. Untuk manajemen kurang lebih 92 miliar dan untuk Pendidikan pertanian ini ada paling besar ada 681 miliar ya.

Terus, nah ini adalah rincian alokasi anggaran kegiatan kita, dipenyuluhan itu ada kinerja penyuluh yang ditingkatkan itu honor dan BOP, kurang lebih 411 miliar. Jadi honor untuk THLTBPP dan BOP, jadi....

KETUA RAPAT:

Berapa nilainya BOP ditambahkannya?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

BOP nya ini masih yang lama Pak, masih antara 300 sampai 400 ribu per orang, jadi ini BOP yang lama belum ada penambahan.

KETUA RAPAT:

Itu yang 411, 4 ratus itu apa?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Itu honor THLBPP didalamnya ada BOP.

KETUA RAPAT:

Itu 411 termasuk penambahan BOP?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Termasuk BOP, betul.

KETUA RAPAT:

Jadi penambahannya satu orang 3 ratus sampai dengan 400 ribu?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Betul itu BOP nya. BOP itu Pak, bukan penambahan, itu BOP nya. Jadi

KETUA RAPAT:

BOP nya 300 sampai dengan 400 ribu?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Betul.

KETUA RAPAT:

Selama ini berapa?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Ya itu segitu, sesuai dengan SBU dari kementerian keuangan sampai saat ini masih.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Interupsi ketua. Ijin

KETUA RAPAT:

Sebentar saya dalam dulu ini. Jadi BOP 3 ratus sampai dengan 4 ratus ribu.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Jadi BOP 320 ribu sampai dengan 480 ribu pak ketua.

KETUA RAPAT:

Pada 2019 atau kapan?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Itu tahun lalu dan tahun ini sama.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi tetap 411 ribu eh 411 miliar?

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Betul. Kemudian ini untuk.

KETUA RAPAT:

Pemantapan system penyuluhan pertanian, apa itu?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Kelembagaan penyuluhan, oh yang judul besarnya. Iya jadi ada tiga kegiatan kita Pak ketua, pertama pemantapan system penyuluhan pertanian. Yaitu judul besar, nah didalamnya ini satu sampai Sembilan ini. Nah kemudian yang kedua ada pemanfaatan system pelatihan vokasi.pertanian, nah nanti berikutnya. Kemudian yang ketiga, ada kegiatan Pendidikan vokasi pertanian. Nah itu ada beberapa kegiatan juga.

KETUA RAPAT:

Baik, balik lagi dari awal pelan-pelan. Pemantapan system pelatihan pertanian, 296 miliar.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Betul.

KETUA RAPAT:

Apa ini?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Nah ini untuk pelatihan, kemudian ada juga untuk sertifikasi, kemudian juga ada apa namanya yang rutin gaji, tunjangan, operasional, pemeliharaan perkantoran, dan seterusnya.

Jadi dikegiatan ini, kami mempunyai 10 UPT Pak. UPT nya balai besar pelatihan pertanian, ada balai besar pelatihan perternakan. Itu ada beberapa lokasi wilayah Indonesia totalnya ada 10 Pak ketua. Nah didalamnya ada gaji, tunjangan, operasional perkantoran itu ya untuk 10 UPT yang melaksanakan kegiatan ini.

Ya terus untuk Pendidikan. Nah ini Pendidikan peranian, ini juga ada 10 UPT Pak ketua. Jadi Kementan memiliki 7 Politeknik pembangunan pertanian. Ini tersebar di beberapa provinsi. Kemudian ada 3 SMK Pertanian ya, jadi totalnya ada 10 UPT ini. Nah semuanya mengarah pada Pendidikan vokasi ya Pak ketua.

Kemudian didalamnya juga ada untuk Pendidikan kompetensi tenaga pendidik baik melalui Pendidikan formal, S2, S3 maupun jangka pendek. Kemudian juga ada kegiatan penumbuhan wirausahaan muda mendukung

petani milenial. Kemudian juga ada kegiatan yang besar lainnya adalah sarana prasarana Pendidikan, terutama ini untuk *teaching factory*.

Karena system Pendidikan kita vokasi Pak ketua, jadi 70% didalam kurikulumnya 70% Pendidikan kita adalah di lapangan atau di laboratorium. 30% itu dibangku kuliah. Jadi sebagian besar ada di luar kuliah ya, oleh karena itu kita akan perbesar *teaching factory* nya. Jadi alokasi anggarannya lumayan cukup besar untuk *teaching factory*, kurang lebih 179 miliar. Nah kemudian ini yang besar juga tentu untuk gaji, tunjangan, dan operasional pemeliharaan perkantoran untuk 10 UPT.

Kemudian untuk halaman berikutnya, ya terus, nah ini Pak....

KETUA RAPAT:

Saya sudah berbicara beberapa kali disini. Kenapa dirubah ini, kenapa tidak tetap BPP saja? Apa nanti mau dalam rapat kerja terjadi *date lock*?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Nah mungkin perlu saya informasikan Pak ketua, jadi Kosratani ini bukan nomenklatur baru, tapi ini adalah gerakan pembangunan pertanian ditingkat kecamatan, aktifitas jadi fungsional ini Pak.

KETUA RAPAT:

Saya tau pak, jadi BPP itu nanti sudah lah Pak, saya ini paham Pak, saya ini orang politik Pak. Jadi nanti Bapak debat disini nanti Bapak yang saya buat malu Pak. Itu saja yang saya ingatkan.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Iya?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Baik Pak.

KETUA RAPAT:

Coba kita lihat, peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, 1 triliun lebih. Ini kan tidak masuk akal. Coba teman-teman perhatikan. WP nya 125 miliar, dibagilah itu untuk bla, bla, bla, bla. Karena saya lihat kalau tidak

salah di Media Sosial itu BPP itu, BPP atau Kostratani, begitu kan? Ya tidak Pak Maman? Betul? Ya kenapa Kostatani. Dari jaman, jaman orde lama sudah bau namanya BPP kok. Yang saya inginkan satu hal, perbaiki dulu kantor-kantor yang rusak. Coba tayangi dari awal tadi, berapa kantor yang rusak?

Coba yang BPP? Yang BPP nomor 10 kalau tidak salah, nomor 10 ah ini. Jumlah kecamatan 7.232. Balai penyuluhan pertanian dari jaman dahulu namanya ini. Kemudian BPP dari 7 ribu yang ada 6.646. Ada yang milik sendiri ada yang sewa, ada yang rusak. Cuman itu tidak dicantumkan rusak berat. Silakan datang ke kecamatan Valas, atau kecamatan Seragih. Yang belum cuma rubuhnya doang, ya iya saya ngomong apa adanya, rusak ya rusak. Ada yang rusak sangat parah sekali, bahkan plafonya jatuh, lantainya sudah tidak jelas. Kenapa sih tidak diperbaiki dulu.

Begini loh Pak, saya ngomong secara gamblang. Kalau penyuluh itu tidak ada tempat kantornya, apa yang mau dilakukan? kenapasi, Ini kan kita jelas, milik sendiri ada yang sewa. Kenapa tidak anggaran itu dibelikan atau tinggal panggil Kabupaten, kabupaten kamu tinggal siapkan tanah, bangunannya saya yang buat. Ini lebih baik lah, kalau begini saya agak, saya agak stress juga saya, takutnya ini saya emosi lagi ini liatnya. Kenapa tidak tempatnya dulu diperbaiki, dalam setahun ini nih yang rusak diperbaiki, yang sewa minta tanah sama pemerintah daerah, minta tanah kami yang bangun, sudah gitu tahun depan mau apapun silakan. Kalau begini kan makin tidak jelas, cobalah.

Coba teman-teman yang didapilnya ada tidak balai penyuluhan pertaniannya yang rusak?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Konkritnya saja dulu Pak ketua, untuk apa kita bertengkar, bertengkar.

KETUA RAPAT:

Bukan bertengkar ini loh Pak. Kita ini sebagai wakil rakyat, sebagai mitranya kementrian pertanian. Kalau kantor balai penyuluhannya pertaniannya jelek, kami ini pulang ke dapil, tahu tidak dibilangnya apa?

“Anggota dewannya bego, masa kantor penyuluhannya rusak berat tidak bisa dipakai, listriknya tidak kebayar”, malulah saya ini Pak, gitu loh.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit ketua, maksud saya begini ketua. Kalau apapun yang kita bilang, kalau beliau, beliu ini tidak dengar kan sama saja ketua. Ini sudah jelas kalau saran kita, sebagai anggota dewan disenangi rakyat, yang baik untuk rakyat, kita memikirkan mitra kita kementrian ini. Ayo kita apakan Pak ketua, tidak usah dulu. Sebanyak begitu, supaya tidak ada dusta diantara kita dalam hal anggaran ini Pak ketua.

KETUA RAPAT:

Ya sudah lah.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, ketua, saya tambahkan sedikit Pak ketua.

Mengenai masalah kantor BPP Pak ketua, saya sebagai anggota Banggar ini bahwa beberapa tahun ini selama ini sebenarnya sudah ada anggaran melalui DAK. Perbaikan kantor BPP. Nah sekarang kita di Komisi IV ini butuh data berapa yang sudah Bapak perbaiki. Begitu loh maksudnya Pak Sudin.

Maksudnya Pak Sudin sudah berapa yang sudah Bapak perbaiki sehingga Bapak mau bikin ya Kostratani kan gitu. Wajar dong kalau Komisi IV ini bertanya sudah ada perbaikan berapa ini. Harus nya Bapak jelaskan berapa, berapa titik kan gitu, berapa dengan dana DAK, kan gitu. Harusnya gitu kan Pak ketua.

Terima kasih Pak, tambahan saja.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Mohon ijin Pak ketua, saya mungkin tambahkan.

Jadi tahun ini tahun 2020, kita akan merenov ya, dari ringan sampai berat, 1.200 BPP ya tahun ini. Kalau disetujui tahun ini? Oh sudah. Sedangkan tahun-tahun yang lalu, tahun sebelumnya itu baru ada 400 Pak ketua. Dari dana DAK kita. Jadi inshaa Allah pada tahun ini ada 1400, 1.600 mohon maaf.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan boleh tanya sedikit.

KETUA RAPAT:

Boleh Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Tahun 2020, seribu berapa Pak? 1.200?

KETUA RAPAT:

Tayangin yang tadi, tayangin yang tadi supaya jelas.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Itu yang rusak kan 1.300

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

47

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Itu apakah yang rusak kepemilikan sendiri atau plus dengan sewa? Jadi nanti perlu terkonfirmasi, karena kan kalau judulnya sewakan ngapain diperpanjang kan, tinggal pidah saja. Kan begitu? Jadi datanya 1.300, 1400 mau ada itu. Jadi perlu ada penjelasan.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Baik Pak nanti kita perdalam saja data itu.

KETUA RAPAT:

Jadi begini saja, nanti diperbaiki dulu, sekarang saya skors isoma nanti jam 14.00 kembali.

(RAPAT DISKORS)

KETUA RAPAT:

Bisa kita mulai, mohon maaf Bapak, Ibu terlambat tadi saya habis kedatangan menteri kelautan dan perikanan, konsultasi untuk rapat kerja yang akan datang.

(SKORS DICABUT PUKUL 14.50 WIB)

Bapak, Ibu yang saya hormati.

Disini tadi baru saya perkenalkan anggota baru, namanya Pak Fauzi Amro. Oh, Makom masih ada? Ya sudah. Kemudian, tadi saya pikir dia pulang kalau pulang saya ganti lagi ini. Ini dulu biar fokus.

Kemudian ada juga anggota baru, Beliau namanya H. Charles Meikayansah. Silakan Pak Charles memperkenalkan diri, dapil nya mana, kabupaten nya mana, supaya dapat bagiannya.

F-NASDEM (H. CHARLES MEIKAYANSAH):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan nama saya Charles Meikayansah, saya Dapil IV Jawa Timur, Pak, Jember dan Lumajang. Mulai hari ini Pak ketua, saya di Komisi IV, mohon bimbingan dan arahnya. Dari fraksi Nasdem Pak.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Charles, jangan hanya di BKO, kalau Bapak hanya di BKO nanti tidak akan dapat bagian aspirasinya.

Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak, Ibu anggota dewan Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya sesuai dengan ketentuan pasal 257 Peraturan Tata Tertib Dewan Republik Indonesia bahwa setiap anggota diberikan waktu untuk bicara atau mengajukan pertanyaan paling lama 3 menit. Saran saya disini tidak perlu lagi dipertanyakan untuk masalah aspirasi bansos yang akan dibawa. Karena ini sudah diterima oleh Bapak, Ibu semuanya. Mungkin nanti ini yang belum menerima Pak Firman Subagio, tolong dikasih Pak Firmannya.

yang pertama ini ahlinya Baleg, ahlinya tanda kutip ahlinya apa saya tidak jelas. Kadang kiri, kadang kanan. Silakan Pak Ibnu Multazam.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih

Yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan ketua Komisi IV DPR RI.

Ya kadang-kadang saya, ya tidak lah.

Bapak-bapak dan Ibu anggota, Pak Dirjen, beserta segenap Sekjan, serta segenap dari kementrian pertanian.

Saya akan konsentrasi dulu pada alokasi anggaran yang telah disampaikan kepada kami. Menurut kami relokasi anggaran yang telah direncanakan oleh beberapa Eselon I itu kurang fokus. Hanya kurang fokus itu, keinginan dari Komisi IV, realokasi ini ditujukan untuk memperbesar program, program kemasyarakatan. Menambah alsin, irigasi dan lain sebagainya. Karena kalau realokasi ini hanya ditujukan kepada pelatihan dan lain sebagainya, ya memang peningkatan SDM ada, tetapi hal itu kurang menunjukkan hadirnya negara ditengah-tengah petani.

Untuk itu dalam hal ini kami mohon untuk realokasi ulang untuk difokuskan kepada kegiatan kemasyarakatan agar negara ini lebih hadir di masyarakat.

Yang kedua, tentang masalah pupuk. Pupuk ini alokasi nasionalnya kurang, sekitar 7.900.000 ton. Kita mengusulkan kepada Pimpinan dan kepada kementerian pertanian. Sebenarnya HET pupuk organic itu lebih bagus dinaikkan sedikit. Lebih bagus dinaikkan sedikit, misalnya urea dari 95 ribu katakanlah menjadi 105 ribu atau 110 ribu. Petani tidak keberatan itu. Asal alokasi nasionalnya tambah.

Jadi usul saya konkrit itu untuk mengusulkan kepada kementerian keuangan baik dari kementerian pertanian ini, bagaimana HET pupuk organic, eh HET pupuk itu subsidi itu dinaikkan saja.

Yang kedua, yang alokasi per provinsi, untuk 2020 diawal tahun. Itu saya kira perlu realokasi ulang. Contoh Jawa Timur ini kan lumbung pangan. Masak alokasinya ini turun 50%. Ini kan tidak masuk akal. Alasannya apa? Karena turunnya alokasi nasional ini kan 15% dari 9.600.000 ton menjadi 7.900.000 ton. Itu kira-kira 15%. Itu kalau di-*break down* rata-rata per provinsi, itu tidak 50% Jawa Timur itu pengurangannya. Ya kira-kira pengurangannya 15% setara dengan pengurangan alokasi pupuk nasional. Jadi mohon itu diperhatikan betul karena masyarakat Jawa Timur ini sudah gerah.

KETUA RAPAT:

Bukan, bukan yang ini. Pupuk subsidi alokasi pupuk subsidi yang saya minta tadi. Supaya Pak Ibnu Multazam dapat melihat dengan jelas. Apa mau Bapak saya ikutin Pak.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Siap

KETUA RAPAT:

Di-*break down* dulu per provinsi.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Jawa Timur.

KETUA RAPAT:

Ya sabar dong tenang. Lanjutkan dulu silakan Pak Multazam lanjutkan sambil tunggu.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ya yang ketiga, laborganik. Laborganik ini kan hanya satu lab balai tanah. Pak Sekjen, Pak Mumun. Kan itu kan lama untuk apa namanya, mendapatkan hasil lab nya.

Untuk itu saya minta ini diapa namanya ini. Dialokasi kembali, ditinjau kembali bagaimana supaya lab pupuk organik itu seperti dikembalikan seperti yang dulu.

Yang ketiga, yang keempat masalah data. Tadi Pak Sudin sudah mengingatkan. Ini saya gumon juga. Ini saya membuat data 54 anggota Komisi IV anggota dan Pimpinan ini saja kok, bolak balik keliru. Nah ini yang keliru Sekretariat memberikan data ke kementerian apa kementerian yang mem-*break down* nya itu kurang fokus kurang Aqua.

KETUA RAPAT:

Atau ketua Komisi yang salah gitu?

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ya kalau gitu kan ketua selalu benar, kalau ketua salah lihat pasal 1. Saya kira terima kasih Pak Momon, Pak Sekjen. Itu yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya mau ditayangkan tidak, saya kira tidak perlu. Jadi nanti minta tolong nanti ditayangkan alokasinya, supaya nanti anggotanya kembali ke dapil kalau ada pertanyaan bisa dijawab.

Selanjutnya Mbah Mutawam ada, tidak ada? Oh, iya *weis*, silakan Mbah.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati ketua dan Pimpinan Komisi IV, Anggota Komisi IV dan para Dirjen di Kementerian, Pak Sekjen.

Langsung saja sebenarnya hampir sampai dengan yang disampaikan oleh Pak Ibnu. Yaitu ada pembenahan-pembenahan kaitannya dengan, dengan data atau nama-nama Pak. Ya seperti saya dapil VIII ini Jatim menjadi NTT, ini kan kacau nanti.

Kemudian harapan saya, kita diberi kewenangan atau diberi waktu untuk menentukan CPR. Karena sementara ini CPR saya ini mohon maaf saya ini orang Madiun. Tapi lebih banyak saya ditempatnya Mba Ema, di Jombang.

KETUA RAPAT:

Mbah Muhtarom.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Nuwun sewu jadi saya potong. Jadi tadi sudah disampaikan ke kami ke Pimpinan, nanti begitu pulang, kan reses ini akhir bulan, awal bulan keliling, keliling untuk serap aspirasi masyarakat, sambil menyiapkan proposal. Kalau proposalnya belum selesai nanti ditulis dulu, direkap kirimkan. Proposalnya menyusul. Selambat, lambatnya tanggal 30 Maret.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Siap, siap ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi mengusulkan dulu biar nanti beliau, beliau ini kan bisa mengecek. Benar tidak kelompok taninya, sambil menunggu proposalnya. Masalah ada kesalahan dapil, ada kesalahan nama, besok begitu rapat sudah *clean and clear* anggota mendapatkan bahannya.

Ya Mbah. Ya *monggo* lanjutkan kalau masih ada.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Sudah cukup ketua. Jadi tadi dengan ketua sudah ada penjelasannya, jadi saya jadi ngerti.

KETUA RAPAT:

Harusnya nanti akhir ini, saya menjelaskannya. Selanjutnya Ibu Endang silakan Ibu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Baik, terima kasih Pak ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Para Dirjen yang saya hormati dan saya banggakan, juga teman-teman anggota Dewan.

Ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan, tadi sesuai dengan anjuran Pak ketua sebetulnya bahwa yang jelas sebenarnya tidak ada *grand*

strategy Pak yang berkelanjutan. Yang jelas setiap ganti Pimpinan, ganti prioritas. Nah ini yang agak meresahkan sebagai alumni dari kementerian pertanian.

Nah yang kedua, selain *grand strategy* ada ego sektoral disetiap Eselon I. Diantaranya di direktorat Jenderal perternakan Pak. Kebetulan saya sering melihat ke balai penelitian perternakan. Banyak sekali sebetulnya pan stock kita yang sudah dihasilkan tapi tidak dimanfaatkan oleh direktorat jenderal perternakan.

Yang ketiga adalah dari badan ketahanan pangan. Kalau menurut saya tidak lazim Pak kalau berbasis kecamatan. Yang lazim itu agro *ecological zone*. Jadi berbasis potensi lokal. Jadi kalau berbasis kecamatan itu agak rancu Pak.

Nah yang berikutnya saya pernah beraudensi berdiskusi Panjang lebar dengan badan litbang pertanian. Nah ternyata di badan litbang pertanian itu banyak sekali teknologi, teknologi yang sudah dihasilkan tapi tidak dimanfaatkan oleh direktorat jenderal. Nah ini sangat meresahkan kami sebetulnya.

Nah berikutnya juga selain inovasi teknologi. Juga balai biogen pak yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga banyak sekali *parent stock* varitas-varitas unggulan kita, yang tidak disosialisasikan ke masyarakat dengan baik, karena ada protokoler dari Pak Sekjen yang belum diatur dengan baik.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Kanjeng Dirjen *monggo* silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak ketua, teman-teman sekalian, Pak Dirjen, Pak Sekjen.

Kami tidak bicara masalah alokasi anggaran tapi ini mungkin akan terkait. Bicara katakan masukan juga jawaban.

Yang pertama kepada Pak Sekjen, saya ingin bertanya sesuai dengan arahan Presiden, kelembagaan dari kementerian kehutanan dengan menghapuskan Eselon III dan Eselon IV apakah tahun ini dilakukan atau yang akan datang. Karena ini akan berdampak dengan pelaksanaan tugas-tugas dilapangan. Yang satu.

Yang kedua, kemarin Pak ketua membuka satu Permen yang kami tahunya kemarin. Jadi saran saya Pak Sekjen kedepan tolong setiap ada PP, Permen dan SK Dirjen dikirim ke Komisi. Komisi akan membagikan kepada kita sehingga bisa dipelajari, tidak dapat dari daerah gitu. Saya kira ini usul saya Pak ketua. Jadi Permen, PP, SK Dirjen itu bisa kita dapatkan sehingga kalau ada kesalahan bias kita cepat mengkoreksinya untuk kebaikan. Begitu.

Selanjutnya yang Pak Dirjen peternakan, baru, baru ini ada demo di DPR RI ini dari peternak ayam. Dia tidak bersaing dengan pedagang ayam potong dengan pengusaha besar. Setelah saya pelajari, jadi ada tiga hal yang disediakan oleh pengusaha besar.

Pertama bibit anakan ayam, yang kedua pakan ayam, yang ketiga obat-obatan. Ini langkah apa biar petani kecil ini bisa hidup. Karena sengaja ini akan dimatikan, setelah dimatikan ini akan dinaikkan harganya. Pengusaha ayam ini bisa jalan karena dia menaikkan harga-harga dari pakan dengan obat-obatan dan anakan ayam. Apakah pakannya diserahkan ke Bulog misalnya, obat,obatan diserahkan kepada staf Bapak yang ada di daerah misalnya. Karena ini harganya tekan betul harganya.

Jadi disana itu subsidi silang oleh para pengusaha ayamnya dibikin murah tapi obat-obatannya dibikin mahal. Terus yang kedua dari total wartawan tadi di luar. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Komisi IV dengan adanya hama babi di Medan. Bahkan ada intruksi ini akan ada dimusnahkan babi di Sumatera Utara. Ini sangat mengkhawatirkan karena 1/3 babi di Sumatera Utara itu, itu masyarakat makan babi. Ini tolong ya virus babi ini apakah betul akan dimusnahkan atau ada obatnya.

Karena tadi Ibu Endang bilang, di kementerian pertanian itu ada 305 puktur Pak. Nah sampai dimana penelitian ini, penelitian ini dengan Litbang kita akan bicara ini.

Terus untuk Horti, ini Pak sekarang kita kan panen kol, tapi Eropa kan musim dingin. Jadi kol tidak laku.

KETUA RAPAT:

Panen apa Pak?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Cubis, kol.

KETUA RAPAT:

Jangan *cool*, kalau *cool* itu dingin.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Kol itu Bahasa Banyumas Pak, jadi biar jelas itu ya. Sayurlah ya. Jadi saran saya Pak, alangkah baiknya tidak mungkin kementerian itu kita buat *cool storage* itu. Seperti di Jepang itu besarnya 10 kali lipat ruangan ini Pak. Ya bukan seperti *countainer* ini bukan itu ya. Anggarkan saja ini Pak. Misalkan di tanah Karo, di Dieng.

Yang ketiga ini Pak, ini soal kentang. Ini kentang lagi mulai panen, jangan seperti kemarin kami demo 3 ribu orang ke Pak pertanian. Mohon maaf itu kalau Dirjen tidak keluar mobilnya akan kami gembosin ya. Kemarin kan 3 ribu kami bawa. Kami panen datang dari China sama Pakistan. Ini tolong jangan Sampai terjadi lagi lah. Nah ini dapil saya ini, jadi saya yang harus memimpin demo itu. Mohon maaf ini kejadiannya.

Satu lagi kenapa setiap tahun baru lebaran itu harga cabe naik? Itu bukan karena langka Pak. Ini permainan tengkulak. Ini kita buktikan ini harga cabe pada saat itu 20 ribu, di Tangerang distop dikeringkan. Dijual ke Indofood atau tempat itu, 10 ribu. Begitu 20 ribu itu langsung naik jadi 40 ribu. Biar rugi 10, untung 10 ribu. Itu tiap tahu. Maka satgas ini perlu Pak. Harga cabai petani ini tetap tidak akan naik. Tapi permainan tengkulak inilah. Rahasiannya disitu, dan tengkulak ini main dengan aparat. Saya pernah tahu masalah ini seperti ini.

Jadi saya minta dan juga mengenai bawang putih Pak. Saya minta aturan yang Bapak buat dirubah lah. Ada dana jaminan bawang putih. Importir yang akan mendapatkan jatah harus stor uang untuk jaminan menanam bawang putih. Berapa yang berhasil uang yang dia kembalikan. Kalau tidak berhasil uang itu tidak digunakan untuk menanam dengan pemerintah atau yang ditugasi. Ini seperti dana reboisasi lah pada waktu itu. Tapi sayang dana reboisasi dipakai bukan untuk menanam pohon untuk Sea Game dan macam-macam, jadi hutannya gundul ya.

Selanjutnya saya kira.

KETUA RAPAT:

Cukup ya?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Cukup.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau demo mendemo tadi itulah politik balas dendam ya? Dulu beliau jadi Dirjen didemo sekarang jadi anggota DPR RI ikut mendemo. Kalau saya untuk masalah tadi itu agak kurang setuju, masalah kewajiban importir menaruh uang. Kenapa tidak disusun dulu skemanya yang baik. Apakah importir 1 kg membantu bibit langsung ke kementerian kementerian

menyalurkan atau gimana, dikaji ulang sebaik mungkin. Karena kalau itu nanti ujung-ujungnya kaya BPD PKS, betul enggak?

Pak Ketut, hal yang amat penting dari Pak Dirjen tadi mengatakan tolong dijawab dulu mengenai virus BABI, virus Afrika itu, ini sangat penting sekali karena kemarin beliau juga pulang kampung ke Medan ke posko 2 itu didemo juga, silahkan Pak.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Baik mohon ijin Pak Ketua, Bapak-bapak beserta Ibu-ibu anggota DPR beserta seruluh eselon 1, mohon ijin kami menjawab terkait dengan Virus ASF ini yaitu virus yang telah kita prediksi penyebarannya sampai di Indonesia karena apa, karena lalu lintas orang Indonesia yang *direct* itu banyak yang terutama dari China ke Denpasar serta China ke Sulawesi Utara Manado itu *direct*, dari Sumatera Utara kenapa disitu meletus, jadi sebenarnya lalu lintas orang dari laut dari Medan ke Vietnam, sebenarnya juga datanya ada. Nah itu, virus ini....

KETUA RAPAT:

Ulangin tadi apa Pak, saya agak kurang jelas ulangin yang tadi

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Baik kami ulangi, kami sebenarnya dari awal kami sudah mengetahui/memprediksi itu Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan mengetahui ... kalau memprediksi iya, *sorry*, anda salah.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Memprediksi bahwa virus ini akan menyebar ke Indonesia, sehingga kami melakukan langkah langkah *preemptif*.

KETUA RAPAT:

Terus?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

sehingga kami melakukan langkah langkah *preemptive*, karena *preemptive* itu adalah sosialisasi terhadap seluruh dinas yang paling berpotensi untuk terlular virus, nah ini terutama penerbangan-penerbangan yang *direct*

dari China ke Indonesia terutama Denpasar dan Manado, setelah kami ke Medan , terjadinya kasus pertama kali disana, kami dapat informasi bahwa peternak dari Medan ke Vietnam itu sering lalu lalang begitu pak, baik lewat darat ...

KETUA RAPAT:

Dari Medan ke Vietnam atau dari Vietnam ke Medan karena yang saya tahu Vietnam sudah menyetop pelihara babi karena akibat virus.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Jadi orang medan ke vietnam terus balik ke Indonesia lagi.

KETUA RAPAT:

Menjual?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Entah dia menjual, entah dia membeli barang apa, karena dia baliknya itu membawa virus karena disitu daerah endemis.

KETUA RAPAT:

Kira-kira pembawanya apa dari dia pembawa babi dari indonesia ke vietnam, dari vietnam bawa monyet ke indonesia maka terjadi penularan atau bagaimana saya masih enggak paham ini Pak.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Informasinya yang kami dapat bahwa pedagang babi kita sebenarnya itu memasukkan kesitu nah dengan begitu dia melihat peternakan-peternakan babi juga disitu di Vietnam.

KETUA RAPAT:

Pembawa virusnya siapa?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Yang membawa virusnya, ya Orangnya.

KETUA RAPAT:

Orangnya?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Bisa?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Bisa, virus itu tidak menular kepada manusia tapi pembawa bisa, sebagai agen pembawa termasuk (*scuifiding*) artinya sisa-sisa makanan yang berasal dari terkontaminasinya dari pesawat dari daerah yang *outbreaks*

KETUA RAPAT:

Pak, kalau kita ngomong jadi gini loh, seberapa banyak sih sisa makanan dipesawat sampai datang ke medan, dan seberapa banyak peternakan babi di medan itu dihitung loh pak, jadi bapak jangan asal jawab saja ini.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Kami sudah hitung di Medan sekitar 2 juta ekor.

KETUA RAPAT:

Sisa makanannya berapa?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Contoh misalnya seperti bali ya.

KETUA RAPAT:

Bapak ... saya lagi ngomong yang Medan bukannya yang Bali Pak. Tadi kan kita bicara Medan, Sumut, jangan lari dulu ke Bali Pak, kalau bicara bali memang pesawat asing jauh lebih banyak dibandingkan yang masuk ke Sumut, yang saya tanyakan tadi masalah Sumut, Sumatera Utara yang populasi babinya ada 2 juta, seberapa banyak sisa makanan yang dibagikan/dibawa ke peternak karena gini, ini sudah termasuk bencana sudah termasuk wabah loh Pak, Ingat saya sama Bapak dulu kesana sampai sekarang solusinya tidak ada, solusinya kaya apa sekarang? Kita kongkritnya saja, kongkritnya apa? Solusinya apa?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Baik Pak Ketua

KETUA RAPAT:

Dan tolong diingatkan waktu itu apa keputusan bersama saya, Pak Ketut sama Gubernur Sumut, tolong yang jelas.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Baik, terkait dengan keputusan sebenarnya setelah anggota DPR pulang, kami dipanggil pribadi oleh pak gubernur, pak gubernur menyampaikan bahwa permasalahan ini sangat *complicated* karena penduduk disana hampir 3 juta orang makan babi, nah untuk itu beliau meminta agar jangan clear dulu karena terkait dengan natal dan tahun baru sehingga dengan demikian sosialisasi terus *public governer*, itu sudah kami lakukan terkait dengan membuat posko-posko yang diseluruh kabupaten tertular. Nah, dari situ kami menunggu *sent* dari pak gubernur sebenarnya, *sent* itu maksudnya setelah gubernur memberikan/mempersilahkan gitu dengan demikian terjadi komunikasi yang bagus, setelah beliau memberi *sent* dari sumatera akan ditindak lanjuti siapa melakukan apa.

Nah, waktu itu untuk daerah *outbreak* kami menunjuk kabupaten-kabupaten *outbreak* terus jangan sampai terjadi lalu lintas yang keluar pulau atau lalu lintas dari daerah *outbreak* ke kabupaten yang tidak terjadi *outbreak*. Nah, untuk itulah posko-posko itu yang mengawasi namun demikian virus ini tidak ada vaksin dan tidak ada obat yang paling utama adalah *biosecurity* dan *bioseptic*. nah itu sudah kamu lakukan, tetapi pada intinya sifat virus ini kalau sudah terjadi gejala klinis dapat dipastikan babi itu mati karena tidak ada obat dan tidak ada vaksin, sudah Pak

KETUA RAPAT:

Yang saya tanyakan tadi itu Bapak simak, coba Bapak simak pertanyaan saya. Apa keputusan rapat hari itu? Jawab dulu ... kan ada keputusannya kan!! Ada saya, siapa lagi anggota waktu itu yang ikut ke sumut. Pak Edward, Apa keputusannya Pak?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Mohon ijin Pak Ketua, seingat saya waktu itu yang pertama segera di *clear*, yang kedua terkait dengan pelarangan dari daerah *outbreak* ke daerah yang belum *outbreak* terus melakukan pengawasan dan bantuan ke daerah sana.

KETUA RAPAT:

Sekarang bapak tau enggak, ini bapak katanya tidak boleh ada lalu lintas antar kabupaten. Saya tanyakan di depan publik. Ada apa enggak karantina antar provinsi? Enggak ada apalagi yang antar kabupaten. Betul enggak Pak? Betul apa enggak yang saya omongkan begitu? Dari sumut misalnya mau ke aceh, enggak ada pos penjagaannya, terkecuali antar pulau contohnya di pelabuhan bakahone Lampung jadi babi yang sudah terkena virus dibawa ke Jambi, siapa yang mau ngawasin? Dari Jambi dibawa ke lampung, dianggapnya babi dibawa ke Lampung terus ke Jakarta. Jadi ini tugasnya Pak Ketut jangan ada masalah terkait ini dan jangan sampai ada yang dirugikan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Mohon ijin Pak Ketua, jadi 2 hari ini di medan dan sekitarnya sudah demo karena ada instruksi semua babi dimusnahkan apa itu jalan keluarnya seperti itu, kalau semacam itu harusnya ada penyuluhan kepada masyarakat atau peternak babi, terima kasih Pak Ketua

KETUA RAPAT:

Saya bilang apakah mungkin dimusnahkan, kalau dimusnahkan bagaimana ganti ruginya!! Betul Pak Ketut? Iya kan, tapi Pak Ketut malah lebih mendengar omongan Gubernur Sumatera Utara dari pada omongan pimpinan komisi IV DPR RI, itu aja jadi ga perlu dijawablah.

Selanjutnya Pak Johan Rosihan, silakan Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama penelitian hortikultura, lanjut ke pembahasan kemarin Pak, dari rekap RIPH itu 10 dari 13 pemegang, RIPH itu kan bawang putih di china asal negara china, nah kita tahu kondisi china saat ini dengan virus *corona* ini, kalau persoalan ini tidak selesai saya takut ada kegagalan impor. Sementara Bapak cerita kemarin bahwa stok bawang putih kita itu hanya bisa sampai maret sebentar lagi masuk bulan puasa setelah itu lebaran, nah apa sihantisipasi dari kementerian terhadap kemungkinan gagal impor ini, saya tidak melihat adanya anggaran darurat misalnya karena ini dapat membuat inflasi kita sangat tinggi karena saya hitung-hitung tadi itu kira-kira sekitar 102.149 ton yang akan kita impor ini dari 10 pengusaha itu, nah kalau misalnya rata-rata 1 hektar kita itu 8 ton maka dibutuhkan 12.369 hektar untuk mengantisipasi kalau akan meningkatkan produksi dalam negeri kita. Nah, saya minta tanggapan dari Pak Dirjen?

Yang kedua tentang badan ketahanan pangan, tanaman pekarangan, saya walaupun kecil saya punya demplot pekarangan berbasis keluarga dan *alhamdulillah* setiap ada hari lingkungan hidup, setiap ada acara badan

ketahanan pangan kota mataram itu ngambil tanamannya ditempat saya, minjam/sewa Pak Ketua, terima kasih bisa dipertegas, nah karenanya ini tolong dipikirkan lagi pak, tentang tanaman pekarangan berbasis keluarga ini modelnya kaya apa? Nanti Misalnya cabe segala macam ini ramai ditempat saya ini Pak, nyewa untuk ada acara segala macam di tempat saya, yang berikutnya soal konstra tani ini, soal konsentrasi anggarannya itu ada di kesekjenan, ternyata anggaran konstratani ini ada disemua dirjen sampai-sampai PKH saja untuk menyebut sapi dan kerbau pakai si komandan, dicari-cari kemudian kepanjangannya itu biar keren, biar mirip-mirip tentara gitu, karena sudah makai komande, brigade. nah yang saya khawatirkan kemarin bahwa konstra tani ini akan menambah belanja pegawai itu satu, yang kedua apa yang bisa kita ceritakan kepada para penyuluh, apa kira-kira perubahan kesejahteraan mereka dengan strategi konstra tani ini? Kalau bapak tidak mau menyebut program saya sebut ini adalah strategi pencapaian program dari kementerian, karena ujung tombaknya adalah penyuluh, nah apakah kita akan merekrut kembali tenaga-tenaga baru dalam strategi konstra tani ini? Kalau kemudian ini kita merekrut tenaga-tenaga baru bagaimana kemudian nasib tenaga-tenaga yang selama ini sudah ada dibidang pertanian ada penyelian mitra tani, ada tenaga harian lepas, ada inisiator di dirjen PKH, ada sarjana membangun desa, wirausahawan pendamping di PKH juga, nah bagaimana nasib mereka, sementara untuk kontraknya saja itu, nanti saya sampaikan suratnya tiap minggu mereka datang ke ruangan saya, untuk menyampaikan aspirasinya, tolong diperjelas kalau misalnya dengan strategi konstra tani ini jelas Pak, mungkin kita bisa berfikir ulang tentang permasalahan konstra tani ini, tapi untuk masalah konstra tani ini kemudian komandan-komandan saja yang sejahtera tapi pasukan-pasukan dibawah itu bisa kita atur, nah saya khawatir dengan istilah strategi komando itu, komandonya saja yang sejahtera, pasukannya ya taulah hanya tinggal dibarak saja.

Yang berikutnya istilah petani milenial, apalagi ini Pak? Apa pengaruhnya gitu? Emang kita punya bertambah lahan bertampah apa gitu dengan adanya petani milenial kira-kira target produksi kita meningkat berapa? Coba digambarkan kepada kami apasih petani milenial itu ? karena apa sih target/pencapaian segala macam, ya susah kalau misalkan dengan kondisi harga-harga produk pertanian kita nilainya, nilai NTP (nilai tukar petani) itu masih rendah, bagaimana petani milenial itu mau bertani, nah kemudian tinggal membuat judul-judul kampanye hanya sekedar mengumpulkan mereka disekolah hanya mengumpulkan mereka untuk apa kalau sekedar kampanye-kampanye.

Terus berikutnya kepada Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan, saya sudah diajak beberapa kali kunjungan bagaimana model peternakan di aceh, sudah melihat peternakan dimana, saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa dari berbagai daerah itu peternakan yang berbasis masyarakat mungkin yang paling hebat itu adalah NTB, kemarin ketika saya di Aceh saya melihat bahwa disitu adalah proyeknya pemerintah, sapinya pemerintah, saya tidak melihat peternaknya yang punya itu. Di sumbawa itu tidak ada sapi pemerintah karenanya dari buku yang banyak ini saya sangat melihat kurangnya perhatian dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan itu

terhadap bantuan infrastruktur peternakan di Sumbawa, seperti pembangunan rumah potong. Saya ini salah satu *volunteer* di bidang peternakan ini, setiap tahun itu pernah dengan program lembaga zakat, setiap tahun itu kita menyembelih hewan qurban itu 1000 tiap tahunnya, itu dari 1 lembaga zakat, dengan program kornet, kita bisa kornetnya di Jawa, untuk membawa ke Jawa kita perlu *cool storage* saja mobil yang ada *cool storage* kita sewanya di Bali, jadi begitu minimnya sarana/prasarana/dukungan infrastruktur peternakan, padahal peternaknya berbasis masyarakat, 2 potong kita tidak punya, kandang kolektif kita tidak punya, maksud saya itu masyarakatnya sudah beternak ya tolong difasilitasi, nah ini mohon perhatiannya Pak Dirjen Peternakan karena ketika defisit stok daging nasional waktu itu, saya langsung sambut, sebelum saya membuat pernyataan saya koordinasi dulu dengan semua kepala dinas peternakan NTB, NTB siap menjadi pemasok daging nasional makanya kita harus bantu itu.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Johan, Pak Sekjen dan Pak Kepala Badan PPSDM.

Melanjutkan tadi yang dikemukakan oleh Pak Johan mengenai petani milenial, ini juga saya menambahkan tadi Pak Ketua meminta evaluasi, sebelumnya saya pernah dengar ditahun sebelumnya tentang petani milenial ini evaluasi program ini seperti apa tahun 2019 dan saya ingin nanti kita bedah benar-benar anggaran yang dimaksud Badan Bapak, pemantapan sistem penyuluhan, ada pemantapan sistem pelatihan, ada pendidikan pertanian dan ada tim pos-pos untuk petani milenial ini beberapa bertubi-tubi dan kita ini kejelasannya ini apa? Kita lihat ini ada penumbuhan P4S mendukung petani milenial dan *explore*, ada lagi dipendidikan pertanian pendampingan/penumbuhan wirausaha muda mendukung petani milenial, kita ingin kejelasan ini itu apa yang diharapkan posting-posting anggarannya? Begitu juga konstra tadi itu banyak sekali anggaran-anggaran yang sudah disebar luaskan tapi kok rasa-rasanya kok ga jelas jujur saja, kalau benar nanti yang seperti Pak Johan minta dibedah bersama satu-persatu ini apa? Ini petani milenial ini opo maneh? Kita ingin anak-anak muda kita mau masuk berwirausaha dibidang pertanian, tapi seperti Pak Johan tadi sampai detik ini para petani ya seperti itu, apa nilai tambahnya bagi anak-anak muda yang mau Bapak gerakkan melalui program petani milenial ini.

Terima kasih pak, selanjutnya Pak Firman Soebagyo silahkan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, Terima kasih Pak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Pak Sekjen beserja jajarannya, para eselon I, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.

Pertama pimpinan hari ini saya rasa kita fokus membahas 2 materi, yang pertama adalah membicarakan tentang relokasi anggaran dan yang kedua adalah membicarakan tentang relokasi program oleh karena itu saya akan fokus pada masalah pokok ini tentang relokasi anggaran tentunya kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, karena ini untuk merelokasi sudah disepakati antara pimpinan dengan eselon I dan kementerian kemarin dan tentunya relokasi anggaran ini bukannya tidak ada alasan tentunya tidak ada alasan teknis dan administratif kenapa ini harus seperti itu, oleh karena itu tentang relokasi ini mungkin supaya rapatnya lebih efektif dan efisien, kita cermati pos-pos mana yang direlokasi yang kita tidak sependapat kemudian kita geser supaya ini fokus, jadi kita tidak seperti rapat fungsi pengawasan dan ada hasil yang konkrit yang bisa kita selesaikan, bapak-bapak ini kan juga harus bekerja ke kantor masing-masing. Kemudian mengenai program pak, mohon dari peternakan masih ada koreksi karena ada nama saya yang belum masuk di Badan Tanaman Pangan dan Dirjen Tanaman Pangan jadi saya akan sampaikan secara tertulis saja, yang saya prihatin itu adalah kondisi lapangan program bantuan sosial yang begitu besarnya dari mulai tahun ke tahun itu saya nyari bahwa aset dari negara yang dikucurkan pada masyarakat ini tujuannya kan agar berdaya guna dan meningkatkan program pembangunan cipta pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi faktanya dilapangan ini ada beberapa yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna karena ada beberapa wilayah yang diberikan contohnya traktor yang harusnya roda 4 dikasihnya roda 2, yang harusnya roda 2 jadi roda 4, ini mungkin perlu evaluasi jadi program itu menyesuaikan dari pada program daerah itu yang kesatu.

Yang kedua, program-program yang sedemikian banyaknya itu saya lihat ditingkat desa, aset ini menjadi tak bertuan/ yang saya sampaikan tadi asset itu tidak tepat sasaran akhirnya menjadi 'nongkrong' tidak bisa dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan kondisi wilayah/lahan di daerahnya masing-masing, Nah oleh karena itu Pak Sekjen mungkin pedum pedum dari program ini perlu disempurnakan bahwa semua program bantuan sosial dalam bentuk asintan ini, kelompok tani itu adalah sarana penerima bukan untuk dimiliki kelompok itu tetapi azas manfaatnya untuk kepentingan desa kepentingan masyarakat secara luas, yang terjadi sekarang ini begitu kelompok tani sudah menerima dimanfaatkan oleh kelompoknya, setelah kelompoknya sudah selesai itu digunakan oleh kelompok lain tetangga desanya pinjam tidak boleh ini menjadi persoalan, bahkan banyak yang perjual belikan ini fakta dilapangan. Oleh karena itu kita harus fokus kepada program bantuan sosial ini, perlu diatur ulang/direformulasi bahwa semua program bantuan sosial ini harus tegas kepada kelompok tani itu sebagai sarana penerima, tapi setelah sampai desa Kepala Desa harus bertanggung jawab, bertanggung jawab untuk mengontrol, mengawasi kemana larinya alat-alat yang kita berikan ini supaya optimal untuk kepentingan desa bukan untuk

disewakan ke daerah lain, ini yang terjadi seperti itu dari Kabupaten A ke Kabupaten B loncat ke Kabupaten C karena sewanya terlalu mahal ya akhirnya ini menjadi persoalan tersendiri.

Kemudian terkait dengan masalah normalisasi irigasi saya rasa juga ini perlu dipikirkan, saya juga tadi berbicara dengan Bapak-bapak dikomisi IV yang semua mantan bupati rasa-rasanya setuju bahwa harus berani melakukan perubahan metode terhadap pembangunan irigasi di lapangan. Masyarakat itu sebetulnya lebih senang apabila diberi kewenangan swadaya/swakelola, saya pernah dibantu oleh kementerian pertanian yaitu 3 eskavator waktu itu, itu kita bentuk upja ditingkat kecamatan dan eskavator itu digunakan satu kecamatan untuk perbaikan irigasi di kecamatan itu dan juga dipake bergiliran dari desa satu ke desa yang lain terus tidak ada henti hentinya kemudian tanggung jawab maintenance dan manajemen untuk sewa menyewa diserahkan kepada mekanisme desa dan itu sangat menarik serta sangat optimal ketika irigasinya sudah diperbaiki eskavator digunakan untuk jalan usaha tani ketika jalan usaha tani sudah bagus ada banjir dimanfaatkan untuk membantu mengatasi got-got yang tersumbat, nah mungkin ini bisa segera dilakukan dan saya sendiri sudah melakukan di kabupaten pati itu cukup bagus dan cukup efektif.

Nah, kemudian mengenai masalah kontra tani ini saya mau menegaskan bahwa kontra tani ini sebenarnya sudah banyak punya ppl nasib ppl hari ini saja itu masih belum jelas tentang status kedudukannya, ada yang saya perjuangkan dengan Pak Momon waktu itu sudah lolos 9.000, karena mereka itu adalah ppl yang sudah mempunyai pengalaman cukup lama, mereka itu terbentur dengan adanya peraturan. Nah, peraturan ini kecenderungannya bertentangan dengan Undang Undang PP yang menganulir tentang masalah masa atau usia, sebetulnya di Undang Undang yang ada di ASN itu tidak mengatur batas usia tapi PP nya yang mengatur batas usia yang sudah puluhan tahun bekerja, saya rasa ini harus lebih fokus kesana agar segera diselesaikan, supaya kontra tani itu bisa dioptimalkan saja dan supaya ppl itu bisa diatur dalam undang undang, ppl itu harus terpenuhi 1 desa itu harus ada 1, kalau ini bisa dioptimalkan dari pada bikin bagan organisasi baru dengan istilah baru dan ada tadi namanya petani milenial ini kan kesanya ikut-ikutan trend, padahal bikin saja sederhana pemuda tani itu akan lebih mudah di mengerti jadi kalau petani milenial yang tahu hanya orang-orang jakarta saja di daerah itu banyak yang tidak tahu.

Yang paling akhir, mungkin saya mengkritisi masalah pupuk organik, pupuk organik ini sejak dulu bahkan saat saya di Komisi IV DPR RI yang lalu telah memutar video banyak disalah gunakan dan pupuk cari organik jadi terus terang pak jadi hukumnya terbalik ini, harusnya yang besar memberikan subsidi kepada masyarakat ini malah kebalik yang kecil/miskin mensubsidi yang kaya, siapa yang kaya? Ya pabrik, PUSRI, Petroganik. Karena apa, ada pemaksaan kehendak setiap akan menebus pupuk subsidi lainnya itu harus ada kewajiban untuk menebus pupuk cair baik pupuk organik maupun yang dari produk pusri padahal kualitasnya betul yang disampaikan oleh Pak Mindo tadi bukannya baik malah jelek, disisi lain ada pupuk yang kualitasnya bagus malah tidak diendorse oleh kementerian pertanian, nah ini harus diperhatikan

betul tentang Petroganik dan cair ini tolonglah jangan dipaksakan kepada kelompok tani itu diwajibkan untuk menebus melalui pengecer maupun melalui distributor, di Dapil kami yang namanya Petroganik itu numpuk sampai satu gudang karena mereka terpaksa kalau mereka tidak menebus ke Petroganik ya mereka tidak dapat pupuk padahal kementerian pertanian sudah bikin peraturan tidak ada sistem paket tapi faktanya dilapangan dari distributor dan pabrikan harus sistem paket, tetapi kita tidak pernah ada tindakan tegas untuk menindak industri pupuk. Oleh karena itu Pimpinan, suatu saat saya memohon agar industri pupuk Pak Sudin diundang rapat tanpa pemerintah mari kita kuliti/bedah sama-sama agar para mafia pupuk ini jangan lagi ada rakyat yang menderita seperti ini kemudian malah mensubsidi perusahaan besar seperti industri pupuk-pupuk Petroganik dan sebagainya kasiha rakyatnya Pak, kami tiap hari kalau tutun kedaerah selalu ditanyakan soal masalah itu, jadi saya rasa itu jadi mudah-mudahan bisa menjadi solusi rapat ini juga bisa cepat selesai dan kita bisa istirahat di rumah.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Firman terima kasih, selanjutnya Pak Suhardi Duka

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pak Ketua dan juga Pimpinan,
Anggota Dewan yang terhormat,
Pak Sekjen dan Pak Dirjen yang saya hormati.

Sesungguhnya sudah 2 hari kita rapat, kita bijak melihat persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak lain adalah untuk kepentingan bangsa dan petani kita, yang pertama kita juga ingin mengontari sedikit tentang mengenai konstra tani dengan menggunakan istilah komando, ini ala-ala militer ditengah diera sipil, jadi mungkin ada rahasia di kementerian pertanian jadi harus menggunakan kata-kata komando ini ada mungkin hakikat yang ingin dicapai sehingga menggunakan istilah-istilah militer didalamnya mohon penjelasan pak dirjen atau pak sekjen. Yang kedua asuransi tani saya *support* pak bagus ini apalagi hanya 36.000/hektar dan 40.000 per ekor sapi utamanya sapi-sapi yang ini tingkat resiko untuk melahirkan tinggi sekali tinggal perlu dijaga, bagaimana sistem klaimnya dia sudah bayar asuransi tani, asuransi sapinya kemudian tidak dibayar oleh asuransi, oleh karena itu perlu adanya pengikatan yang benar oleh kementerian pertanian dengan asuransi yang bekerjasama. Dirjen Peternakan, ayam gagal memang kita akui oleh karena itu kita fokus ke ternak-ternak yang ramah dengan masyarakat, oleh karena itu sulawesi barat fokus sama sapi, ada juga kelompok tani disana 300 hektar

dia punya tanah disiapkan untuk peternakan sapi kalau misalnya bisa dibantu saya serahkan kepada dirjen. Dirjen PSP saya kira selain alsintan juga jalan-jalan tani, memungkinkan untuk daerah-daerah yang infrastrukturnya masih terbelakang, nah ini beda dengan jawa yang infrastrukturnya sudah bagus, semua jalan-jalan kebun, tetapi daerah sulawesi daerah timur itu jalan-jalan tani masih sangat dimimpikan oleh masyarakat kita.

Kemudian BPSDM, pemantapan sistem penyuluhan dan sistem pelatihan ini saya kritisi karena dengan 1 triliun hanya untuk memantapkan 2 (dua) kegiatan yaitu, pemantapan sistem penyuluhan dan pemantapan sistem pelatihan berarti sistemnya yang rusak sistemnya perlu diperbaiki, barang kali kalau semahal ini sistemnya beli saja sistem baru sama dengan aplikasi. jadi perlu kajian yang mendalam kita butuh peningkatan SDM tapi arah dari pemantapan sistem kedua ini pelatihannya enggak ada masalah perlu ditingkatkan supaya penyuluh kita, PPL kita, Penyuluh-penyuluh kita mempunyai peningkatan pengetahuan, daya serap teknologinya dan sebagainya, tapi hanya untuk memantapkan sistem perlu penjelasan ini sehingga kita bisa memahaminya.

Badan Ketahanan Pangan juga mengintervensi sekolah untuk mengatasi *stunting*, saya kira sekolah sudah penuh apalagi Pak Nadiem sekarang sudah melakukan perubahan yang besar terhadap sekolah kemudian kita intervensi dengan gedung sekolah apakah sekolah memiliki tanah untuk berkebun, bertani dan sebagainya. Menurut saya, *stunting* ini bukan karena persoalan kekurangan pangan, bukan karena persoalan kekurangan gizi, yang menjadi persoalan utamanya ini adalah karena ia tidak mampu beli pangan, nah persoalan pertama adalah kemiskinan. Oleh karena itulah, daerah yg terkena *stunting* di Sulawesi Barat, kami punya daerah nomor 2 daerah *stunting* tertinggi di Sulawesi Barat. Yang pertama adalah kabupaten polewalimandar dia ini lumbung pangan, 18.600 lebih dia punya sawah, dia swasembada pangan tapi dia *stunting*, kenapa bisa *stunting*? Karena banyak masyarakatnya 17% yang miskin jadi titik pertamanya adalah kemiskinan.

Saya kira ini untuk saya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Suhardi terima kasih.

Saya tambahkan sedikit mengenai trijaya usaha tani, tidak hanya di Sulawesi tetapi juga Kalimantan. Oleh saya rasa secara umum, sangat-sangat dibutuhkan Pak Dirjen PSP apa yang tadi saya katakan.

Selanjutnya Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Ini untuk semuanya Pak Sekjen, Pak Dirjen, yang pertama terkait dengan program dan penganggaran tentunya kan dibuat akhirnya endingnya untuk rakyat, dari kementerian menuju rakyat kan ada organisasi di provinsi dan organisasi di kabupaten. Saya mencoba membedah RKA Bapak yang betul-betul ada alokasi untuk dana sektor kementerian ke kabupaten itu hanya Dirjen Horti, Dirjen Pangan, Direktur Pangan 2,37 triliun itu dikelola sendiri oleh kementerian dari 5,367. Begitu juga untuk dirjen-dirjen yang lainnya sehingga terjadi perdebatan perbedaan pendapat, termasuk tadi Pak Johan, Pak Firman kalau ini juga dikomunikasikan ke daerah, daerah juga sigap mempersiapkan program tidak terkatung-katung, programnya apa juga jelas, nah oleh karena itu kalau sekarang sulit kedepan tolong diperbaiki agar betul-betul tepat sasaran tepat arah sehingga tadi memperdebatkan masalah pekarangan pangan lestari, serahkan saja ke kabupaten, kabupaten pun juga punya semangat untuk terbangunnya ketahanan pangan, programnya adalah bagaimana kita berdayakan kaum miskin tanam sayur di pot misalkan untuk bisa dikonsumsi sendiri sangatlah bermanfaat. Sekolah sudah enggak ada lahan Pak, anggaran lepas pasti juga ditinggal.

Kemudian bapak ibu sekalian, yang kedua hampir semua Dirjen kecuali yang Dirjen PSP sama SSDM itu pada pembibitan, perkebunan yang juga 50% termasuk untuk bibit padahal semuanya semangat untuk mengeksplor, lah bibitkan baru ditanam nah kapan nanti dihasilkannya. Nah oleh karena itu, untuk Dirjen Pangan Pak Jali khususnya padi, rakyat sudah tidak berkenan lagi dengan bibit pemerintah, nah kenapa? Pada saat disemai hanya jadi separuh Pak, yang jadipun tumbuhnya sulit tidak ada selektif begitu jadi hasil panen langsung jadikan bibit, mestinya kan selektif dipilah mana yang baik untuk bibit, ini merupakan penyebab turunnya produktivitas. Disisi lain bibit-bibit yang disalurkan ke masyarakat ternyata tidak ditanam Pak, kenapa? Karena yang penerima itu bukan obyeknya. Ini ada oknum yang menyalurkan lagi ketempat lain, artinya manakala bibit yang targetnya 1 ton mungkin yang dibeli cuma separuhnya jadi menjadi sebuah permainan. Bagi rakyat ada bibit yang berkualitas, rakyat masih sanggup membeli, begitu juga dengan alsinta (alat mesin pertanian) dilapangan sulit mendapat pekerja disektor pertanian sehingga kelompok tani mengeluh kepada saya untuk mengelola sawah 1 kelompok saja lebih dari 1 bulan sampai tanam ini. Nah usul saya adalah mulai dari penyaluran bibit hingga mesin pertanian ini perlu dievaluasi kembali supaya tepat arah tepat sasaran. Ini ada persoalannya dengan konstratani, konstra tani yang tadi disebutkan ujung tombaknya kan para penyuluh, penyuluh ini tidak mau mengobservasi kebutuhan, malah percaya sama kepala desa, kepala desanya tidak mau menerima kalau tidak mendukung dia, ini persoalan jabatan politik kepala desa itu Pak. Oleh karena itu, mau diusulkan silahkan tapi tolong dievaluasi kembali sampai tepat arah dan tepat sasaran.

Kemudian bawang merah Pak, saya suka sedih apabila ada yang bilang kekurangan bawang merah, di kabupaten saya itu di majalengka orang

brebes nanam bawanya di majalengka Pak, tapi harganya selalu turun 7.000 sampai dibawah itu, coba berikan pada kelompok bawang merah itu agar dibangun gudang supaya ditampung ditahan dulu sebentar sehingga harganya bisa jadi lebih baik.

Kemudian Pak Dirjen Peternakan, pak di kabupaten-kabupaten itu punya UPT untuk peternakan lebih aman salurkan sama mereka untuk pembibitan dan lain sebagainya, coba mulai dibangun tiap-tiap daerah agar mampu menyediakan pangan sendiri pasti aman tuh Pak dan Bapak tidak perlu lagi anggaran untuk pemeliharaan tempat dan juga tempat pemeliharaan lainnya, tiap kali diglontorkan daerah didorong untuk melakukan pembiayaan sendiri kalau semua dilepas dimasyarakat habis Pak, termasuk upah pun habis tuh Pak, bagaimana meminta pertanggung jawaban, dikontrol juga habis jadi coba kita berdayakan pemerintah daerah karena ini adalah daerah yang otonom Pak, supaya anggaran daerah pun mendukung untuk itu dipancing oleh pusat sehingga daerah pun juga ikut berinovasi untuk mengembangkan disektor itu.

Saya kira itu 3 menit Pak, walaupun masih banyak terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Sutrisno.

Selanjutnya Pak Fauzi Amro, kami persilahkan Pak Fauzi.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Saya baru pertama Pak, sudah diospek sama Pak Sudin ini. Saya mengingatkan kembali saya juga dulu pernah dikomisi IV Pak, sama-sama Anggota dan Kapoksi dengan Pak Sudin, sekarang jadi Pimpinan saya Pak. Pak Budi juga sama Pak Dani yang bertahan dari 55 Anggota saya catat hanya 15 orang.

Sehingga kita bicara Sintang, harus banyak-banyakkan buktinya hanya 15 orang yang jadi Pak, artinya sekitar 30 sampai 40 orang yang gak jadi di Komisi IV ini. Ini mengkhawatirkan Pak, mudah-mudahan dibawah Pimpinan Pak Sudin dan kawan-kawan ini, ini kedepan kita jadi semua Pak.

Pertama Pak, saya mengingatkan lagi ini target utama kementerian itu bagaimana Swasembada Pak. Itu hulunya Pak. Hulunya swsasembada, baik itu pangan maupun daging. Itu hulunya, nah yang kita bicarakan ini hilirnya Pak. Hilirnya ini. Nah hilir adalah perubahan anggaran tahun 2020. Dua dirjen yang sangat besar pengeluaran anggarannya, dirjen ketahanan pangan dan dirjen sarana dan prasarana Pak.

Saya ingin mengingatkan lagi Pak, bahwa efektifitas dalam penyaluran alsintan. Mungkin di dapil Pak Sudin misalnya melibatkan polisi dan tantara waktu penyerahannya. Nah saya mengusulkan Pak, kalau ke kelompok tani sama gapoktan itu rata-rata sudah hampir dapat semua. Nggak ada satupun

kelompok tani yang ada dapilnya kawan-kawan ini, yang nggak dapat apa-apa, apalagi dapilnya Pak Hermanto. Ada yang dua, ada yang tiga.

Saya mengingatkan lagi Pak bahwa alsintan itu bukan jadi alat ukur kita untuk jadi lagi DPR RI kedepan. Tapi itu bakti kita. Saya mengusulkan Pak, lebih bagus lewat UPJA Pak. Unit Usaha Jasa Pengelolaan Alsintan. Itu akan lebih efektif. Siapa mau pakai silakan, siapa mau pakai silakan. Tapi kalau dikasih kelompok atau Gapotan itu milik ketua Pak. Yang anggotanya 20-25 itu basa basi Pak, bohong semuanya itu Pak. Kalau kita kawan-kawan dari Komisi IV ini, sudah hampir 2 sampai 3 ribu kok. Tapi kenyataannya hasil akhirnya enggak juga Pak.

Nah saya mau mengingatkan itu, efektifitasnya kalau saya menyarankan lewat UPJA Pak. Karena UPJA itu bisa dipakai oleh siapapun tanpa ada kelompok atau Gapoktan. Seluruh lah, kalau mensyaratkan seperti itu. Syarat UPJA silakan. Apa syarat-syaratnya nanti bisa dikomunikasikan. Itu satu Pak.

Termasuk juga, fungsi dari penyuluh pertanian Pak. Nah penyuluh pertanian ini, efektifitasnya. Misalnya ada Konsra tani atau konsra, persoalannya kita berpikir bahwa ini adalah ujung tombak untuk melakukan Pendidikan, melakukan avokasi, melakukan penyuluhan, tapi goal point kita swasembada Pak. Bukan kita tidak senang dengan konsep Konsra ini, tapi kita pertama masukan dari kawan-kawan, bagaimana penyuluhnya, bagaimana statusnya. Apakah, ada penyuluh pertanian Pak, PLL itu digaji 750 ribu per bulan. Itu dapat SK dinas. Nah kita pikirkan Pak itu satu bulan.

Nah mungkin dengan Konsartan ini apa efektifitas, apa kerjasama antara kementerian dengan pemda kabupaten dan kota atau bagaimana konsepnya Pak. Secara pribadi saya sangat mendukung konsra tani, nanti persoalan siapa orangnya kita atur-atura saja Pak. Itu satu.

Yang terakhir

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak, cukup?

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Yang terakhir, terakhir Pak Sudin.

Yang terakhir masalah data Pak, data. Kita dulu yang dipakai ini kita tetapkan adalah data BPS Pak. Bagaimana data BPS itu adalah itu data base nya Pak, jangan data A atau data C karena itu diluar pertanggungjawabannya. Kalau kita sudah bicara data Pak, insha Allah mudah-mudahan target dan proyeksi baik PKH, horti, tanaman pangan, Saya yakin lah dengan dirjren PKH Pak Ketut misalnya dengan kejadian masalah babi. Tidak mungkin ganti siapa mati, siapa mati, gila itu siap yang mau ganti itu Pak. Nah bagaimana kalau yang mati-mati itu diberikan pendekatan secara emosional sehingga cost mati ganti, mati ganti Pak Muslim, ya kacau Pak

Muslim kita kan. Siapa yang bertanggungjawab? Kadang-kadang tidak mati dibuat mati ini, ini masalah efektifitas.

Mungkin ini Pak saran dan masukan dari saya.

Terima kasih Pak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Fauzi.

Itulah tugas Pak Fauzi dari fraksi untuk kesini. Tapi yang lebih penting lagi adalah balai penyuluhnya dulu ini yang lebih penting. Betul? Nah itu loh.

Selanjutnya Pak Muslim, silakan.

F-PD (MULSIM, S.H.I., M.M.):

Terima kasih Pak ketua

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pak ketua dan teman-teman anggota Komisi IV, Pak Dirjen beserta jajarannya.

Saya tidak banyak Pak ketua, hanya beberapa hal saja. Yang pertama tentu saya lanjutkan dari sahabat saya Pak Fauzi ya? Kita punya gambaran dari berapa, 50 sekian anggota yang terpilih hanya 20, berarti bukan ukuran banyaknya program-program dan segala macam. Yang penting adalah out put dan target Pak Sekjen.

Yang pertama menyangkut tentang petani milenial tadi. Saya meihat di BPSDM ya Pak, BPSDMP. Sebenarnya kalau konsep ini saya sangat mantap, saya sampaikan pula kepada Bapak Dirjen Hortikultura ya Pak? Pertama mungkin Pak kepala badan BPSDMP yang mana ini Pak? Jadi artinya kalau konsep bapak ini benar-benar Bapak jalankan, saya pikir ini suatu prestasi Pak.

Jadi Bapak harus membuatkan beberapa objek percontohan Pak. Kenapa saya katakan demikian. Jadi teman-teman seluruh Indonesia, jadi Aceh juga ada dua tempat dimanapun penting Pak. Hari ini persoalan pengangguran terpenting terbesar dikalangan S1 dan S2 Pak. Saya sangat tertarik disini Pak. Karena disini anggaran sangat besar. Kelompoknya sangat besar, kenapa tidak buat ini beberapa pilot project sentra-sentra khususnya petani milenial Pak. Ini penting Pak. Kalau ini yakin program ini jalan Pak.

Saya sendiri terus terang Pak, pendukung saya itu tiga periode 80% mahasiswa Pak, anak milenial semua.

Bagaimana kita arahkan yang menganggur-menganggur ini kita arahkan semua Pak, apakah koperasi, apakah kelompok-kelompok tani mereka sebagai penggeraknya semua ini Pak. Kalau ini kita akan cetak sekian juga pengusaha muda Pak. Ini akan berhasil. Tentu oleh Bapak nanti, siapkan pendampingan, siapkan SDM mereka dikasih Pendidikan Pak.

Kemarin saya baru pulang dari Taiwan ini Pak ketua, Pak Sudin. Kita dari Taiwan ini, kita mau jujur ini tidak tahu dari dirjen apa kerjasama dengan pemerintah Taiwan dalam kontek, silakan nanti jelaska oleh Pak Sekjen, itu sudah resmi kerjasama dengan pemerintah Taiwan. Bahkan tahun ini mereka akan tambahkan Pak.

Saya ketemu dengan kementrian disana. Yang menarik di Taiwan ini disamping mereka diberikan pelatihan, mereka mendapatkan gaji, uang saku. Setiap bulan sebanyak 8 juta kalau tidak salah ya? Itu selama satu tahun. Bahkan mereka akan meningkatkan lagi.

Saya pikir kalau hal-hal seperti ini kan, mereka akan kerjasamakan juga Pemerintah Jepang, atau Vietman. Jadi setelah mereka kembali ke Indonesia mereka akan membuat juga hal yang sama. Nanti tolong dijelaskan. Saya siap Pak menyiapkan SDM, SDM di Aceh khususnya anak-anak milenial ini, tolong kami pun kasih ruang gerak nanti. Jadi nanti ketika saya ajukan tadi teman-teman membuat berbagai macam. Mereka dilatih, diberikan kursus sehingga mereka dapat mengembangkan. Apalagi kita melihat lahan-lahan pertanian ini ratusan ribu hektar yang menganggur Pak. Kenapa tidak kita dorong, didukung dengan infrastruktur.

Kemudian yang kedua, yang terakhir saja ini. Berkaitan dengan saya lihat disini masalah perternakan Pak yang berkaitan dengan khususnya ayam bertelur Pak. Yang sangat penting hari ini, saya melihat hari ini hanya dua perusahaan yang sangat berperan. Yaitu Sharon Phopan sama Java Combat. Artinya apa? Ini saya tidak tahu ini perusahaan Thailand kalau tidak salah ya?

Artinya ini akhirnya petani-petani ataupun kelompok-kelompok ini keuntungan sangat kecil Pak. Hampir 67% habis diakarnya Pak. Kita sangat berharap ini dari pihak pemerintah khususnya dari Dirjen perternakan ini mereka menyiapkan itu pabrik-pabrik pakan di daerah-daerah itu. Sekarang semua saya lihat memang berhasil Pak. Tapi petani tidak maksimal. Akhirnya yang menguntungkan itu adalah perusahaan lagi Pak. Ini diseluruh Indonesia bukan hanya Aceh ya? Ini yang namanya Sharon Phopan ini menguasai seluruh pasar di Indonesia ini. Kenapa pemerintah ini ikut masuk disitu Pak untuk membangun pabrik-pabrik pakan. Jadi sehingga membantu petani.

Kadang-kadang ketika mereka mendapatkan hasil besar tapi tidak membantu petani Pak. Karena pada dasarnya semua dikeruk oleh perusahaan itu. Ini sangat penting. Jadi saya berharap disini Pak Sekjen, tolong target dari pada dirjen-dirjen ini, kita harapkan tahun demi tahun ada yang maksimal. Kita tidak mau nanti berebut alsintanya, berebut ini, berebut itu, tapi out put nya apa?

Tentu teman-teman di Komisi IV, kita berharap apa? Ketika ada usulan kami tolong ditanggapi oleh dirjen-dirjen ini, diberikan ruang gerak. Karena yang kita lakukan ini membangun sektor perikanan dan sektor pertanian dan daerah.

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Pak Andi Akmal.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mungkin tadi yang minta ditayangi perihal pupuk bersubsidi tadi belum ya? Yang per provinsi tadi, Pak Maman bagaimana? Alokasi pupuk bersubsidinya itu loh, per provinsi. Biar nanti mereka waktu pulang reses bisa menjawab. Lanjutkan Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pimpinan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan anggota Komisi IV, Pak Sekjen, Pak Dirjen dan Bapak, Ibu yang berbahagia.

Yang pertama Pak ketua, karena saya kemarin anggota 2019, saya membahas anggaran 2020 ya. Untuk di dirjen PSP, ada hal disini yang perlu kita cermati, terutama saya yang kemarin membahas. Ada anggaran yang masuk 300 miliar ya, pergeseran dengan judul, “4 juta liter”, ya Pak ya? Apa namanya pupuk organic. Ini tidak pernah kita bicarakan ini di anggaran 2019, dibulan berapa Oktober atau September itu ya? Ini memang dipergesarkan, hanya ini kan perlu kita telaah Pak ketua. Jumlahnya sangat besar kemudian ini tiba-tiba masuk ini ada apa?

Kalau yang misalnya tadi pergeseran dari PSP misalnya 100 miliar ke yang lain mungkin saya bisa pahami lah. Tapi katanya 300 miliar ini diambil dari penghilangan cetak sawah. Ini kan perlu kita bicarakan baik-baik, apa urgensi tiba-tiba muncul ini, 4 juta liter ini pupuk organic. Pupuk organik ini kita ragukan ini bagaimana efektifitasnya ini. Dan saya sendiri Pak nanti butuh penjelasan dan kalau tidak jelas, saya sendiri nanti kita usulkan biar dialihkan saja ke program lain yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya irigasinya, mungkin jalan tadi atau yang lain-lainnya gitu. Daripada pengadaan-pengadaan yang tidak jelas itu.

Ini Pak ketua, karena itu kita bahas kemarin. Itu mungkin perlu penjelasan dari Pak Dirjen ini mengenai masalah ini.

Yang kedua, saya kira 2020 ini, kita akan mengalami masalah tentang pupuk ya? Tentang pupuk. Seluruh daerah semua menjerit dari seluruh provinsi ya. Karena memang pupuk subsidi turun, hampir 1 juta ton. Ini mungkin pertama data kita dibawah menteri keuangan yang tidak terlalu valid ya Pak ya. Mungkin juga kita tidak terlalu bisa meyakinkan kementerian keuangan dan Banggar bahwa data kita benar sehingga ada pengurangan 1 juta. Ini ada bahaya. Ini bahaya. Saya di daerah saya sendiri di kabupaten Boan itu mungkin ada 9 ribu hektar itu tidak dapat pupuk subsidi. Ini kurang lebih ya ini mungkin.

Oleh karena itu Pak Dirjen, saya kira perlu Pak dari Pak diirektur pupuk ini betul-betul mencemati masalah ini karena ini kan hasil padi kita tergantung dari pupuknya gitu. Nanti itu saya butuh datanya ya Pak Dirjen seperti Pak Sudin itu katakan datanya per provinsi Pak.

Dan kemudian juga, kita berharap juga di Dirjen PSP itu ada satgas Pak. Saya berharap itu Direktur pupuk itu bekerjalah dengan baik. Saya beberapa kali saya sampaikan masalah tapi tidak ada tindaklanjut.

KETUA RAPAT:

Ijin, Direktur Pupuknya mana?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Belum, ada Plt nya Pak.

KETUA RAPAT:

Plt nya juga tidak datang? Mana? Saya minta kalau ada RDP, Eselon I, Eselon II wajib hadir. Jangan tidak hadir. Ya Pak Andi lanjutkan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih pak ketua.

Jadi ini butuh Pak satgas ini. Ada beberapa daerah disetiap provinsi ini bermasalah Pak. Dan masalahnya bisa saya sampaikan, masalahnya sebenarnya dari bawah. Masalahnya berasal dari pengecer yang banyak main dengan dinasnyanya. Ini kan harusnya Bapak harusnya tegas dengan penanggungjawabnya ini, kalau pengecernya, distributornya yang beking dicabut saja ijinnya Pak. Tidak peduli siapa yang beking itu kalau memang tidak benar di lapangan, dia jual subsidi ke yang bukan yang harusnya dapat cepat berikan tindakan. Masyarakat ini punya kemauan tapi dia tidak ada barang. Tidak ada barang di lapangan.

Saya berharap Pak Dirjen PSP ini masalah pupuk Pak. Saya dari periode kemarin selalu sampaikan tapi sampai sekarang tidak ada satgasnya, tidak ada, kalau perlu saya minta nanti melalui ketua nanti kalau sudah terpilih nanti, dari direktur pupuk nanti turun bersama-sama kami nantinya. Tidak peduli dari stakeholder nya, dari distributor, agar kita lihat dimana masalahnya gitu. Ya kalau bisa bukan hanya dapil saya saja Pak, dapil yang lain juga yang bermasalah gitu. Ya itu yang kedua Pak Dirjen ya Pak ketua.

Yang ketiga, untuk dirjen PKH. Saya hanya menyoroti ini Pak dirjen. Periode kemarin kita hampir ada anggaran hampir 500 miliar ya, pengadaan indukan sapi impor ya Pak. Ini Bapak ini punya rencana lagi 2020. Nah pertanyaan saya mungkin tidak Bapak ini bisa mengarahkan gitu. Kalau dulu kan tidak bisa Pak ketua. Kalau tidak yakin kira relokasi saja anggarannya, atau hanya setengahnya saja. Ini perlu ada jawaban jujur ini Pak Dirjen ini bagaimana. Walaupun itu sudah disetujui, tapi kalau Bapak tidak yakin itu bisa kita relokasi kalau itu dibutuhkan ya.

Kemudian yang terakhir Pak ketua, karena waktu terbatas untuk penyuluh Pak. Ini kami juga setiap hari didatangi oleh penyuluh perkebunan, penyuluh apa namanya? Perternakan dan lain-lain tentang statusnya. Kalau tadi Pak Momo mengatakan sudah diangkat 6 ribu, sudah 11 ribu. Yang

belum ini Pak. Mereka ini sudah puluhan tahun disana. Sudah ada yang umur 50 tahun, belum ada statusnya gitu loh. Apalagi mereka rencananya atau ada rencana untuk dimasukkan di P3k ya Pak. Ini bagaimana solusinya kira-kira. Ya kalau kemarin kita sepakat di Komisi IV jangan ada penghentian, ya Pak penghentian PHK. Tapi mereka butuh status yang jelas Pak. Kira-kira mau dikemanakan. Apakah otomatis P3K, atau ada yang lainnya itu.

Saya baru dengar dari Pak Firman tadi mengatakan bahwa ada Undang-undang yang lain ASN itu mensyaratkan tidak ada umur sebenarnya. Pak Firman ya? Hanya PP nya saja itu. Nah saya mungkin tolong dibicarakan dengan menteri pendayagunaan dan aparatur negara dan yang lainnya supaya ini ada solusinya. Apalagi tadi kan ada konsep untuk pemberdayaan BPP. Kalau ini tidak diberdayakan dari status dan penghasilannya ini kan omong kosong gitu.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ya cukup Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi tadi usulan Pak Andi ini sudah disampaikan oleh senior saya Pak Mindo, mengenai pengurangan pupuk apa, pupuk cair tadi. Begitu Pak Mindo? Tolong saudara dirjen PSP ini dikaji ulang. 4 juta liter itu cukup banyak loh. Kenapa tidak sebagian tadi Pak Mindo katakan dialihkan untuk pupuk, sebagian lagi untuk perbaikan irigasi tersier. Termasuk jalan usaha tani.

Tolong di mala mini dikaji ulang. Jangan sampai nanti waktu raker bisa dua hari dua malam nanti. Saya hanya mengingatkan itu saja.

Selanjutnya yang mulia Dr. Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak ketua yang baik hati.
Ketua, Pimpinan dan anggota serta Sekjen dan Dirjen yang hadir dari kementrian pertanian.

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dasar kita menyusun anggaran program ini adalah untuk swasembada pangan dan kemarin juga bagaimana kita mewujudkan kedaulatan pangan. Saya sering berulang kali ini menyebutnya.

Periode yang lalu praktis sudah kita tetapkan swasembada dan kedaulatan pangan itu menurut saya gagal. Apalagi kemarin itu. Kita hanya menetapkan hanya tiga jenis produk yang akan kita capai. Beras, gula dan, beras, kacang kedelai dan jagung. Itu praktis menurut saya tidak tercapai target ini.

Nah sekarang ini kami sejak menteri pertama menyajikan disini, kita itu belum pernah menetapkan target swasembada apa saja sih yang mau dicapai, apa prioritasnya gitu. Nah kami minta ini harus jelas. Nah saya selalu menegaskan masa akhir kementerian yang lalu dan masuk pada kementerian sekarang ini, selalu saya mengingatkan perencanaannya itu harus mantap supaya kita bisa membuat program.

Jadi membuat program atau membuat anggarannya ini, harus sesuai dengan perencanaan dan perencanaan ini harus akal. Dan yang kedua, perencanaan itu harus bisa dilaksanakan. Dan yang ketiga perencanaan itu ketika sudah dilaksanakan juga harus bisa diawasi. Setidak-tidaknya ketiga hal itu, ini harus bersinergi secara kuat, secara solid antara DPR RI dengan pemerintah. Terutama dengan kementerian, kementerian dengan mitra Komisi IV.

Nah saya melihat daripada implementasi dari program itu praktis tidak terlalu banyak yang terawasi oleh anggota DPR RI atau Komisi IV. Terutama dengan hal kaitannya dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan pelatihan, Pendidikan, dan seterusnya ini. Sosialisasi dan segalamacamnya ini. Ini angkanya cukup lumayan besar ini, 1,7 triliun. Praktis ini tidak bisa terawasi oleh anggota. Dimana dilaksanakannya, kapan dilaksanakannya, siapa yang datang kesitu, siapa yang menjadi narasumber disitu dan segala macamnya, kita tidak pernah masuk ke ranah sana anggota. Dan juga praktis kita tidak mendapatkan informasi bahwa di provinsi mana diadakan apa gitu, terkait dengan Pendidikan dan pelatihan itu. Praktis kita tidak pernah melakukan pengawasan.

Nah saya khawatir, ini anggaran cukup besar ini tidak efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Apalagi berapa anggota tadi juga sudah menyinggung ada kostratani, kostratani ini, ini implementasinya seperti apa. Kita belum ada kejelasan secara utuh untuk seperti ini. Sementara ada penyuluh-penyuluh yang sudah lama, sudah berumur sudah berakar disitu, bertahun-tahun, beranak cucu, itu tidak pernah diperhatikan. Dimana perannya dia di kostani ini, SMD nya, kemudian PMT

nya. Itu sudah lama mereka bekerja disitu. Saya pikir kali ini saya ingin katakan ini kalau kita membiarkan mereka, ini kita dzholim ini. Karena kita sudah memberikan kesempatan secara administrative mereka berperan, tetapi statusnya tidak jelas.

Nah ini harus kita selesaikan. Saya khawatir ini kalau tidak selesai sumber daya pertanian kita akan tergerus. Selama puluhan tahun mereka hanya dapat honor, dapat transportasi. Honorinya juga tidak jelas. Sementara tiap hari mereka kita kasih tugas ya? Dia harus melaporkan tugasnya itu. Saya minta ini SMD dan TMT harus diselesaikan. Ini ada PSDM juga kan. Saya minta ini diselesaikan.

Kalau terkait dengan petani milenial. Saya setuju saja. Yang penting dia bisa di *creat*, di *manage*, karena apa? Sekarang ini petani-petani kita ini sudah usia tua dan yang muda pun sudah enggan untuk betani. Nah ini kalau kita tidak pandai meng *creat* nya anggaran besar ini hanya tersia sia saja, tidak ada manfaatnya gitu.

Nah saya pikir kalau kita serius petani milenial ini, ini juga dibuatkan perencanaannya dan implementasi dan pelaksanaannya itu juga harus jelas. Siapa yang disebut dengan milenial itu. Apakah sarjana yang baru lulus. Nanti kita turunkan komandan petani milenial Mas Budi, menurut saya bagus juga. Juga harus dimanage jangan sampai anggaran yang besar ini, oh mba Tika ya. Kalau kita sudah tua ya.

Kemudian saya juga setuju apa yang sudah disebutkan oleh Pak Firman tadi, ada anggaran-anggaran yang sebenarnya itu tidak efektif dialokasikan disana. Sebaiknya itu difokuskan saja untuk kepentingan, kepentingan produktifitas. Nah ini sangat penting. Irigasi misalnya. Ini ada juga lahan-lahan yang tertimpa oleh bencana. Nah ini juga tidak pernah disinggung disini. Ada lahan juga yang rusak karena banjir, karena longsor. Nah itu seperti apa itu. Nah didapat saya di Solok Tengah itu, seluruhnya Kawasan Sumatera Baru ini, itu semua bencana itu mengakibatkan lahan pertanian kita menjadi rusak. Saya minta ini harus dialokasikan, termasuk juga daerah-daerah lain.

Nah ini antisipasi terhadap ini juga harus jelas. Kemudian terkait dengan cetak sawah baru. Selama ini cetak sawah baru juga kita tidak bisa *control*-nya.

KETUA RAPAT:

Cetak sawah sudah tidak ada Pak, sudah di stop. 2020 sudah stop, atas permintaan Pak Hermanto sudah kita stop.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ini karena Pak Sudin yang mimpin jadi kita ini tegas, kalau tidak ada sudah tidak ada, kita tidak lanjutkan. Artinya anggaran yang besar itu, nah inilah yang kita rencanakan untuk apalah, apakah untuk sumber daya manusianya, untuk lahannya dan apa untuk hal-hal yang terkait dengan penunjangnya. Untuk irigasi, untuk.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Hemanto. Sudah 4 menit.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sedikit lagi Pak ketua.

KETUA RAPAT:

Ya boleh.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua sedikit lagi Pak ketua.

Nah jadi menurut saya, ini terkait dengan pelibatan-pelibatan anggota DPR RI. Itu hampir anggota DPR RI ketika ada sesi-sesi kegiatan pertanian di pemerintah daerah itu tidak pernah tau, dan bahkan itu beritanya dari kawan-kawan ini, itu yang hadir sebenarnya dari anggota Komisi yang lain. Yang dia tidak pernah ada berkumpul dengan Komisi IV.

Jadi itulah yang dikhawatirkan oleh Pak Fauzi Amro tadi. Ya kan. Nah jadi ini juga harus ada efeknya juga kepada anggota. Begitu saja Pak ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau bicara petani milenial itu tidak usah ada program nya lah. Periode yang lalu sudah ada kok, saya masih ada. Waktu itu pelatikkannya di Pedet di Lampung Selatan, oleh Pak Amran Sulaeman itu. Lenyap begitu saja. Tidak usah neko-neko lah program. Yang penting bagaimana peningkatan produksi. Itu yang paling penting. Tidak usah pakai milenial ono begitulah. Bagaimana peningkatan meningkat, rakyat petani hidupnya sejahtera.

Dengan jalan tadi misalnya, pupuk cair dipotong untuk perbaikan irigasi ini lebih cocok. Gitu loh. Selanjutnya Pak Abdulah Tuasikal.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan

Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, Sekjen, para Dirjen dan beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ini dari pagi sampai pagi, tidak tahu ini rapat dengar pendapat ini sudah berapa kali. Ini sama dengan kaset saja ini. Ini kaset mutar-mutar itu lagi. Buat saya kita fokus, dan kalau Pak Sekjen, Dirjen sudah jawab, tidak jelas kita tanya. Kenapa? Setiap pertemuan ini muncul lagi, muncul lagi. Itu saya minta untuk Pimpinan itu agar kita lebih fokus, supaya kita rencana anggaran dan relokasi ini bisa jalan tepat waktu. Karena kegiatan-kegiatan anggaran ini sudah mau jalan.

Yang pertama, tadi kan sudah sampaikan oleh semua. Tidak usah kita ulang-ulang, karena ya mungkin ciri khas kita, kita ini selalu mengulang, ulang. Kalau kita negara ini mau maju. Itu kunci ada pada perencanaan. Kunci ada pada perenancanaan. Perencanaan dari mana? Itu dia dari bawah. Siapapun punya keahlian tapi kalau tidak mempunyai perencanaan yang baik itu akan hack diatas.

Untuk itu dari awal setiap ada kementrian, saya selalu sampaikan bahwa itu penyuluh itu penting. Mau istilah penyuluh atau pengawas silakan. Karena penyuluh memberikan pembinaan, penyuluh mengetahui luas tanahnya berapa setiap petani. Ya mana produktif dan mana yang tidak produktif. Itu maka saya dari awal menyarankan mana yang sangat penting. Bila perlu itu satu desa itu satu penyuluh. Kalau ada penyuluh pada satu desa, itu maka dia tahu. Apa yang ada pada desa-desa itu. Itu yang penting.

Lalu yang kedua ini ada pembangunan balai penyuluh. Kalau ada balai penyuluh tidak ada penyuluh sama saja. Ini maka ini harus jalan bersama. Untuk itu saya mengharapkan untuk kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, mau nama penyuluh, pengawas, silakan saja. Karena penyuluh pengawas itu selanjutnya itu akan menyampaikan informasi sampai ketingkat Menteri. Ya kita lihat kegagalan di daerah-daerah ini kan pada tingkat informasi. Itu buat saya, jangan kita sepelekan yang namanya penyuluh.

Soal organisasinya, mau system mau komando silakan saja. Sekarang tinggal disesuaikan. Kita sudah punya penyuluh daerah. Saya pengalaman jadi bupati 10 tahun. Dan kalau bicara petani, kita juga pernah punya

pengalaman bupati dan pernah juga ada dan pernah dilingkungan petani. Ya jadi kalau bicara soal petani minimal saya punya pengalaman, bicara soal peternakan semua, saya sudah mulai. Jadi kunci itu adalah pengawasan.

Apapun yang kita mau komentar tapi kalau tanpa ada pengawasan perencanaan yang baik itu tadi saya katakan ini pasti hang semuanya. Singkatnya Pak Pimpinan saya kira penyuluh itu sangat cukup penting. Diimbangi dengan balai. Dan Saya juga ada pada balai-balai dan saya juga pernah datang, dibandingkan dengan balai alat-alat juga sangat kurang, tapi kita.

KETUA RAPAT:

Namanya balai kosong gitu?

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ya bukan kosongnya juga. Tapi menurut saya begini. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena ini balai sangat cukup banyak. Ada balai kosong. Nah pertanyaannya anggaran kita cukup atau tidak? Saya sepakat kalau penyuluh kita angkat sebanyak-banyaknya, balai kita selesaikan sebanyak-banyaknya apa rehabilitasi line, kita Komisi IV harus sepakat untuk menaikkan anggaran untuk kementrian pertanian itu.

Yang kedua Pak, saya kira kita harus segera selesai, kita fokus. Kalau kita cukup dengan rapat dengar pendapat kita hanya begini, begini waktu dia selalu berlalu Pak ketua. Untuk itu saya sekali Pak ketua, saya sekali lagi Pak ketua ingatkan, saya anggap ini Pak ketua ini senior saya, tapi saya harapkan kedepannya ini kita fokus.

Kalau ada pertanyaan, kalau ada pembicara sudah dijelaskan jangan kita berulang-ulang lagi. Ini kemarin Cuma mutar ini, saya hanya dengar ini kaset apa ini itu terus. Bicara pupuk kita sudah bicara pupuk, bicara peternakan kita sudah bicara tentang peternakan, bicara bawang putih kita semua sudah bicara. Tapi kok belum ada pada satu titik kesimpulan.

Lalu yang terakhir Pak, tadi kan ada teman-teman yang katakan. Wah ini pupuk harus gimana, ini harus, gampang saja. Kita kan punya dapil. Nah nanti tinggal dapil kita sesuaikan saja. Kalau ini pupuk mau nanti di kurangi nanti kan larinya kemana? Mana yang tidak cocok larinya kemana kan gampang. Nah ada 50 orang disini, ya kan Pak tidak susah.

Jadi lebih gampang saja kita sesuaikan dapil, kita sesuai dengan program dan kita sesuaikan dengan keuangan yang ada. Ya Pak ketua ya,

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Ya Pak, terima kasih.

Jadi begini ya Pak Abdullah Tuasikal. Tadi saya sudah katakan ya pertanyaannya jangan diulang-ulang. Tapi kalau anggota ngomong tidak boleh ngomong nanti saya disalahkan lagi.

Kalau masalah pupuk itu, itu usulan dari RDKK nya. Tetapi pemerintah tidak bisa memenuhi. Saya tegaskan lagi, pemerintah tidak bisa memenuhi semua pupuk bersubsidi. Ya Pak.

Selanjutnya Pak Azikin silakan, setelah itu Ibu Nur'aeni, masalah yang sudah disampaikan jangan disampaikan lagi.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ketua, dan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Sekjen beserta rombongan yang saya hormati.

Pertama-tama saya mengapresiasi program-program yang telah disampaikan oleh Pak Sekjen dan anggotanya, dirjen-dirjen yang telah mau berupaya meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Karena kami yakin kalau produksi pertanian meningkat pasti rakyat sejahtera.

Oleh sebab itu Pak Sekjen ada beberapa hal yang harus digarisbawahi bahwa mulai tahun 2020 ini. Pemerintah akan memperlakukan secara konsisten Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang aparatur sipil negara. Dimana dia akan menghapus semua tenaga honorer ditingkat kementerian dan Lembaga.

Oleh sebab itu Pak Sekjen. Kementerian ini banyak sekali tenaga-tenaga yang tidak jelas statusnya. Oleh sebab itu mulai sejak ini Pak Sekjen harus mengkoordinasikan dengan Menpan agar tenaga-tenaga tersebut bisa disalurkan menjadi tenaga P3K, tenaga pemerintah dengan perjanjian kontrak. Termasuk tenaga-tenaga yang ada di daerah. Termasuk tenaga yang ada di kementerian ini urusan konkrin. Kewanangan antara pemerintah pusat dan daerah, bukan absolut. Sehingga kemungkinan besar bahwa, honorer

yang ada di daerah bukan PPL itu. Gajinya dari pusat tadi digunakan di daerah.

Nah kalau ini tidak diselesaikan dengan cepat, berarti program-program Bapak tidak mungkin berhasil apabila PPL yang ada di lapangan tidak bekerja dengan optimal. Saya juga tertarik dengan adanya petani yang milenial. Mungkin kata-kata milenial ini sebagai magnet penarik kementerian. Karena terus terang bahwa di daerah-daerah itu orang tertarik mau jadi petani, apalagi orang muda. Dia lebih senang menjadi pendamping, di social pendamping pembangunan masyarakat desa pendamping dimana-mana dibandingkan menjadi petani.

Namun mungkin Pak Sekjen perlu ada seleksi yang tepat dalam rangka penerimaan petani-petani milenial yang akan dijadikan petani pelopor. Mungkin juga termasuk kontra-kontra apa. Ini kontra-kontra berbau bau militer. Ini juga bersifat komando agar PPL tidak lagi liar seperti yang lalu, diberikan komando kepada camat tidak mungkin juga akan terselesaikan. Saya sudah jadi camat lima tahun Pak. Memang PPL itu harus punya pelatihan khusus. Kalau tidak salah pernah dapat motor setelah itu sudah tidak ada lagi perhatian kepada PPL. Ini mungkin tambahan Pak yang dapat saya sampaikan.

Dan yang terakhir tanggal 4 hari Selasa yang lalu saya sudah memperkenalkan diri sebagai anggota Komisi IV. Mudah-mudahan didaftar yang Pak Sekjen yang bikin itu, yang akan datang sudah ada nama saya. Karena hari ini masih terlupakan nama saya ya.

Demikian Pak dan saya terima kasih kepada Pak ketua karena menyampaikan bahwa Pak Asikin perlu dimasukkan.

Wabilihitaufiq wahidayah.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Asikin, besok sebelum rapat dimulai, insha Allah daftarnya sudah ada Pak, dan kita bagikan kepada teman-teman semua.

Yang terakhir Mba Nur'aeni silakan.

F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan Komisi beserta teman-teman, Pak Sekjen, Pak Dirjen Eselon I beserta jajaran.

Mungkin dari saya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terhadap kebijakan program beserta anggaran yang sudah disampaikan ya, dan mudah-mudahan ini sudah bisa cepat untuk bisa terealisasi dan mohon kiranya untuk membuat suatu manajemen waktu yang jelas dan konkrit. Serta diharapkan ada kordinasi terhadap beberapa program.

Selanjutnya saya melihat dibeberapa PPSDM ini ada tambahan yang cukup besar. Salah satunya dengan system ya, baik itu penyuluh dan sebagainya. Ini sudah mulai rencana ditiap-tiap daerah. Itu sudah mulai terfloat dan saya lihat di Banten itu ada anggaran, ad program sarana dan prasana pendidikan pertanian. Ini sangat besar sekali 98 miliar.

Yang ingin saya tanyakan, ini modelnya seperti apa. Apakah ini usulan dari daerah atau memang dipaksakan dari kementrian untuk dikucurkan di daerah. Jangan sampai dulu juga sudah terjadi pemberian bibit dan sebagainya, nah kalau daerahnya tidak siap, saya kira ini juga perlu dievaluasi. Nah mohon kiranya juga, setiap program yang dikucurkan baik itu melalui DAK, maupun tugas pembantuan, ada bentuk intervensi, agar kami pun dikoordinasikan terhadap program-program pusat yang diturunkan ke daerah. Kecenderungannya bahwa tidak adanya koordinasi, sulit untuk bisa mendapatkan informasi dan sebagainya, yang pada akhirnya begitu ada persoalan, baru menyampaikannya ke Dewan. Nah peranan dari Kementerian ini, Bapak-bapak ini untuk bisa mengintervensi di daerah juga dibutuhkan.

Terus saya sepakat juga sama teman-teman, agar mendorong bagaimana para penyuluh serta pendamping mitra tani juga untuk bisa diperhatikan, dalam hal mungkin dari sisi kedudukan, maupun dari sisi honorarium agar bisa lebih ditingkatkan lagi.

Untuk Dirjen PSP, sama dengan teman-teman, kalau memang yang dibutuhkan para petani kita yaitu irigasi dan embung, kenapa sih, ke depan mungkin saya berharap, bahwa irigasi embung juga menjadi suatu persoalan yang sangat krusial, yang memang sampai saat ini saya kira masih minim ya untuk dibuat dalam perencanaan di kementeriannya.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Terima kasih.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, interupsi sedikit saja, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, ya silakan Pak Dr. Silakan, mohon maaf, lupa tadi.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya untuk ini saja, untuk Dirjen Peternakan, ini ada jenis-jenis sapi, wagyu, galacian blonde, dan Belgian blue. Ini untuk Sumatera Barat, tidak ada lokasinya Pak. Kan daerah-daerah, itu, ini saya minta supaya untuk di Sumatera Barat dialokasikan.

Demikian Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sudah, Pak Doktor. Kalau Pak Doktor biasa makan daging sapi biasa bukannya wagyu, maka Pak Dirjen tahu, maka tidak diberikan wagyu. Karena masak daging wagyu dibuat rendang, kan tidak mungkin.

Terakhir Pak siapa namanya Pak? Ya sudah, silakan Pak.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik Pak, terima kasih atas waktunya.

Pak Pimpinan, Pak Sekjen, Pak Dirjen,

Setelah *break* tadi Pak, kesejukan ruangan ini artinya apa Pak? Walaupun tidak sedingin AC ini, nampaknya setelah *break* teman-teman semua sudah ada sejuk semua. Kemarin mungkin ada yang lepas, ada yang apa, tujuannya kita tidak ada apa-apa Pak Dirjen, supaya kita ini berhasil, Kementerian Pertanian adalah keberhasilan Komisi IV DPR RI juga. Cuma saya ada Ketua, dua hari ini saya melihat Komisi I DPR RI, Komisi III DPR RI, Komisi lain, mereka selfie semua dengan kawan-kawan, pakai baju seragam. Memang ini urusan kecil, Pak Ketua. Saya punya niat Pak Ketua, kalau Pak Ketua izin, biarlah saya menepahkan ada ciri khas kita ketika kita rapat dengan Kementerian Pertanian, coba teman-teman tengok Komisi I. Rapat dengan Menteri Pertahanan, bajunya seragam semua, krem. Nah Konstra

Tani. Kalau Pak Sekjen inipun, boleh kita persiapkan untuk Beliau-Beliau ini, Ketua. Baju brigade entah apa, supaya Nampak memang kita ini mitra, Ketua. Kalau saya tidak ada bicara lagi Ketua, masalah ini bantuan, tidak dapat pun tidak ada masalah lagi, Ketua. Coba sudah kita ungkap. Dan ini sudah mulai transparan, Pak Sekjen. Ini kan rapat RDP terbuka, biar semua tahu, yang kita usulkan itu bukan kepentingan pribadi kita, Pak. Cuma tadi saya sekedar masukan saja, Pak Sekjen. Tadi di Pak Ketut, saya Dapil Aceh, kok Bapak ini yang menentukan lokasi, Pak Ketua? Ini saya kira keliru, Pak Ketua. Kalau memang ada itu, tanyakan kepada kami, Pak Sekjen. Sebab gini, macam sayalah Pak Sekjen, tidak mungkin setiap apa kali ya, tidak mungkin setiap kabupaten. Saya banyak Pak, 15 Pak. Yang dikasih 3, Pak. Pak Ketut pula yang menentukan Pak, sementara kita ini orang politik, 1 kabupaten itu Cuma 17 suara saya, masak bantuan kesitu Pak? Saya kira semua sepakat ini Pak. Kalau sudah kita bersatu Pak, sama ini yang macam-macam apa, ada pelatihan, tidak usah Pak Ketua, melalui Pak Ketua. Tidak usah Beliau-Beliau ini yang apa, kalau memang program itu sosialisasi apa, biar kita saja. Langsung. Supaya lebih menyentuh, Pak. Kalau dengan penyuluh, oke, Bapak, Pak. Kalau dengan petani itu apa salahnya, kami Pak, Cuma Bapak yang kontrol. Duit tidak usah sama kami Pak, Cuma kami yang tentukan, Pak. Kabupaten mana. Nanti itu Pak Ketut ini asyik Benar Meriah, asyik, Benar Meriah. Padahal itu Dapil Pak Khalid, bukan Dapil saya, Pak Ketut. Ini salah ya Pak Khalid? Ini contoh, Pak Ketua, kadang-kadang saya itu, Pak Pimpinan pun, Kalimantan Barat. Wajar. Pak Ketua pun, Lampung, wajar. Padahal Aceh ngamuk, itu yang bahaya, Pak. Itu yang ngeri Pak, apalagi dicampur dengan Papua. Untung ini Komisi ini tidak ada Papua ya, ada? Ya itu kan orang Nasdem Pak. Betul tidak Ketua? Kehadiran Pak Fauzi kemari ini sangat menambah kekuatan kita di Komisi IV, Pak Ketua. Apa di mata Pak Fauzi, Pak Sekjen, kami paham, Pak Sekjen. Sudah kami bahas. Insya Allah dengan dinginnya, sejuaknya sore menjelang Magrib ini, mudah-mudahan ke depan ini kita lebih akrab, dan lebih hebat. Amin.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Cukup? Masak masalah seragam dibawa ke RDP. Kan uangnya sudah saya siapkan. Tidak usah. Ya Ketua gini-gini juga kalau sekedar seragam, masih mampulah. Tidak boleh minta sama mitra, nanti jadi masalah. Tidak perlu juga diingatkan, Pak Salim. Dan ini satu hal, bagi saya satu hal yang sangat-sangat mengecewakan saya, tiga minggu lalu belum dibahas masalah anggaran ini dengan Eselon I, sudah beredar, "anggota Komisi IV satu orang dapat bantuan pasca panen 16 unit". Dari mana hal ini bisa terjadi? Ini lho yang saya pertanyakan. Kemudian sudah disusun wilayah ini, ini, ini, kalau begitu putuskan sendiri saja, tidak usah ada RDP lagi, tidak usah ada Eselon I lagi. Saya sampai ditegur oleh teman-teman ini semua. Kenapa pada waktu itu ada beredar seperti itu? Apa sudah dibahas sama Ketua? Saya bilang, saya tidak pernah sembunyi-sembunyi dalam membahas. Saya harus *clear*. Bahkan kemarin rapat konsultasipun saya minta 5 pimpinan hadir. Tapi sudah beredar duluan apa yang dikatakan Beliau tadi, Pak Ketut sudah menentukan disini, disini, disini. Jadi buat apa kita mitra? Tentukan saja sendiri. Seperti

yang saya katakan mengenai usulan dari Gubernur Lampung. Saya sih sudah bilang, kurangi, tapi nampaknya Pak Ketut lebih dengar gubernur daripada saya. Ini lho. Jelas saya ngomong disini. Iya. Kan saya bilang, "karena bantuannya ini sangat sedikit, toh kita juga tidak dapat apa-apa kok, Cuma menyalurkan dan membantu mengawasi". Apa jamin kalau itu diprovinsikan, dinas, Bapak bisa awasi semua? Saya sendiri tidak yakin, itu lho, tidak yakin bisa mengawasi. Ini lho yang kadang-kadang saya bingung.

Selanjutnya Pak Budi, silakan Pak Budi. Tadi Pak Daniel mau ngomong, mana Pak Daniel? Ya sudah.

Demikian, pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya kami persilakan kepada Eselon I Kementerian Pertanian untuk menyampaikan jawabannya.

Silakan Pak Sekjen, siapa duluan?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Baik, terima kasih Pak Ketua, Anggota Komisi IV DPR RI.

Atas saran, masukan dan pertanyaanya, semoga menjadi lebih baik program dan kegiatan Kementerian Pertanian Tahun 2020. Terkait dengan Kesekjenan, ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, dari Pak Ibnu Multazam, tadi terkait dengan realokasi tadinya 650 memang kita kurangi 400, semuanya untuk bansos Bapak, sehingga yang saya usulkan 250 nah ini atas arahan Hari Senin, Bapak-Ibu dan juga Pimpinan kemarin.

Kemudian yang kedua, terkait dengan data luas baku lahan sawah, sudah direlease, Bapak-Ibu, mungkin hari Senin kemarin sudah saya jelaskan. Memang ada perbedaan, semula 7,1 hektar, sekarang yang direlease ATR itu sekitar 7,46. Sehingga ada peningkatan 350 ribu hektar. Nah ini memang dampaknya, mohon izin Ketua, dengan pupuk anggaran yang tersedia, ini kita hanya bisa menyediakan 7,9 juta ton, nah ini mohon bantuan atau dukungannya, kami akan mengajukan ke Kementerian Keuangan, terkait dengan penambahan luas baku lahan dari 7,1 ke 7,46 terkait dengan pupuk bersubsidi, Pak Ketua.

Yang ketiga, Pak Darori, kami infokan bahwa perubahn tenaga structural Eselon III, IV, menjadi tenaga fungsional, ini memang harus dilaksanakan tahun 2020, ini paling lambat akhir bulan Juni. Sehingga proses di Kementerian Pertanian, proses identifikasi jabatan-jabatan struktural mana yang bisa dialihfungsikan, termasuk nanti ke fungsional mana, Insya Allah kami sudah selesai dan mungkin dalam bulan Maret akan diajukan ke Menpan, sehingga sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, mungkin Bulan Juni sudah tidak ada Eselon III, IV, Pak, karena memang ini arahan Presiden.

Terkait dengan Pak Sutrisno ya, kami hampir semua Eselon I, dananya didekonsentrasi, Bapak. Ada 34 dana dekon, baik untuk tanaman pangan, holti, peternakan, PSP, termasuk PPSDMP perkebunan bahkan BKP juga didekonkan. Nah untuk TP, ini ditambah 60 kabupaten satker mandiri. Jadi ada 60, nah ini dilaksanakan memang di 513 kabupaten/kota se-Indonesia.

Pak Muslim, terima kasih. Memang kami tahun 2019 sudah mengirim kerja sam dengan Taiwan, dari target 200 pada saat itu saya masih di PPSDMP, baru dikirim 54 orang. Tapi akhir tahun ada permasalahan terkait dengan masalah jam kerja, sehingga Kementerian Luar Negeri sementara 2020 ditunda Pak, kerja sama, Pak Muslim, jadi Taiwan 54 sudah kami kirim, tapi 2020 arahan dari surat dari Menteri Luar Negeri, ditunda, karena ada permasalahan terkait dengan jam kerja di Taiwan. Kalau dengan Jepang, kita sejak tahun 1984 sudah mengirim lebih dari 1500, tiap tahun rata-rata 50 orang, salah satunya produk kita adalah Pak Winarno Pak, Ketua KTNA itu salah satu ketua ikatan magang Jepang.

Mohon izin saya jelaskan terkait dengan penyuluh, nanti yang lain-lain Pak Kepala PPSDM menambahkan. Jadi penyuluh saya ulangi ya, jumlah saat ini yang PNS itu total 32 ribu, yang THL 12-13 ribu, dari jumlah itu semuanya yang 13 ribu honor dan BOP nya diperpanjang tahun 2024, dan SK-nya sudah ditandatangani Pak Menteri. Dan Insya Allah bulan Februari paling lambat, awal Februari, harusnya honor sudah bisa didistribusikan. Nah anggaran penyuluhan atau tadi, anggaran sistem pertanian yang Rp1,0 sekian triliun, itu 441 hanya untuk honor dan BOP. Nah dengan harapan kalau sudah diangkat menjadi ASN PPPK sesuai arahan, mohon maaf siapa tadi Pak Calon, eks bupati, kalau sudah diangkat, karena yang 11 ribu sudah punya, sudah lolos *passing grade*, Pak. Sudah lolos *passing grade*. Kalau ini bisa diangkat, Insya Allah BOP dan honor nya yang belum terselesaikan bisa dinaikkan. Tentunya seizin Komis IV. Jadi kita ada Rp440 miliar untuk bayar honor, sisanya kalau BOP, penyuluh PNS, semuanya diberikan BOP.

Barangkali ini beberapa point yang ingin saya sampaikan, untuk selanjutnya, oh ya Pak Hermanto, target, Pak Hermanto keluar ya, Hari Senin saya sudah sampaikan target-target swasembada mengacu kepada data BPS, sebagai contoh untuk padi, kita awali dengan data yang sudah di *release* BPS tanggal 4 Februari, itu sekitar 45 juta gabah kering panen. Atas dasar itu, peningkatannya sudah ditetapkan, tapi memang kami bertekad naik 7% begitu kan, untuk setiap komoditas, program-program yang disemai Bapak-Bapak ini semuanya menuju ke arah sana.

Barangkali ini beberapa poin

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, sudah selesai?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ya, sudah cukup.

KETUA RAPAT:

Sudah ya? Siapa? Alien? Silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pak Sekjen, saya ingin menanyakan soal honor BOP. Bagi Bantuan Operasional Penyuluh. Ini diberikan standarisasi berdasarkan apa Pak? Karena saya kemarin juga turun di Dapil, ketemu dengan penyuluh, mereka sangat mengeluh soal dana BOP ini. Karena di daerah-daerah seperti daerah kami, kepulauan itu Rp400 ribu baru harga bensin saja Pak. Pergi ke tempat yang mereka harus memberikan penyuluhan kepada para petani. Ini standarisasi geografisnya seperti apa, ataukah disamaratakan semua? Kan tidak bisa kayak begini.

Terima kasih. Terus juga Pak Sekjen, saya ingin menanyakan, kalau BOP ini di daerah itu kan juga bagi PNS, itu kan sudah mendapatkan, sama juga, tapi kan mereka juga mendapatkan tunjangan. Apakah ini juga diberikan kepada honor, eh bukan, apa, PNS ASN? Ya itu. Apakah diberikan juga atau tidak? Karena kita pernah tahu di daerah juga ada, tunjangan-tunjangan kepada, tolong jelaskan.

KETUA RAPAT:

Cukup Mbak Alien? Jadi Mbak Alien ini istilahnya nanti penyuluhnya di kampungnya, minta tunjangan kemahalan, sebutnya. Karena ongkosnya lebih mahal, begitu?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya betul.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, langsung dijawab interaktif, supaya cepat selesai. Saya berharap sebelum Magrib kita sudah ada kesimpulan rapat. Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ya, baik.

Ibu, untuk tunjangan itu ada Peraturan Menteri, Permenpan, yang bisa dapat tunjangan itu hanya jabatan fungsional rumpun ilmu hayat pertanian, apakah dia penyuluh pertanian, apakah dia TOPT, apakah dia medik, paramedik, itu yang dapat. Ada 9. Karena itu harus mengacu pada

Permenpan, dan itu harus PNS. Tetapi yang apa, THLPDPP, ini mohon izin, belum.

Kemudian yang kedua, BOP itu dibagi 3 wilayah, secara global, wilayah barat itu Rp320 ribu, wilayah tengah Rp400 ribu, wilayah timur Rp480 ribu. Nah ini siapa yang mengeluarkan? Kami mengajukan, ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kami sangat sadar ini kurang, tadinya harapannya kalau yang THL ini 11 ribu bisa diangkat menjadi PPPK yang dananya nanti melalui dana alokasi umum, nah anggaran yang ada saya mau mengusulkan ke teman-teman DPR, untuk bisa menaikkan BOP dan honor. Tadinya harapannya itu untuk yang ditingkatkan. Tapi karena Perpresnya belum keluar, proses pengangkatan THL menjadi PPPK belum bisa ditindaklanjuti. Pak Menteri mungkin dalam 1 minggu ini juga berkirim surat lagi ke Menpan, Ibu, terkait dengan supaya ada percepatan keluarnya Perpres.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Pak Ketua, izin, Pak Ketua.

Pak Sekjen belum menjawab pertanyaan saya tentang protokoler atau panduan-panduan untuk varietas-varietas yang di *release*, Pak.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Saya pelajari Bu, karena yang menangani Pusat PVTTP, kalau ada hambatan dimana, ini saya mau pelajari dulu. Setiap perizinan ini dalam satu tahun minimal 4, bahkan saya sudah minta diperbanyak rapat-rapat supaya proses-proses perizinan terkait dengan varietas, dan komisi yang dibentuk, komisi independen, Bu. Jadi mohon maaf, nanti kami cek, kalau ada Ibu yang bermasalah, tolong kasih tahu saya, biar saya selesaikan.

Terima kasih Bu.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua...

KETUA RAPAT:

Ya, lanjut Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Jawaban saya tadi juga belum.

KETUA RAPAT:

Apa itu?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Dalam soal strategi, kalau misalnya nanti disetujui, tapi soal strategi Konstra Tani itu, apakah akan merekrut tenaga baru, atau kita lakukan pemberdayaan terhadap memang yang sudah tenaga ini selama ini ada?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ini ada aturan, kami, kebetulan saya di PPSDMP mendalami Pak. Jadi memang PPPK dibatasi usia 40. Kami perjuangkan yang diatas 40 ada yang khusus. Ternyata yang khusus harus punya keahlian khusus, misalnya dokter lulusan luar negeri dengan keahlian tertentu, bisa yang diatas 40. Nah sehingga ada beberapa strategi, Insya Allah, honor tetap diperpanjang, yang kedua ya akan dijadikan wira apa, agripreneur, apa, wira usaha pertanian. Dulu pernah ditawarkan ke teman-teman, tapi mereka menolak, sudah terlalu cinta menjadi penyuluh pertanian, Bapak. Baik, terima kasih. Insya Allah kami akan carikan solusinya.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya jawaban Eselon I, silakan diatur.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Minta BKT dulu.

KA. BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Baik, terima kasih Pak Sekjen.

Ketua, Wakil Ketua dan anggota yang kami hormati.

Ada pertanyaan yang pertama dari Pak Ibnu Multazam tadi, terkait dengan kegiatan program kita, Insya Allah kegiatan kita di BKT lebih banyak kepada pemberdayaan masyarakat Pak, jadi itu tentunya nanti juga perlu pengawalan, dengan pembagian Dapil tadi, kita harapkan nanti kawan-kawan anggota Komisi IV DPR RI ikut juga mengawasi.

Kemudian Ibu Endang, terkait dengan basisnya *agro ecological zone*, kita juga lakukan itu Bu. Jadi untuk pemilihan komoditas dan budidayanya kita menggunakan *agro ekologizal zone*, tetapi kemiskinan dan kerentanan pangan memang itu basisnya adalah kecamatan. Jadi tetap kita perhatikan itu.

Kemudian selanjutnya dari Pak Johan tadi terkait dengan, ya terima kasih Pak Johan, selama ini dibantu, tapi mulai dari tahun 2018 kami

tambahkan mereka, rumah bibit Pak. Jadi Insya Allah dengan adanya tambahan rumah bibit, tidak mengganggu lagi nanti ditiap-tiap pekarangan-pekarangan.

Kemudian dari Pak Suhardi dan Pak Trisno, ini yang terkait dengan *stunting*, itu fokusnya adalah kemiskinan dan pola konsumsi, betul Pak. Jadi pola konsumsi tentu kita akan memberikan kampanye untuk pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan kemiskinan kita atasi dengan kemampuan mereka untuk memproduksi pangannya sendiri, sehingga mereka tidak tergantung lagi. Saya rasa sekaligus itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Saya rasa itu dari saya, Pak Ketua, dan anggota sekalian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ada tanggapan dari anggota?

Kalau tidak ada, dilanjutkan Eselon I lainnya.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Baik, terima kasih.

Mohon izin Pak Ketua.

Tadi ada beberapa pertanyaan, pertama dari Pak Darori terkait dengan kentang import, sampai sekarang kita tidak membuka kentang import. Terus terkait dengan cabe dan bawang merah, menjelang tahun baru seperti yang kemarin kami paparkan pada saat RDP hari Senin, itu cabe dan bawang merah Insya Allah aman, untuk Lebaran nanti, karena produksi cukup.

Yang kedua dari Pak Johan, terkait dengan bawang putih, kalau misalnya dari China ini ada hambatan begitu ya Pak ya, jadi kita sedang menjajaki ini barusan saya juga berkomunikasi dengan pihak India, ini India salah satu prosedur terbesar kedua setelah China, Pak, hanya memang bawang putih India ini ukurannya lebih kecil-kecil. Tapi ini bisa menjadi satu alternative. Tadi saya tanya, apakah ada yang ukuran diatas 4 cm diameternya, mereka juga ada, walaupun produksinya tidak banyak. Kalau yang diatas 4 cm, India berproduksi kurang lebih 1,4 juta ton per tahun, dan untuk ekspor mereka itu bisa sampai 200 ribu, untuk yang ukuran besar-besar. Yang diatas 4 cm. Tadi saya sudah berkomunikasi. Jadi nanti kalau pelaku usaha memang mau mencari dari India, sebagai satu alternative. Juga ada juga dari Bangladesh dan dari Mesir, Pak. Ini juga, walaupun tidak banyak produksinya di Bangladesh maupun Mesir, tapi ini salah satu alternative kalau memang nanti dari China jadi masalah dalam 2-3 bulan ke depan.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen jangan berharap dari Mesir dan Bangladesh, mereka sendiri konsumsi tidak cukup, mereka pun masih import dari China, itu saja.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Baik, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ketua, izin Pimpinan.

Kemarin kan saya bertanya ke Pak Dirjen, belum dijawab.

KETUA RAPAT:

Ya kalau ingat, kalau lupa?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya makanya saya mau ingatkan.

KETUA RAPAT:

Ya tanya lagi dong.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Kemarin kan saya menanyakan soal izin buah yang dikeluarkan untuk 3 perusahaan itu, standarisasi dan sebagainya, kan kemarin belum sempat dijawab. Jadi sudah diskorsing, jadi saya kan minta untuk penyampaian dari Bapak Dirjen. Kan kemarin sudah ada draft perusahaannya. Tapi 3 perusahaan itu apa standarisasinya untuk perusahaan-perusahaan yang lain, yang juga mengajukan untuk izin tersebut. Kenapa harus 3 perusahaan tersebut, begitu lho. Biar kita mengetahui standarisasi, kriteria perusahaan tersebut seperti apa.

Terima kasih.

WAKIL KETUA (DANIEL JOHAN, S.E.):

Sebentar Pak Dir, sebentar, selain buah mungkin bawang putih bisa dijelaskan ya, bahwa kriteria sehingga mereka dianggap layak itu apa.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Jadi di dalam Permentan 46 dan Permentan 02 Tahun 2020, disana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah *good agriculture practice* dan *good handling practice* yang harus betul dilaksanakan dengan baik disana, Pak. Karena ini yang menjamin mutu produk yang akan masuk ke Indonesia. Supaya aman dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Nah untuk buah-buahan juga sama Bu, ada persyaratan demikian yang harus dipenuhi. Dan ini semuanya sedang berproses, karena banyak yang belum bisa memenuhi kriteria itu. Nah Amerika sudah mendapatkan pengakuan sistem keamanan pangannya dari Badan Karantina Pertanian, dan ini, itu baru 3 itu. Yang lainnya sedang berproses.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Jadi begini Pak, kan kita tahu bahwa ada kriteria dan standarisasinya, jenis-jenis buah tersebut. Okelah kalau misalkan dari Amerika, atau dari Australia, atau dari mana pun, tapi yang kami tanyakan, kriteria perusahaan ini seperti apa? Kan juga harus kita ketahui Pak, kan begitu. Kan 3 standarisasi perusahaan tersebut, ini kan saya lihat dari 3 perusahaan tersebut, ada yang CV, ada yang PT, begitu kan. Apakah CV juga bisa, apakah PT juga bisa, kan seperti itu. Terus, perusahaan ini bergerak seperti apa, persyaratannya, kriteria, standarisasi, agar ke depannya perusahaan-perusahaan lain juga mungkin bisa meningkatkan atau bisa mencapai dengan standarisasi kriteria yang diinginkan oleh para, yang akan dikeluarkan izin dari Kementan, misalkan seperti itu.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Kami jawab sekalian, mohon izin Pak Ketua.

Memang standar yang kita, kita tidak apakah itu PT, apakah itu CV, tidak ada masalah. Untuk pengajuan itu tidak ada masalah, selama memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi yang diatur di dalam Permentan 02 Tahun 2020.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, saya mau mendalami ini.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Mindo dulu.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Bisa saja Permentanmu itu yang keliru. Ya toh? Jangan ber apa, bicara dibalik Permentan nomor sekian, bisa keliru Permentanmu itu. Permentanmu itu yang harus Anda jelaskan kepada kita semua. Kasihkan itu terbuka, supaya orang tidak menganggap ada *hanky panky business* disini, pertanyaannya kan, mengapa hanya 3 itu yang lolos? Itu pertanyaan sesungguhnya. Nah jelaskanlah persyaratan itu seperti ini diatur oleh Pementan. Nanti anggota Dewan lihat, “oh kalau seperti ini, 3 sudah banyak, ya toh, karena persyaratannya seperti ini”. *Good handling*, apa kaitannya dengan kemampuan meningkatkan ketahanan nasional dalam persyaratan Permentan itu. Dikaitkan tidak? Seharusnya seluruh import hasil-hasil pertanian harus terpikir bagi kita, bagaimana meningkatkan kemampuan nasional, ada kaitannya tidak itu? Kalau tidak ada kaitannya, Permentan itu dievaluasi. Paham, jelas? Seperti kata Bung Karno dulu itu, “jangan kau serahkan lidahmu, jangan kau serahkan selera lidahmu kepada bangsa asing”. Artinya, kalau ada bawang putih nasional yang bisa kita tingkatkan kemampuan kita, kenapa harus menjadi rasa dari asing yang kita perbanyak? Begitu cara berpikinya meningkatkan kedaulatan pangan, meningkatkan ketahanan kita dibidang pangan.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bu Endang masih mau tanya ya?

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Tadi sudah dijelaskan Pak Mindo, jadi saya hanya mengingatkan kembali bahwa kita pernah mencoba dan berhasil cukup baik di NTT dan lain sebagainya, melalui peneliti-peneliti yang ada di Balai Penelitian di Malang ya, dari Malang.

Kemudian yang kedua Pak, saya mau usul, di Rancamaya ada sub Balai Holtikultura yang mangkrak, tidak terurus. Nah saya sudah lapor kepada Bapak Dirjen yang lama, Pak Dirjen Holtikultura yang lama, Pak Suwandi, tapi tidak ada *action*.

KETUA RAPAT:

Oh, Pak Suwandi waktu itu sibuk ngurusi LIPH, Bu.

Pak Andi mau nanya lagi?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Bukan nanya, Ketua, bukan nanya.

Jadi Pak Dirjen ya, ini perlu data kepada kami juga Pak, ini hanya tambahan saja Pak Ketua, data produksi bawang putih kita Pak. Karena ini kaitannya dengan jumlah yang akan kita import, begitu lho. Karena data ini kan masih sangat ya belum kita yakini kebenarannya lah. Data produksi kita ya Pak ya? Karena hubungannya dengan APBN kita yang cukup besar untuk membantu bawang putih dan bawang merah, begitu Pak. Ini hubungannya. Kalau memang datanya bahwa produksi kita berapa, apa adanya dululah sehingga lima tahun ke depan kita ada target bahwa bisa mengurangi import yang ada, begitu. Itu Pak Ketua.

DIRJEN HOLTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik, terima kasih Ibu

KETUA RAPAT:

Mbak Alien mau nanya lagi?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya, Ketua izin.

KETUA RAPAT:

Ya sudah.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Izin dulu Pak, biar sekalian jawab.

Jadi karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen, ini kan ada 3 perusahaan yang sudah dikeluarkan izin bulan lalu. Ya kan Pak Dirjen? Ada standarisasi, atau sesuai dengan apa namanya, Permentan. Tahun lalu kenapa tidak pakai GAP? Ini ada Pak ini Pak?

DIRJEN HOLTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Mohon izin Pak Ketua, boleh saya jawab?

Baik, dari tahun lalu Bu, sejak Permentan RIPH kan berubah Permentan 17 eh 16, Permentan 16, Permentan 38, terus Permentan 39, terus sekarang Permentan 02. Itu semuanya standar GAP dan GHP ada disitu, Bu. Bisa dicek nanti di Permentannya, bisa dibuka, di *googling*, itu kalau tidak salah di Pasal 15, itu standar GAP, GHP ada disana semua.

KETUA RAPAT:

Jadi kemarin saya sudah katakan disini, masalah GHP itu itulah permainan importir. Termasuk negara asal. Jadi Pak Dirjen tidak usah menutupi, pakai Permen, apa, kalau memang Permennya salah, kenapa tidak

direvisi, dicabut? Ini lho. Dan saya juga sudah bilang Pak Momon, setiap ada peraturan Permen maupun apa, dikirimkan tembusannya ke Komis IV, agar supaya kalau ada masyarakat yang mengadu, "hei, ini Permennya sudah ada nomor sekian, makanya kamu baca". Kalau sekarang kita ditanya, saya sendiri tidak tahu. Dan saya bilang juga disini, Dirjen Holtikultura ini punya kesalahan juga. Kenapa saya katakan kesalahan? Waktu Imlek, tidak ada jeruk yang bagus. Karena jeruk itu dimasukkan dari Bulan Oktober, ditimbun, oleh penimbun, jadi pada waktu Imlek, orang bertanya sama saya, "Kok jeruknya tidak ada yang bagus". Jawaban saya singkat kok, "Emang gue penjual jeruk", begitu. Karena Anda tidak mengeluarkannya, harusnya pada waktu itu dikeluarkan bulan November, mungkin Desember bisa sampai, Januari bisa dipakai untuk Imlek. Karena jeruk, apel dan lain-lain itu dipakai untuk sembahyang pada waktu Imlek. Ini diakui saja Pak Dirjen, "Ya saya lalai". Sudah. Jadi kalau nanti kita tarik urat, kita ngotot-ngotot, rugi juga nanti Dirjen, ya. Masalah GAP itu kalau bisa ditinjau ulang, karena kami tahu itu permainannya cartel luar negeri. "oh saya sudah bekerja sama dengan PT ini". Inipun terjadi. Pada periode yang beberapa tahun lalu, salah satu komoditi hanya bisa impor dari negara ini, Pak Mindo pasti tahu kalau saya saya *nggak* perlu sebutkan Pak Mindo sangat tahu sekali bahwa yang *clear and clean* Cuma dari negara ini, negara lain *nggak*.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Pimpinan saya interupsi Pimpinan.

Ini menurut Pimpinan jam 6 kita stop, bisa ter-stop Pak Pimpinan ya mudah-mudahan ini internal saja. Kedepan itu ada Tata Tertib ya Tata Tertib Peraturan DPR RI harus di pelajari nanti kita evaluasi secara internal paragraf 7 tata cara permusyawaratan Pasal 25, Pasal 27. Saya itu saja Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Paham.

Jadi berhubung belum selesai saya perpanjang waktunya.

(RAPAT: SETUJU)

Jadi masalah tadi...

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Pimpinan bukan itu Pimpinan.

Itu Tata Tertib soal tata cara permusyawaratan dan kita juga sudah sepakat pada saat Pimpinan mau bicara itu maka serahkan ke salah satu Wakil Ketua. Dan menurut Tata Tertib pada saat Pimpinan mau bicara itu

maka kembali ke kursi Anggota ya tapi nanti itu saja Pak Pimpinan itu intuisi saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Tuasikal saya paham, tadi saya hanya menjelaskan saya bukan interupsi, saya hanya menjelaskan masalah GAP dan masalah lain-lain. Saya belum interupsi Pak, nanti kalau saya ngomong saya memang harus pindah ke kursi Anggota saya pindah.

F-NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Bukan soal itu Pimpinan, maksud saya itu kalau ke depan artinya untuk Rapat-rapat besok itu aturan Tata Tertib itu harus kita gunakan itu agar setiap kegiatan itu bisa jalan dengan lancar karena kalau tidak itu maka Pimpinan itu bahkan menggunakan hak Anggota untuk berbicara. Saya kira itu saja.

KETUA RAPAT:

Saya paham Pak, saya 10 tahun disini Pak. Saya paham aturan, saya paham tatib, tetapi tadi saya belum interupsi Pak. Saya hanya menjelaskan masalah yang Mba Alien *ngomong*, yang Pak Mindo *ngomong* saya menjelaskan. Nanti saya mau *ngomong* sesuai tatib ya saya akan pindah, saya akan pindah ke kursi Anggota. Mba Alien mau tanya lagi?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Nggak tanya, cuma ini kan pendalaman saja Pak. Jadi saya juga betul-betul karena saya juga baru saya sangat berterima kasih dengan apa yang disampaikan dengan Pak Ketua juga gitu, kita disini hadir untuk memperjuangkan apa untuk masyarakat dan Republik Indonesia ini. Tidak perlu dibatas-batasi kalau demi memperjuangkan Rakyat Republik Indonesia ini tidak perlu waktu, tidak perlu waktu. Kita duduk disini setengah mati dipilih oleh Rakyat kita tidak peduli dengannya *ngapain?* Saya pikir seperti itu Ketua, lanjutkan Ketua.

KETUA RAPAT:

Dari Dirjen Hortikultura cukup? Selanjutnya Pak Momon.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Belum Pak Ketua, Pak Ketua soal bawang putih tadi itu.

KETUA RAPAT:

Oh iya, tolong dijawab tadi Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Iya. Sampai kapan kita bisa memastikan bahwa apa kepastian stok ini ada ya itu kan Bapak kan baru berkomunikasi hari ini dengan India dengan segala macam itu ya yang jelas di RIPH-nya itu, itu asal China ya belum ada perubahan mau kemana mau kemana berapa hari Bapak butuh waktu untuk kerja itu?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Tinggal tergantung usulan Pak.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Ndak, saya *ndak* butuh tergantung-tergantung itu, kira-kira berapa karena ini kan kalau sampai akhir bulan ini belum ada datang barang itu Pak bisa ada kelangkaan stok gitu bisa inflasi ini.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Mohon izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak, sudah selesai Pak? Ya sudah jawab.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Mohon izin Pak Ketua.

Jadi untuk stok kita kami sudah cek datanya ya jadi ada kurang lebih stok kita masih ada 70.000 ton Pak kebutuhan kita stok kita sampai bulan Februari. Kebutuhan kita per bulan itu 47000 ton per bulan kebutuhan nasional Pak, jadi asumsinya bulan Maret itu masih cukup paling tidak sampai pertengahan Maret kita itu masih cukup. Nah kita sudah membuka RIPH 102000, 103000 ton iya kita sudah membuka RIPH itu ya hari Jumat kemarin sekarang prosesnya tinggal menunggu dari Kementerian Perdagangan untuk SPI-nya Pak ya. Nah tadi kalau memang ini tadi saya sampaikan alternatif kalau memang nanti sulit nanti misalnya dari walaupun kita sudah menyampaikan dari pihak karantina agar melakukan pengawasan ketat kalau memang nanti masuk ke Indonesia kalau memang nanti sulit dari sana tidak ada kita mencari alternatif dari Negara-negara yang saya sebutkan tadi itu Pak. Kalau produksi kemarin sudah kami sampaikan mungkin Pak di *print out* yang RDP yang hari Senin ada datanya Pak data kebutuhan bawang putih itu yang paling sebelah kiri sendiri itu adalah data produksi kita Pak ada datanya di sebelah kiri yang di bahan RDP yang kemarin Pak.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Ketua, boleh Ketua.

Data yang kemarin Pak Dirjen itu kalau dilihat *nggak* perlu kita impor Pak kalau data Bapak itu ya data produksi dalam negeri maksudnya, mungkin perlu di cek datanya Pak karena kebesaran sekali saya lihat itu data yang kemarin itu di produksi kita, itu yang pertama Pak Ketua.

Yang kedua, kita tadi mendengarkan dari Pak Dirjen Hortikultura bahwa ada stok 70000 ton, ini saya kira ada media disini ya ini pastikan bahwa ada stok artinya kalau ada stok sebenarnya harusnya tidak ada harga yang naik gila-gilaan kan gitu Pak ya. Nah sekarang masalahnya dimana ya karena importir ini Pak dia tidak sampaikan bawangnya ini ke pasar-pasar induk sehingga para pedagang kecil ini tidak mendapatkan pasokan yang cukup, makanya harganya sampai Rp70.000. Nah pertanyaan kritisnya Pak Dirjen mungkin bisa dikoordinasi cepat dengan apa namanya satgas pangan ataupun Menteri Perdagangan Pak supaya stok yang ada ini segera keluar dari gudangnya importir Pak kasihan rakyat kecil kita ini, para pedagang kecil kita, masyarakat kecil kita ini, Ibu-ibu ini yang kesulitan ini membeli bawang putih harganya sudah Rp70.000, Rp80.000 gitu. Ya Pak Dirjen ya ini dikomunikasikan segera Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Andi hanya menjelaskan saja sebelum ada RDP saya sudah komunikasi sama Satgas pangan bahkan satgas pangan sudah turun ke lapangan ya nanti kalau perlu, waktunya ada kita undang satgas pangan kita minta laporannya, ya Pak Andi ya. Ada lagi yang mau dijelaskan? Cukup. Selanjutnya siapa Pak Sekjen,

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Dirjen PSP.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua dan Anggota yang kami hormati dan kami muliakan.

Beberapa hal yang ingin kami sampaikan kaitan dengan pertanyaan yang pertama dari Pak Ibnu Multazam kaitan dengan alat mesin pertanian dan RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier) kami sudah alokasikan lebih kurang Rp150Miliar jadi kalau Anggota mau mengajukan silakan tapi tentunya barangkali tidak seluruhnya dipenuhi agar maklum karena memang Anggarannya terbatas. Kemudian yang kedua kaitan dengan alat mesin pertanian kemudian penyaluran pupuk bersubsidi kita sebetulnya sudah ada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang ada di tingkat Kabupaten dan Provinsi yang keanggotaannya itu melibatkan dari Polsek, kemudian dari Dinas Perdagangan Kementerian Pertanian dan instansi lain

yang terkait untuk mengawasi itu dan untuk tahun 2020 ini kami mencoba untuk memberikan insentif agar mereka lebih fokus kepada pengawasan hal-hal tersebut.

Kemudian kaitan dengan saran untuk dinaikkan HET-nya kami sangat setuju Bapak Pimpinan kalau bisa dimunculkan di salah satu kesimpulan RDP ini akan kami tindaklanjuti ke BPKP untuk *mereview*, artinya kalau dinaikkan Rp200 saja contoh misalnya Urea dari Rp1.800 menjadi Rp2.000 maka untuk 8,4 juta ton itu bisa dapat kita lebih kurang Rp1,6Triliun belum, iya hanya Rp200 itu dari 1 jenis pupuk Urea misalnya kita dapat Rp1,6Triliun apalagi kalau dari 5 jenis bisa menambah volume untuk para petani kita.

Kemudian kaitan dengan alokasi Jawa Timur yang turun lebih kurang bukan 50% tapi 40%, ceritanya seperti ini dan mungkin dulu sudah pernah kami jelaskan bahwa tahun 2020 kita sudah memulai penetapan kuota pupuk bersubsidi ini melalui ERDKK. Pada tanggal 15 Desember itu malam kami tutup namun realisasinya masih rendah sehingga tanggal 19 Desember 2019 kami tutup pendaftaran melalui ERDKK dan pada saat itu posisi Jawa Timur baru mengirimkan e-RDCK itu di posisi lebih kurang 60%, oleh karena angka itulah yang kami masukkan ke dalam sistem dan dalam sistem itu sudah di tandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi dan kami kemarin sudah juga audiensi dengan Komisi B DPRD Jawa Timur dan sudah kami jelaskan bahwa kesalahan ada di akibat kelambatan dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten gitu ya Pak.

Kemudian kaitan dengan lab laboratorium organik ini itu sudah banyak sebetulnya ada lebih kurang 76 Laboratorium yang sudah disahkan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan Permentan 262 tahun 2019 itu ada 76 laboratorium yang tersebar di seluruh Provinsi termasuk laboratorium-laboratorium tanah yang ada di Perguruan-perguruan Tinggi.

Kemudian dari....

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Interupsi Ketua, Izin kan.

KETUA RAPAT:

Boleh lah Pak masa *nggak* boleh. Dosa saya Pak kwalat nanti.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Ya saya kan harus menghormati Ketua, jadi tanpa seizin saya juga *ndak* berani.

Begini Pak Dirjen PSP, kalau kemarin itu cuma baru masuk 60% kemudian karena ini di Jawa Timur terjadi gejolak ini solusinya terus seperti apa dan itu kapan?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baik, terima kasih Bapak ya.

Jadi yang pertama perlu kami sampaikan mungkin bisa ditayangkan realisasi nasional itu baru 12% Pak sampai hari ini. Untuk Jawa Timur realisasi secara nasional pupuk bersubsidi sampai hari ini 9,2%, untuk Jawa Timur baru 12,7% gitu ya. Bagaimana seandainya Jawa Timur itu kurang pupuk untuk menutup yang 40%, ini disini ada tayangan bagaimana Jawa Timur untuk menutupi yang 40% jadi bisa digunakan yang ada dulu. Kemudian kalau kurang itu nanti kita punya cadangan 10% yang merupakan diskresi dari Bapak Menteri Pertanian, kalau masih kurang lagi maka....

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen saya tanya, anda berapa tahun di Kementerian Pertanian?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Saya di Kementerian Pertanian mulai masuk sudah lebih kurang 35 tahun.

KETUA RAPAT:

Pernah *nggak* ada kata-kata diskresi 10%, alokasi pupuk oleh Menteri Pertanian, ada *nggak*?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baru ada sekarang Pak ya. Jadi mohon izin untuk 2020 ini kebijakan dari Bapak Menteri ada cadangan, cadangan pupuk 10% gunanya adalah untuk mengatasi kelangkaan pupuk di beberapa daerah yang memang sudah kehabisan bapak Pimpinan jadi menggunakan cadangan pupuk. Dan memang alokasi pupuk untuk 2020 ini turun dari 8,8 juta ton 2019 menjadi 7,9 juta ton dengan Anggaran 2019 Rp27,3Triliun menjadi Rp26,6Triliun, inilah yang akan kami usulkan kembali ke Menteri Keuangan untuk penambahan volume pupuk bersubsidi termasuk Anggarannya. Dan kemarin juga ada demo di Lamongan untuk petani tambak dan ini pun kami sudah koordinasi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (*Kementerian Kelautan dan Perikanan*) untuk menyampaikan surat kepada Menteri Pertanian sebagai dasar Menteri Pertanian mengusulkan atas dasar surat tersebut ke Menteri Keuangan sehingga atas dasar petunjuk Menteri Keuangan tersebut lah yang akan kami laksanakan itulah sebagai dasar hukum kami mengakomodir pupuk bersubsidi untuk para petambak. Kemudian....

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen ini kan Anggaran subsidi pupuk turun nih, kemudian masih dipotong lagi 10% untuk cadangan gitu. Kira-kira logika *nggak, nggak* anda sebagai pejabat nih ya Pak Mindo, anda sebagai pejabat Eselon I wajar *nggak* sudah kuotanya turun, dipotong 10% menjadi diskresi Menteri, coba kira-kira gimana.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baik Bapak Pimpinan saya jelaskan....

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Ketua, Pak Ketua.

Mungkin Pak Dirjen menjelaskan historikal, tahun sekian dialokasikan sekian. Kenyataannya terabsorb terpakai sekian, harus mulai dari situ supaya informasinya lebih utuh buat kami ya.

Terima kasih.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baik, terima kasih.

Mungkin kami sampaikan Bapak Pimpinan bahwa 2019 itu berdasarkan RDKK usulan dari para petani itu kalau kita jumlahkan ada 22 juta ton Pak, ada 22 juta ton sehingga waktu itu kami mengusulkan ke Kementerian Keuangan lebih kurang Rp34Miliar *eh* Rp34Triliun, namun realisasinya itu hanya 9,2 juta ton dari 22 juta ton yang diusulkan oleh Petani berdasarkan RDKK. Kemudian 2020 ini yang diusulkan oleh RDKK oleh para petani adalah 16 juta ton, 16 juta ton sedangkan pupuk yang dialokasikan oleh Pemerintah ke kita itu hanya 7,9 juta ton turun dari 2019 sehingga untuk kekurangan 2020 ini kami sudah mengonsepan surat dari Bapak Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan untuk meminta tambahan kuota. Artinya apa bahwa apa yang diusulkan didalam RDKK itu ternyata serapannya itu tidak pernah melebihi dari 9,2 juta ton dalam 5 tahun terakhir, Bapak Pimpinan itu mungkin perlu kami jelaskan.

Kemudian tadi dipertanyakan bagaimana contoh Jawa Timur untuk memenuhi yang 40% itu bisa Pak tetap bisa dipenuhi oleh Pupuk Indonesia kalau misalnya penyalurannya melebihi dari kuota itu nanti akan dihitung di akhir tahun berdasarkan audit BPK, jadi nanti disana ada istilahnya kurang bayar Pak gitu Pak ya. Jadi kaitan dengan pupuk bersubsidi ini sangat elastis karena memang aturannya seperti itu, jadi kalau kelebihan penyaluran akan dihitung sebagai kurang bayar setelah diaudit oleh BPK.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Interupsi Ketua.

Tadi sudah disampaikan Pak Muhtarom maupun Pak Mindo dan terakhir saya semuanya dari Dapil VIII yang pada saat ini terjadi kelangkaan pupuk. Pernah saya dengar bahwa ini juga ada suatu sebab dari data BPN yang mendatakan sawah ini *tujuh belas juta tujuh ratus*, akhirnya 17 juta dan ini juga merupakan kebijakan dari Menteri Keuangan untuk menentukan subsidi pupuk itu, itu yang pertama. Kemudian Bapak juga menjelaskan walaupun mungkin ini juga kesalahan dari pada para Poktan dan Dirjen bahwa penyampaian RDKK itu terlambat, namun satu sisi Jawa Timur ini penyandang beras stok nasional Pak, apabila toh kesalahan seperti itu terjadi yang lain-lain dipotong 25% tapi Jawa Timur dipotong 45% lantas sekarang Bapak menjawab bisa diatasi dengan yang ada dulu, Bapak tidak mempertimbangkan semuanya rebutan Pupuk Pak. Inilah yang menjadi masalah kalau tidak segera diselesaikan secara kebijakan.

Terima kasih.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baik, terima kasih Bapak saya jelaskan.

Memang terdapat perubahan lahan baku sawah, jadi berdasarkan sensus pertanian 2012 itu 8,1 juta hektare, kemudian keputusan ATR BPN 2013 itu 7,75 juta hektare, kemudian 2018 7,125 juta hektare dan 2019 kemarin naik 380.000 hektare menjadi 7.463.948 hektare. Memang perhitungan 2019 ini yang Rp27,3Triliun dengan volume 8,8 juta ton itu acuannya adalah luas lahan baku sawah 7,125 sedangkan sekarang sudah 7,463 juta hektare Pak.

KETUA RAPAT:

Itu data dari siapa yang barusan anda sebutkan data dari BPN ATR?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

SK ATR BPN Pak, 7.463.948 hektare gitu ya. Kemudian mengapa Jawa Timur hanya 60% Pak ya mungkin bisa ditayangkan jadi tadi sudah saya jelaskan Bapak, sudah saya jelaskan bahwa e-RDKK itu kita tutup 19 Desember 2019 ini posisi yang ini ya Pak yang usulan RDKK bukan serapan, terus nah ini Pak. Ini daftar usulan daerah yang RDKK ini ya, ini RDKK ini untuk Jawa Timur per 19 Desember 2019 mengapa kami tutup 19 Desember 2019 tujuannya adalah 1 minggu untuk memberikan waktu validasi ditingkat Provinsi, 1 minggu Kabupaten, kemudian kalau sudah *clear* baru ditetapkan Menteri Pertanian di awal tahun Anggaran 2020. Untuk Jawa Timur, RDKK yang masuk ini usulan yang masuk untuk Urea itu 714.065 ton, SP36 261.559

ton, kemudian total pupuk ZA yang diusulkan 396.951 ton, NPK 746.124 ton, dan pupuk organik 802.702, sedangkan kalau kita jumlah berdasarkan e-RDKK yang masuk itu kebutuhannya 16.109.684 ton itu Pak ya. Alokasi pupuk yang disiapkan oleh Pemerintah itu disampingnya hanya 7.949.303 ton, bagaimana untuk mensimulasi angka ini sehingga kita menggunakan rumus usulan e-RDKK per jenis dibagi jumlah e-RDKK total dikalikan kuota 2020 sehingga dapatlah angka sesuai dengan lampiran Permentan 01 tahun 2020. Kalau ini kalau kemarin kita sudah diskusi dengan Kepala Dinas, kalau yang diusulkan Dinas Pertanian Jawa Timur waktu itu 4 juta ton untuk sesuai dengan RDKK yang kemarin disampaikan ke kami itu maka akan ketemu 2,6 juta ton untuk Jawa Timur artinya tidak akan kekurangan gitu Pak ya. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah setiap bulan tanggal 20 sampai tanggal 25 kami membuka sistem e-RDKK, disitulah kesempatan Dinas Pertanian untuk memasukkan e-RDKK - e-RDKK yang belum lengkap sehingga akan sesuai dengan kebutuhan. Hanya kami pesan ke seluruh Provinsi agar tidak melebihi penggunaan seperti tahun yang lalu, contoh Jawa Timur tahun lalu hanya 2,6 juta ton berarti tahun ini pun maksimal 2,6 juta ton, kira-kira seperti itu Pak. Jadi kekurangan e-RDKK - e-RDKK tersebut sekarang sedang kami rekap itulah yang akan kami usulkan ke Menteri Keuangan untuk tambahannya Pak, jadi jangan khawatir.

Kemudian yang kedua, kita punya aturan bahwa bisa realokasi antar Provinsi itu kewenangan Dirjen PSP gitu ya Kementerian Pertanian, contoh misalnya di Lampung tahun lalu 1000 ton sekarang teralokasi 1100 ton ya 100 ton itu bisa dialokasikan ke Provinsi lain misalnya, itu kewenangan Menteri Pertanian. Kemudian untuk realokasi antar Kabupaten itu ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi dan realokasi antar Desa Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, jadi saya pikir dalam alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi ini *insyaa Allah* tidak ada masalah dan akan selesai sesuai dengan harapan kita semua, itu Pak ya.

KETUA RAPAT:

Saudara Dirjen ini untuk lebih singkatnya ya, ini di print, dibagikan besok pagi ke Anggota. Jadi nanti kalau Anggota pulang ke Dapilnya ditanyakan, ini loh rumusnya.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Iya, sebetulnya sudah kita bagikan waktu...

KETUA RAPAT:

Ada?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Ada, sudah diterima.

KETUA RAPAT:

Sudah diterima?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Sudah, sudah Pak lengkap, sudah.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Nggih, silakan Pak.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Begini Pak, Bapak tadi bilang bisa menggunakan pupuk sebelum musim yang dimanfaatkan saat ini, itu kalau pupuknya ada.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Ada Pak.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Loh, ini karena disana itu benar-benar sudah ya apa ya pupuk *ndak* ada gitu loh. Makanya tolong saran bagaimana memaksimalkan peran KP3 nanti laporannya ke kita.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baik Pak.

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Nggih, terima kasih. Karena saya ini ya bingung ngomong Pak diwaktu reses dikejar oleh kelompok-kelompok tani ya saya tidak bisa ngomong akhirnya saya ya jawab sekenanya karena ada badai elnino dan lain sebagainya karena ya memang harus saya jawab sesuai dengan apa yang. Makanya ini tolong nanti hasil KP3 ini seperti apa, kemudian sebelum para petani perwakilan dari Jawa Timur belahan Barat ini ke Jakarta, ujung-ujungnya nanti kalau ke Jakarta juga kita-kita ini yang repot juga harus memfasilitasi.

Terima kasih.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baik, terima kasih Bapak mohon izin nanti, sedikit saja. Kalau misalnya ada Kecamatan yang memang Bapak temui pupuknya tidak ada mohon bisa di WA ke kami gitu Pak ya, nanti karena kami punya daftar distributor di setiap Kabupaten Kecamatan gitu nanti itu akan, contoh kemarin di Tulungagung hari ini langka tidak ada sebetulnya ada tapi hanya salah RDKK-nya belum sampai ke distributor paginya langsung dipenuhi seperti itu Pak ya, jadi tolong kalau misalnya ada....

F-PKB (H. MUHTAROM, S.Sos.):

Karena saya juga khawatir kalau ini petani dimainkan oleh distributor atau pihak pabrikan gitu loh, untuk menaikkan. Terima kasih.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baik, makanya kedepan insyaa Allah dari holding langsung ke itu ada wacana langsung ke Petani melalui BumDes gitu ya, mudah-mudahan itu bisa di ya. Baik kita lanjutkan.

Kemudian dari Pak Firman RJIT, jadi memang wilayah kita adalah untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier kalau primer, sekunder itu wilayahnya PUPR. Dan memang di sekunder ini banyak juga pendangkalan dan ketika kami mencoba menormalisasi itu tidak diperkenankan oleh BWS sehingga beritanya pun sampai ke pusat akhirnya ya kita biarkan gitu kita hanya wilayahnya adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier. Kemudian penggunaan ekskavator itu merupakan sekarang brigade di Provinsi jadi siapapun bisa menggunakan dan *alhamdulillah* di Pati ini sudah bisa digunakan multifungsi.

Kemudian pupuk organik kaitan dengan dari Pak Suhardi ini asuransi AOTP AOTS kaitan dengan klaim Pak, jadi ketika terjadi puso maka akan turun tim dari BPTP (Balai Proteksi Tanaman Pangan) jadi disana ada timnya, disana ada PUPT, ada petugas hama dan penyakit dan PBT yang akan melihat kerusakan tersebut. Jadi kalau sawah itu puso harus tingkat kerusakannya minimal 75% Pak, kemudian setelah itu dibuat berita acara dan dalam jangka waktu paling lambat 14% itu sudah diganti rugi oleh Asuransi Jasindo. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya biasanya para petani itu mengisi formulir dikumpulkan oleh kelompok tani kemudian dari kelompok tani ke dinas, kemudian dinas itu mengundang Jasindo dan biasanya melapor juga ke kami dan tim kami turun ke lapangan dan itu langsung akses ke Jasindo itu cara mendapatkannya. Kemudian tadi....

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sedikit Pak.

Kalau sapi itu mati diganti Pak ya, dengan sapi Pak?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Iya, *Nggak* bukan, uang Rp10.000.000,-.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Rp10.000.000,- saja? Oh.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Jadi kalau padi itu kerusakannya 75% itu diganti Rp6.000.000,- per hektare, kalau sapi, sapi mati diganti Rp10.000.000,- gitu ya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Mati, dicuri, boleh?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Iya, dicuri Rp7.000.000,- asalkan jangan pura-pura dicuri gitu ya. Kemudian dari Pak Fauzi Amro ini pengelolaan Alsintan UPJA kami sangat setuju dan memang kedepan konsep kami seperti itu sehingga siapapun bisa menggunakan.

Kemudian dari Pak Andi Akmal pupuk organik yang 300 M itu memang diambil dari cetak sawah, dasar pemikiran kami adalah yang pertama hasil kajian, yang pertama dulu, dulu ada Pak Hasan 2019 yang memang sangat menginginkan penggunaan pupuk organik. Kemudian yang kedua hasil kajian badan litbang pertanian bahwa sekitar 72% struktur tanah sawah lahan sawah itu sudah rusak. Kemudian yang ketiga ada program peningkatan produksi padi dan jagung tanaman pangan untuk meningkatkan provitas itu dilahan 1.484.469 hektare dimana disana hanya dibantu benih padi Pak, jadi kita kedepan mengarah ke tanaman organik sehingga pupuk organiknya diserahkan ke PSP. Jadi kalau 1.487.469 hektare rata-rata per hektare 4 liter maka akan ketemu 4 juta liter kira-kira perhitungannya seperti itu, namun demikian akan kami kaji ulang dan akan kami laporkan ke Pimpinan. Jadi alasannya mengapa itu ada pengadaan itu jadi riwayatnya seperti itu. Barangkali itu Bapak Pimpinan, lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Saya hanya ini saja Ketua untuk pupuk organik itu, mungkin kita dengarkan tadi alasannya Pak ya, cuma kan alasan itu ya bisa kita terima atau tidak tergantung dari dasarnya Pak sebenarnya karena kan mendadak nih kenapa *nggak* kemarin di masukkan gitu kan, nah tiba-tiba sekarang ini ya memangkas tadi untuk percontohan sawah dialihkan kesana. Niatnya sih baik Pak cuma ini agak-agak apa namanya, agak janggal saja. Yang kedua, walaupun Bapak kita tidak bisa hapus semuanya minimal dialihkan ke sektor yang lainnya Pak, kalau itu mungkin saya bisa menerima Pak kalau memang dialihkan ke irigasi tersier atau mungkin yang lainnya masyarakat langsung terima gitu Pak. Iya kan, karena apa-apa juga nanti akan kesulitan didalam bantuan ini kan pupuk organik ini mungkin nanti di dekon kan Pak ya. Nah ini cerita Pak kalau dana dekon ini bermasalah karena pengadaannya mohon maaf saja Provinsi maupun Kabupaten ini ya asal-asalan banyak yang petani sendiri tidak mau menerima gitu, jadi mungkin perlu dibuat sistem yang kuat Pak Dirjen yang memastikan bahwa kualitas dan jumlahnya juga betul-betul diterima oleh Petani kita Pak. Kalau niatnya semua membantu petani kita setuju Pak, cuma ini kan banyak pengalaman Pak di lapangan yang kita dapatkan gitu. Ya Pak Dirjen ya, jadi saya kira ini Pak Ketua belum mungkin dibahas dulu di internal besok atau lusa mungkin bisa disampaikan.

Terima kasih Pak Ketua.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak Mindo.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Saya mau dipendalaman lagi.

Bapak-bapak dari Kementerian Pertanian saya ingin kita menggunakan kosakata yang betul apa yang didefinisikan sebagai pupuk organik itu. Kalau pupuk itu kita artikan hara bisakah di *trace* hara nitrogennya berapa, hara fosfatnya berapa, hara kaliumnya berapa, hara apalagi yang ada yang dalam bentuk cair itu? Apakah dimaksudkan ini adalah aktivitas dari mikroorganisme yang membuat porositas tanah dengan penggemburan, carilah kosakata supaya orang-orang yang lulus dari sekolah Pertanian itu paham begitu. Kalau tidak nanti kita keliru saya kira mengatakan sudah salah lah yang dulu itu 3 periode yang lalu sudah salah pemakaian yang disebutkan POG (Pupuk Organik Granul), waktu saya usulkan itu sekali lagi yang

mengusulkan itu bukan Kementerian Pertanian loh, saya loh yang mengusulkan itu Saudara-saudara mungkin masih di Eselon III saat itu, itu bukan dari Kementerian Pertanian sama dengan pemakaian pupuk majemuk datangnya juga bukan dari Kementerian Pertanian, dari DPR sini. Dulu Alm. Pak Ato Suprpto penganut pupuk tunggal ya jadi yang mengintrodusir itu bukan Kementerian Pertanian tapi lahir Legislatif ini, saya ingin ingatkan kembali supaya tidak salah karena POG itu kita sudah salah, *nggak* bisa di *trace* yang disebutkan petroganik itu haranya *nggak* bisa di *trace* standar. Nah jangan kita buat salah lagi yang dalam bentuk cair ini, cari kosakata yang lain.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mindo atas masukannya yang baik.

Jadi begini Saudara Dirjen daripada menimbulkan masalah nanti, pulang di rundingkan dulu ya kalau memang terlalu besar volumenya ya dikurangkan kalau *nggak* baik ya dihilangkan gitu loh, iya kan. Kalau memang baik ya dilanjutkan tapi sesuai dengan tadi Pak Andi yang di Banggar, masukan Bapak Mindo dikaji ulang karena jangan sampai programnya baik tapi hasilnya tidak baik.

Selanjutnya Bapak Sekjen siapa lagi.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Dirjen PKH.

KETUA RAPAT:

Oh, iya.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bapak Ketua yang sangat kami hormati,
Bapak Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Sekjen yang kami hormati.

Kami ingin mencoba menjelaskan untuk Sulawesi Barat Pak, mohon ijin terkait dengan Sulawesi Barat bahwa kami sebenarnya sudah membantu tahun 2018 ya Pak, sebanyak 250 ekor itu. Kemudian untuk Pak Andi Akmal, terima kasih masukannya. Sebenarnya terkait pertanyaan Bapak, apakah kita yakin bisa mengadakan sapi 10 ribu, kami sebenarnya sangat yakin, kenapa? Karena kami tahu potensi di masing-masing negara, potensi populasi. Dan kami sudah melakukan komunikasi, permasalahannya kalau kita mengadakan 10 ribu memang harus lelang terbuka. Nah, di lelang terbuka itu kami sebenarnya tidak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, biasanya

terjadi kegagalan itu adalah pada pihak penyedia, akhirnya di tengah jalan mereka tidak mampu mengadakan itu, entah bagaimana kami tidak mengerti. Nah, disitu kegagalannya padahal sapinya ada. Itu yang bisa kami jelaskan terkait.

Terus dari Bapak Fakhry ya, saya kira Bapak Fakhry kami sudah bicarakan terkait dengan bantuan. Kami selalu lupa Aceh Selatan, tetapi sebenarnya yang kami selalu ingat adalah Bener Meriah, kami mohon maaf itu Pak, karena wajahnya selalu Meriah Pak. Jadi terus terang Pak, untuk Aceh dari Bapak Muslim kami sebenarnya sudah mendorong terbangunnya pabrik pakan ternak yang dibangun oleh perusahaan dari Korea bekerja sama dengan Pemda Aceh, namanya PT. Golden Daru Utama itu sedang jalan sebenarnya tapi masih tertatih-tatih. Artinya, kita sedang dorong itu Pak. Mereka sekarang sedang menanam jagung sendiri 50 ribu hektar, data yang kami dapatkan itu. Kemudian karena ada beberapa bahan pakan yang mereka butuhkan perlu masuk, nah itu hasil jagungnya mereka mengoper ke tempat lain. Kami sudah kroscek baik.

Nah, untuk dari Lombok itu saya terus terang saya 5 tahun tugas di Lombok Pak. Saya malu sekali tadi dibilang tidak ada membantu NTB, setelah saya cek NTB ini direkaman data kami, terus kami kroscek dengan Kepala Dinas Provinsi NTB jadi di 2016 mendapatkan bantuan 736 ekor sapi. Kemudian 2017 mendapatkan 75 ekor sapi, kerbau 20 Pak. Kemudian untuk tahun 2018 dapat 60 ekor sapi plus 16 ekor kerbau. 2019 mendapatkan 220 ekor sapi, tahun 2020 kami sudah rencanakan disini bahwa indukan impor 375 ekor, sapi lokal 60 ekor, kerbau 30 ekor dan ayam lokal 8500 ekor. Artinya dari tahun ke tahun tidak pernah....

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu adalah lamanya dukungan infrastruktur peternakan. Kalau ekor-ekor itu memang tradisi kami beternak, tetapi bagaimana pasca panennya. Rumah potong Pak, saya jangan bicara Lombok, saya Sumbawa. Sumbawa itu tradisi beternaknya sangat kuat, nah dukungan infrastruktur misalnya rumah potong, misalnya pakannya, kalau ekor-ekor itu banyak kami. Jadi seperti itu, seperti misalnya kita sama-sama ke Aceh kemarin, bukan saya iri sama Aceh. Di sana itu proyeknya Pemerintah, di buatlah gudang kandang besar, itu sapinya Pemerintah. Nah, di Sumbawa itu Pak, sapinya sapi rakyat. Maksud saya fasilitaslah sapi yang memang ada milik masyarakat itu agar dia memiliki nilai tambah.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Terima kasih Pak.

Saya kira kami akan catat, karena terus terang saja mendirikan RPH banyak sekali kendalanya, karena banyak RPH dibangun tetapi tidak

berfungsi. Terus terang saja seperti ada beberapa hal kami dikritik juga oleh Bapak Ketua Komisi.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Makanya coba bangun di Sumbawa jangan bangun RPH di tempat tidak ada ternak. Di Sumbawa itu tradisi beternaknya itu kuat Pak, coba perbaiki, kalau misalnya tidak bisa kita mohon maaf Bapak Ketua, langsung interaktif. Misalnya di Sumbawa tidak usah bangun RPH baru Pak, tambah mesin saja yang berskala industry misalnya, biar kita itu tidak lagi sekedar membuat kornet saja kita kirim daging kita ke Probolinggo. Kalau misalnya ada di RPH yang dikelola oleh Dinas setempat itu dibangun pabriknya yang bagus, dikasih fasilitas kandangnya yang bagus, kasih RPH yang bagus kan kita bisa naik. Karena di Jakarta ini daging Sumbawa dengan merk daging organic, karena memang sapiunya itu dilepas tidak dikandang. Jadi tolong difasilitasi soal infrastrukturnya Pak, bukan jumlah soal ekornya. Ya, kalau Bapak kurang nanti kita pasok kalau soal ekor.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak Ketut, kesimpulannya ini jangan hanya memberikan bantuan sapiunya tetapi infrastrukturnya. Termasuk juga misalnya pelatihannya, Bapak Ketut ini mungkin ngasih sapi mungkin sudah puluhan ribu, sudah kelaut semua Pak. Cobalah evaluasi, baik yang impor di Lampung, di mana, kelaut itu loh. Jadi memberikan bantuan harus tepat jangan sampai memberikan bantuan 3 bulan kelaut. Karena jaman dulu saya masih ingat ada rental sapi Pak, termasuk di Komisi IV DPR RI, mana Bapak Mindo ada Sensus Sapi, ingat tidak? Sapi di Sensus dari kecamatan ini besok tukang Sensusnya pindahnya, sapiunya juga pindah.

Yang penting Bapak Ketut adalah nanti sajikan dulu datanya berapa jumlah sapi potong, berapa sapi betina produktif, berapa sapi jantan, dan berapa daging yang diimpor. Saya kalau ditanya setuju tidak daging impor, saya tidak setuju karena tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak ada keuntungan untuk rakyat. Saya lebih suka sapiunya dipotong di Indonesia, betul tidak begitu? Jadi nanti itu tolong disajikan data dulu, saya minta persetujuan apa kita Ishoma 30 menit atau bagaimana.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Lanjut saja Pak Ketua, Magrib masih lama, magribnya masih 18 menit lagi.

KETUA RAPAT:

Oke, lanjut Pak Ketut.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Mohon maaf, kami ijin melanjutkan.

Terkait dengan RPH sebenarnya seleksinya sangat ketat itu, karena anggaran kami sangat kecil dan kami harus memenuhi 34 provinsi, 540 kabupaten. Tentu dengan hasil evaluasi yang kami lakukan banyak juga RPH-RPH setelah kami bangun ternyata mangkrak.

KETUA RAPAT:

Banyak?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Artinya lebih dari 2 bijilah begitu.

KETUA RAPAT:

Tadi Bapak bilang banyak, sekarang lebih dari 2 biji bagaimana sih, sekarang jumlah RPH di Indonesia ada berapa, berapa banyak yang jalan, berapa banyak yang macet, berapa banyak yang mangkrak. Tadi Bapak bilang katanya banyak pertama, terus saya tanya jawabnya 2 lebihlah.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Maksudnya begini Pak Ketua, mohon maaf artinya banyak itu nanti kami akan tampilkan datanya. Kami intinya kami membangun RPH itu kami evaluasi Pak.

KETUA RAPAT:

Saya setuju, membangun RPH itu harus dengan tepat lokasi, bermanfaat, berguna dan yang paling penting adalah siapa yang bertanggungjawab atas kelangsungan jalannya RPH tersebut. Itu di Lampung ada berapa satu atau dua yang macet Pak Ketut? Tidak tahu Pak Ketut.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Yang macet ada.

KETUA RAPAT:

Ada berapa di Lampung semua jumlah RPH?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Kami lihat disana ada macet satu.

KETUA RAPAT:

Dimana?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Yang di daerah Lampung kalau tidak salah Lampung Timur itu ya.

KETUA RAPAT:

Lanjutkan saja pertanyaan yang jawaban Anggota.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Interupsi Ketua, sedikit saja Ketua, mengingatkan.

Kunjungan spesifik kita Bapak Ketua, sudah janji di Gunung Kidul dipimpin Bapak Budi.

KETUA RAPAT:

Jangan saya, bukan saya yang mimpin, Bapak Budi yang mimpin.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bapak Budi yang mimpin dihadiri Bapak Ketua, kami juga ikut hadir, serta Bapak Ketut ikut hadir. Karena anggaran terbatas kita sudah janji akan dibangun disana, ini Ketua sekedar mengingatkan. Jangan nanti dibilang Ketua Komisi itu dan Pimpinan Bapak Budi hanya janji-janji doang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bapak Salim, waktu itu saya mengusulkan, itu bukan usulan, itu permintaan Ibu Bupati. Bahwa mereka minta dibangun RPH, tetapi bisa dikaji dong, skalanya skalanya seberapa. Apa skalanya 100 meter, 200 meter atau 2 hektar, berapa hektar ya silakan dikaji. Itu atas permintaan Bupati yang pertama.

Yang kedua, mereka minta ganti sapi yang mati karena antrak kurang lebih 74 atau 76 ekor. Waktu itu, Kepala Badan Karantina mengatakan yang mewakili Bapak Ketut yang katanya lagi sakit di rumah sakit. Siap, saya langsung yang bertanggungjawab. Nah, itu dialokasikan juga Pak, jangan nanti alokasinya tidak cukup. Kalau sampai begini saya jamin hubungan kita tidak bakal baik ini. Karena yang menjawab Eselon I loh, bukan saya yang menjawab, yang menjawab eselon I waktu itu. Bagaimana Bapak Ketut?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Mohon ijin, kami sudah presentasikan tadi khusus....

KETUA RAPAT:

75 ekor itu diganti?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Mohon ijin Pak, untuk RPH-nya kami sudah sediakan sarana prasarannya. Kami sudah komunikasi dengan Dinas Gunung Kidul, dan kami sudah presentasikan tadi Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, itu yang nanya lagi, kenapa dia nanya lagi itu?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Saya tidak paham.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Kami mengingatkan Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya rasa begini maksudnya, ini kok di Gunung Kidul dibangun di tempat kampung saya tidak dibangun, gitu ya maksudnya? Sudah, beliau sudah menjadi sudah pastilah. Kalau sampai tidak disetujui ya berarti mereka cari perkara dengan kita, karena yang menjawab pejabat Eselon I dari Kementerian bukan kita yang menjawab. Jadi kalau anda mau meminta bangun di kampung anda, Bapak Salim ngomong saja jangan pakai muter-muter kesana-sini tidak usah.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Bapak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Tadi Bapak Ketut sudah jawab belum itu rencana indukan 10 ribu ekor Pak, rencananya 2020 ada anggarannya ya, itu bisa atau tidak, jangan seperti kemarin PHP. Kita sudah janji sama masyarakat akan ada indukan dari luar ternyata tidak ada realisasi indukan. Ada kandangnya bahkan kita sudah bikin, tapi tidak ada sapi indukan dari luar gitu. Itu yang pertama Bapak Ketut.

Yang kedua, sebenarnya saya miris Pak, melihat Bapak ini bantuan untuk ayam. Saya melihat ini yang kemarin 2019 sebelum kampanye bagi-bagi ayam. Kementerian Sosial tapi yang bagi-bagi Cuma saya tidak tahu ayamnya dari mana. Nah, Bapak Ketut saya berharap ini hanya Bapak disini anggaran 65 ribu ayam, Cuma Rp3 miliar. Harusnya ini diperbanyak itu adalah ayamnya harusnya, sehingga Anggota ini bisa membagi-bagi 10 ribu ekor ayam di Dapilnya masing-masing kan luar biasa Pak. Nah, inikan saya kira luar biasa itu, kecil tapi satu rumah satu ayam kita bagikan luar biasa. Pak Ketut, jadi jangan hanya 60 ribu ini Pak, haduh Rp3 miliar ini Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Andi, ini ayam apa, ayam bekerja itu?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Lain Pak, dengan yang Menteri Sosial beda.

KETUA RAPAT:

Pak Andi, saya hanya menjelaskan waktu itu ada istilah ayam bekerja. Setiap kepala rumah tangga dikasih berapa ekor, dikasih kandang, dikasih pakan, *alhamdulillah* 4 bulan kemudian bulunya pun sudah tidak ada. Maka itulah yang saya mintakan jangan dilanjutkan, kenapa tidak diganti dengan domba atau kambing. Begitu Bapak Andi.

Jawab saja yang 10 ribu.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Mohon ijin Bapak Ketua, tadi sebenarnya kami sudah jelaskan. Untuk 10 ribu kami sebenarnya optimis, sangat optimis melihat potensi di Australia, karena pemasok sapi Itu yang paling potensi adalah Australia.

KETUA RAPAT:

Karena Bapak temannya orang Australia ya Pak.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Mohon maaf Pak, artinya kami yang paling dekat dan paling anu di Australia, kalau kami tunjuk dan memungkinkan yang paling mungkin ya dari Australia.

KETUA RAPAT:

Tolong Pak, ini ada Pimpinan Pak, pakai mic Pak.
Jadi bisa pak Ketut?

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Dari potensi kami melihat bisa dan yakin tetapi karena ini adalah lelang, jadi yang memenangkan lelang atau tidak itu bukan kami, tetapi tim lelang. Nah, ketika tim lelang sudah pemenangnya melaksanakan akhirnya gagal ya kami bagaimana caranya mengendalikan.

KETUA RAPAT:

Jadi teman-teman sudah jangan berharap, sudah gitu saja, jawaban singkatnya jangan berharap nanti ada bantuan sapi ke rakyat. Karena kalau kita lihat begini, gini saja seandainya tahun ini gagal lagi, tidak berhasil, ya sudah tahun 2021 kalau perlu anggarannya kita bikin nol tidak usah pusing kita, berarti kan tidak konsekuen.

Saya juga sudah diomelin sama rakyat saya, saya sudah bikin kandang, sudah bikin apa, saya bilang “ya, sudahlah kalau sudah ada kandang sapi, besok saya beliin ayam, taruh saja ayam saja di kandang sapi kan sama juga”. Jadi Bapak Ketut tidak perlu dijelaskan lagi, semakin dijawab saya semakin bingung, saya stress, saya takutnya nanti saya tambah emosi.

Sudah Bapak Sekjen siapa yang terakhir?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Kepala Badan BPPSDMP.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Tadi belum dijelaskan oleh Bapak Ketut mengenai hasil inovasi, hasil dari balai-balai penelitian.

DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Dr. drh. I KETUT DIARMITA, M.P.):

Bukan di kami Ibu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Bukan, dari balai-balai penelitian yang ada di

KETUA RAPAT:

Ya, sudah nanti anggap saja nanti ke balai nikah saja sudah.

Silakan waktu sudah semakin mepet, lanjut.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Kepala Badan BPPSDMP.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Terima kasih.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI.

Ada beberapa pertanyaan terkait dengan BPSDMP, pertama kostra tani, kedua petani milenial, ketiga penyuluh, kemudian empat kegiatan sistem penyuluhan dan lima mengenai di Banten.

Jadi kostra tani itu sebenarnya istilah baru tapi intinya itu optimalisasi BPP. Mungkin itu yang paling pas barangkali istilahnya optimalisasi BPP. Yang dioptimalkan itu adalah BPP-nya dan penyuluhnya. Nah, jadi pertama tentu kantornya diperbaiki, kemudian sarananya juga ditambah, kemudian penyuluhnya ditingkatkan kapasitasnya dan diberdayakan tenaganya melalui optimalisasi BPP itu. Jadi nanti konsepnya seluruh program Kementerian Pertanian itu nanti pelaksana utamanya adalah penyuluh.

Mengenai petani milenial sebenarnya itu memang petani muda, umurnya 19-39 tahun.

KETUA RAPAT:

Ini masih 39 tahun berarti masuk.

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):**

Iya berarti masuk pak.

Nah, jadi BPPSDMP itu mempunyai 3 kegiatan utama, pertama adalah pendidikan, kedua pelatihan dan ketiga penyuluhan. Pendidikan kami punya 10 UPT Pak, 7 UPT itu Poli Teknik pembangunan pertanian. *Output*-nya ya petani milenial itu, karena *output*-nya utamanya *job creator* dan tentu ada juga *job seekers*. Nah, ini termasuk katagori petani milenial. Kemudian juga pelatihan kami itu mempunyai 10 UPT juga Pak, nah itu juga mendidik terutama....

KETUA RAPAT:

Pertanyaan saya Pak, pernah ada tidak petani milenial dulu?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Dulu tidak ada Pak, istilah itu.

KETUA RAPAT:

Siapa yang bilang tidak ada? Yang bilang tidak ada siapa? Pernah dicanangkan oleh Amran Sulaeman di Lampung. Jadi kalau anda bilang tidak ada itu anda salah. Saya ikut menyaksikan pada waktu itu seorang anak muda dikasih kain tapis dipakein “andalah yang kami harapkan untuk menjadi motornya petani milenial”, kalau mau videonya saya kasih kepada Bapak nanti. Jangan bilang tidak ada Pak, kita harus transparan. Saya tidak suka ada kebohongan.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Setahu saya dulu-dulu sekali Pak, jadi....

KETUA RAPAT:

Belum lama, baru 2 tahun lalu Pak.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Ya, betul Pak, mohon maaf ya.

Nah, termasuk disini ada juga magang untuk petani milenial ke Jepang dan Taiwan. Kepada Jepang sudah lama, itu sejak 1984 dan kalau ke Taiwan baru tahun lalu. Ini juga *output*-nya adalah petani milenial Pak, kemudian penyuluhan yang ada di BPP juga nanti diarahkan untuk menghasilkan petani milenial juga.

Kemudian terkait dengan penyuluh tentang statusnya BOP, honor dan sebagainya sudah dijelaskan oleh Bapak Sekjen. Jadi saya kira saya tidak akan mengulang. Kemudian kegiatan sistem penyuluhan, pelatihan yang ditanyakan oleh Bapak Wakil Ketua, sebetulnya itu resume saja. Jadi yang disebut sistem penyuluhan pelatihan itu sebetulnya kegiatannya penyuluhan, kemudian kegiatannya pelatihan, kemudian ada satu lagi manajemen. Jadi digabung itu Pak, 3 kegiatan jadi 1 kemudian pendidikan. Jadi seolah-olah ada 2 kegiatan, padahal yang nomor 1 itu gabungan. Penyuluhan misalnya 630 miliar Bapak Budi, tapi sebetulnya itu 411 miliar diantaranya adalah honor THLTBPP dan BOP. Nah, sisanya baru untuk kegiatan penyelenggaraan penyuluhan.

Nah, kemudian terkait dengan Banten itu ada

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDI SATRIO DJIWANDONO):

Pak, maaf coba bisa dijelaskan ini penumbuhan Posluhdes pendukung petani milenial 3000 unit Pak. Terus disebelahnya penumbuhan dan penguatan P4S mendukung petani milenial dan ekspor. Bapak tadi bilang ini penyuluhan dan pelatihan itu, ini apa bedanya Pak, coba dijelaskan Pak.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Sasarannya Pak, jadi objeknya kalau pelatihan itu objeknya P4S. Jadi P4S itu sebetulnya ya dia itu penyuluh syadaya tetapi dia juga petani. Dan umumnya memang muda Pak, umurnya muda, kenapa? Karena memang ini yang paling mudah untuk diresonansi sehingga cepat menjadi petani milenial bahkan petani pengusaha milenial Pak.

Sedangkan penyuluhan itu orientasinya Posluhdes, jadi memang target kita sebetulnya satu desa, satu penyuluh meskipun saat ini belum tercapai tetapi tetap kita garap kearah sana dengan memperkuat di desa-desa itu ada Posluhdes. Jadi itu Pak, mohon maaf ini ada beberapa memang yang digabung-gabung begitu Pak.

Kemudian di Banten, ada UPT kita baru tahun lalu. Itu memang sedang ada pembangunan fisik sebesar kurang lebih 98 miliar untuk *teaching factory*. Nah, karena PEPI itu....

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-P. GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Apa PEPI itu?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Poli Tehnik Engineering Pertanian Indonesia.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bertaraf?

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN (Prof. Dr. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Bertaraf internasional nih target kita, kenapa? Karena kurikulumnya kemudian juga nanti pengajar-pengajarnya juga harus bertaraf internasional, kita arahkan kesana. Nah, saat ini sedang membangun *teaching factory*

berupa bengkel-bengkel dan peralatan bengkel-bengkel tersebut. Nah, totalnya ada 98 miliar. Jadi ini adalah salah satu kegiatan UPT kita yang ada di Serpong di Banten.

Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi kenapa tadi saya katakan ada, ini masih ada videonya sama saya. Waktu pelantikannya ada videonya, bahkan sambutan yang diangkat jadi Ketua Petani Milenial ada sambutannya. Ingatan saya ini cukup lumayan walaupun saya sudah tua Pak. Kalau diruangan ini sudah tua, kalau diruangan lain beda lagi.

Bapak Daniel mau menambahkan, silakan Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Seluruh sahabat Komisi IV DPR RI,
Bapak Sekjen dan Bapak Dirjen.

Jadi ada beberapa penegasan ya, supaya mudah-mudahan kedepannya kita tidak terlalu berlarut-larut seperti beberapa kali ini. Sebelum kesana saya ingin ini Pak, untuk peternakan saya masalah virus babi yang kemarin aksi segitu besar, khususnya daerah Sumut dan Bali. Bahwa saya mendapatkan banyak masukan langkah penanggulangan yang sudah diambil itu masih sangat lemah. Baik dalam konteks sosialisasi kepada masyarakat maupun peternak termasuk anggaran yang kurang. Karena di beberapa tempat termasuk di Sumut itu yang sudah kandangnya dikosongkan mereka isi lagi dengan babi dan mati lagi terkena virus. Jadi mohon benar-benar segera diatasi persoalan virus ini secara efektif dan ada dukungan anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat secara cepat. Termasuk yang di Bali, karena sampai sekarang pun secara resmi belum diputuskan itu, apakah ini statusnya ASF atau bukan, itu harus segera karena ternak babi itu salah satu berperan strategis bagi perekonomian Bali ya.

Yang kedua adalah kami minta agar program kostra tani termasuk cadangan pupuk yang memang belum kita bahas persetujuan secara khusus itu bisa dievaluasi ulang, bisa dialokasikan kepada yang lain untuk merespon apa yang menjadi penekanan fokus dari seluruh Anggota ini, baik untuk irigasi, baik untuk jalan tani, baik untuk memenuhi penyuluh desa yang target satu desa, termasuk yang paling penting juga persoalan sosialisasi yang bisa meningkatkan pangan Indonesia semakin baik.

Mungkin itu saja Bapak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup, apa kita langsung bikin kesimpulan agar jangan *break* atau kita *break*. Saya menerima masukan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Lanjut saja Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke.

Terima kasih kepada Eselon I Kementerian Pertanian yang telah menyampaikan jawabannya, baik jawabannya benar maupun agak kurang benar sedikit.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Dari dialog diskusi saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI, sebelum acara ini kita akhiri kami akan bacakan rancangan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, Tayangkan. Tolong Anggota diperhatikan supaya jangan berkali-kali saya bacanya nanti.

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang telah dilakukan sebelum diajukan kembali di tahun selanjutnya, antara lain program bekerja, serasi, optimalisasi lahan rawa dan penerapan cetak sawah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI menolak program dan kegiatan yang telah gagal dijalankan pada tahun sebelumnya.

Kami kami anggap bekerja serasi dan lain-lain ini gagal.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Mohon ijin untuk serasi dengan optimalisasi lahan rawa sama, apa salah satu saja, redanden itu.

KETUA RAPAT:

Optimalisasi dihapus.

Pemerintah setuju?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (Ir. SARWO EDHY, S.P., M.M.)

Mohon ijin Bapak Pimpinan, kalau Serasi sih sebagian besar jalan sih Pak, artinya dari IP satu menjadi IP dua itu, artinya bisa dioptimalkan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ini evaluasinya, kalau gagal tidak dijalankan.

Ya baik, setuju Bapak.

KETUA RAPAT:

Bapak Sarwo Edhy nampaknya sudah mulai capek dan ngantuk.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan revisi atas rencana program dan kegiatan serta perubahan komposisi pagu anggaran tahun 2020 kepada program yang menitik beratkan dan bermanfaat langsung kepada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan daerah salah satunya perbaikan infrastruktur pertanian, pengadaan sarana dan prasarana pertanian serta menghindari penggunaan istilah baru yang berlebihan.

Anggota?

Pemerintah?

Jangan bingung Pak, ini waktu berjalan terus ini.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Menghindari penggunaan istilah baru yang berlebihan.

KETUA RAPAT:

Ini Anggota sudah setuju, terserah Pemerintah tidak setuju, atau saya kasih jalan tengah, "menghindari penggunaan istilah baru".

Setuju?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Oh, ya sudah Pak, yang tadi saja ini lebih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar meningkatkan jumlah penyuluh untuk memenuhi kebutuhan satu desa satu penyuluh, melalui pengangkatan tenaga honorer atau fasilitator lainnya menjadi ASN serta memperkuat sarana dan prasarana penyuluhan yang sudah ada sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Misalnya yang tadi ada istilah inilah, itulah tidak usah yang penting perbaiki dulu kantor BPP-nya, kalau memang diperlukan komputer seperti jaman Bapak momon pengadaannya ya silakan, tapi tidak usah pakai berlebihan, milenial, inilah, itulah, tidak usahlah.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Mohon ijin Pak, pengangkatan tenaga honorer itu tidak boleh, sehingga kami mengantisipasinya yang ada memang kita perjuangkan ASN, yang kosong mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan itu bisa melalui penyuluh swadaya, sehingga kita akan berorientasi kepada pemberdayaan penyuluh swadaya. Kalau mengangkat tenaga honorer uangnya pun dari mana.

KETUA RAPAT:

Ya sudah dirubah saja.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Jadi melalui pemberdayaan penyuluh swadaya bukan pengangkatan, penumbuhan penyuluh swadaya.

KETUA RAPAT:

Memangnya penyuluh tumbuh?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Kalau dibayar bukan penyuluh swadaya lagi, tetapi kita perjuangkan melalui bantuan operasional penyuluhnya dan itu sudah kita lakukan, kalau honor tidak boleh.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ijin Bapak Sekjen.

KETUA RAPAT:

Ijinnya kesini bukan kesana.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ijin Ketua, maafkan. Ijinkan ketua?

Terima kasih Ketua.

Bapak Sekjen, saya ingin menyampaikan bahwa memang ini penyuluh di seluruh Provinsi memang sudah terbentuk dan rata-rata ada 10-15 tahun mereka sudah menjadi penyuluh. Ini untuk penyuluh swadaya ini nanti standarisasinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, yang saya tahu juga penyuluh yang ada sekarang juga ada yang belum dibayarkan juga ini Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Insyah Allah yang terdata di BPPSDMP di Kementerian Pertanian pasti terbayarkan Kalau tidak mohon diinfokan Ibu. Memang yang 2020 belum dibayar yang SK-nya, karena kami itu *insyallah* datanya tertib yang diangkat tahun 2007, 2008, 2009 yang tidak terputus itu diperjuangkan. Karena untuk menjadi P3K minimal 5 tahun berturut-turut tidak boleh ada jeda dengan latar belakang pendidikan tertentu itu ada ketentuannya mengacu kepada Menteri Penertiban Aparatur Negara Bu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Bapak Sekjen, Anggota dibaca nomor 3 sudah jelas.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Interupsi Ketua, Azikin.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Azikin.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Saya mengusulkan Ketua, agar ASN itu menjadi ASN, P3K (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak), karena apabila ada penyuluh sudah melewati umur yang tidak bisa diangkat lagi sebagai ASN, maka dia angkat sebagai P3K. Itu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi yang P3K itu digaris miring atau buka itu dikasih singkatannya supaya jelas, karena ini menjadi dokumen negara.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Ketua, ada ralat supaya kalimatnya tujuannya sudah benar tapi kalimatnya mohon ijin diperbaiki. Jadi satu desa satu penyuluh melalui peningkatan jumlah penyuluh swadaya, atau pengangkatan THLTB lingkup pertanian menjadi ASN P3K, itu lebih tepat ya Pak ya. Menjadi ASN P3K, memang ASN itu ada dua, ada PNS dan ada P3K, ASN-P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Mohon ijin Bapak Azikin barangkali maksudnya itu ya.

Baik, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kok P3K-nya ada dua itu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Pak Ketua, kalau begitu THLTB-nya harus diberi singkatan juga dalam kurung tenaga honorer....

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Setelah THLTB (Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu).

KETUA RAPAT:

Anggota sudah baca?

Pemerintah sudah baca?

Saya ulangi.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar meningkatkan jumlah penyuluh untuk memenuhi kebutuhan satu desa satu penyuluh, melalui peningkatan jumlah penyuluh swadaya atau pengangkatan THLTB (Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu) lingkup pertanian menjadi ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta memperkuat sarana dan prasarana penyuluhan yang sudah ada sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Tapi ini yang tidak dipikirkan oleh Eselon I di depan ini mengenai penjaga pintu air, siapa yang memikirkan. Coba, digaji tidak sama Pemerintah, sementara kalau ada yang tidak kebagian air mereka bacok-bacokan menyalahkan siapa. Yang disalahkan adalah penjaga pintu airnya, coba dipikirkan. Saya tidak perlu jawaban sekarang, pikirkan jalan keluarnya apa, mereka hanya mendapatkan belas kasihan dari pemilik sawah atau biasanya dapat bantuan operasional dari kabupaten. Ini yang tolong dipikirkan, mereka itu ujung tombak yang mengatur aliran air ke sawah-sawah.

4. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk merealokasi anggaran dan kuota pupuk bersubsidi dengan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi dan meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2020 untuk memberikan kepastian pemenuhan pupuk sesuai kebutuhan petani.

Anggota?

Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Setuju sekali.

KETUA RAPAT:

Tapi ini nanti tidak ada diskresi Menteri ya, kalau perlu kami cantumkan dalam keputusan rapat ini. Nanti pada waktu Rapat Kerja ada keputusan itu.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan laporan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan diserahkan sebelum Rapat Kerja selanjutnya.

Jadi kita mengevaluasi dulu apa yang tidak baik, apa yang baik.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Pokoknya dicantumkan saja Ketua, tahun berapa dulu, ya cantumkan tahun 2019 sebelumnya kan banyak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

2019, sebelumnya dibuang dan diserahkan sebelum Rapat Kerja....

KETUA RAPAT:

Selanjutnya.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Yang sebelumnya jelek tidak dievaluasi lagi?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Tidak, 2019 saja Ibu.

KETUA RAPAT:

Nanti Ibu mintanya tahun 1945, repot juga kita.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, saya.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya usul 2015-2019 biar ketahuan bahwa ini yang ada progresnya begitu kelihatannya. Kalau saya usulnya begitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, sudah itu lebih baik supaya misalnya ada kebijakan periode lalu yang tidak baik akan kita perbaiki pada tahun 2019-2024. Dibaca dulu Pemerintah.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Pak Ketua, mungkin perlu tahun anggaran.

KETUA RAPAT:

Tidak usah, evaluasi kinerja sudah cukup.

Pemerintah? Kenapa melamun Bapak Momon.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Sudah, setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menyerahkan data stok dan kebutuhan daging nasional, data impor daging, data populasi sapi nasional, baik lokal maupun sapi impor serta data negara yang bebas dari Penyakit mulut dan kuku/PMK.

Anggota?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ijin Ketua, ditambah batas waktu mungkin Ketua, diserahkan kapan datanya?

KETUA RAPAT:

Itu segera, sebelum Rapat Kerja yang akan datang.
Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji kembali rencana program wajib ekspor bawang merah dan impor bawang putih.

Ini saya kasihan benar lihat Bapak Menteri, Bapak Limpo ini, waktu Rakernis atau Rakernas di Bidakara “gampang, setiap importir 1 ton bawang putih wajib ekspor bawang merah 3 ton”. Betul tidak begitu, betul tidak ada kata-kata itu? di Medsos ada ini, di beritanya ada.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Di ini tidak ada Pak, kami untuk wajib ekspor bawang merah tidak ada Pak.

KETUA RAPAT:

Itu masuk di berita Detik.com, Bapak tahu. Maka saya berpikir ini yang salah siapa? Karena setahu saya produksi bawang merah di Indonesia itu kurang lebih 1,5 juta ton. Kalau 1 ton bawang putih, misalnya impornya 500 ribu ton bawang putih harus diekspor 1,5 juta ton bawang merah. Yang menjadi pertanyaan mampukah harga kita bersaing dengan Philipina, dengan Vietnam, dengan Laos, dengan Thailand. Saya sangat paham Pak, musim kita dengan mereka berbeda. Di Detik.com ada ini nanti ayu kirim.

F-PDIP (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (ALIEN MUS, S.H.):

Ijin, importir ini importir bawang putih kan. Tadikan sebelum itu sudah dibahas tapi saya juga ingin mengetahui apa kriteria importir bawang putih yang dapat rekomendasi impor Pak.

KETUA RAPAT:

Boleh tidak nanti saya selesaikan dulu, kesimpulan nanti pertanyaannya dijawab oleh Dirjen. Boleh tidak? Kalau tidak boleh ya harus boleh. Yang nomor 7 sudah setuju Pemerintah?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Mohon ijin Bapak Ketua, jadi di dalam kami mengeluarkan RIPH ini tidak mempersyaratkan wajib ekspor bawang merah ini tidak ada dalam persyaratan itu Pak.

KETUA RAPAT:

Tetapi di dalam beritanya itu ayu kirim.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Resminya tidak ada, mohon ijin Bapak Ketua.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Ya, kalau tidak ada didrop saja Pak, kenapa harus dimasukkan kesimpulan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Tidak ada, Mohon ijin Bapak Ketua.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Pak Dirjen, itu ada tidak kewajiban itu?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Tidak ada Pak.

KETUA RAPAT:

Anda interupsi melalui Pimpinan.

Syarat impor bawang putih harus ekspor bawang merah di nilai tidak realistis, ini beritanya Detik.com.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Di kami mohon ijin Bapak Ketua, jadi tidak ada surat, tidak ada arahan atau apapun terkait dengan ekspor bawang merah ini, tidak ada Pak.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Ijin Ketua, kalau berita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita Rapat Kerja hari ini minta pertanggungjawabannya

KETUA RAPAT:

Ya, kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti anda ngomong bikin protes ke Detik.com jangan ke saya.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Nah, itukan berita, inikan kita ngomong sama orangnya.

KETUA RAPAT:

Anda protesnya ke Detik.com bukan kepada saya.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Artinya, kita hari ini Rapat Kerja Ketua kan bicara itu.

KETUA RAPAT:

Ini bukan Rapat Kerja, ini Rapat Dengar Pendapat.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Rapat Dengar Pendapat kita tanya kepada Dirjennya tidak ada, inikan faktual.

KETUA RAPAT:

Ya sudah gini saja, saya tahu anda membela partai anda saya tahu. Saya paham hal itu, ya tapi kalau kita ngomong realita. "Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali rencana program wajib tanam sebelum atau sesudah RIPH keluar".

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Kalau itu masih logis Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan masih logis, memang harus begitu. Nanti kalau saya buka semua nanti masalahnya jadi lebar ini. Diganti dulu deh, karena perlu kajian yang dalam. Yang periode lalu sebelum RIPH keluar wajib tanam, kemudian Cuma hitungan berapa hari remisioner keluar lagi wajib tanam belakangan. Maka ini tolong sekali lagi saudara Dirjen Holtikultura tolong dikaji dengan baik. Apakah misalnya kewajibannya tidak tanam, tapi wajib menyerahkan bibit bawang putih untuk diserahkan kepada rakyat melalui kementerian atau bagaimana itu teknisnya saya tidak ikut campur. Kalau begini kan bingung semuanya.

F-NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si.):

Ketua, yang penting konsisten, Dirjen Hortikultura harus konsisten. Kalau memang ada sebelum wajib tanam itu dilaksanakan.

KETUA RAPAT:

Sudah berubah Pak, Bapak baru masuk, Bapak diam saja.

Jadi sebelumnya itu, sebelum RIPH keluar wajib tanam, tanda kutib ada kong kalikong antara oknum-oknum dilapangan dan lain-lainlah. Kemudian berapa saat sebelum demisioner keluarlah surat, wajib tanam nanti setelah RIPH keluar, kan begitu Pak. Betul? Secara Undang-Undang peraturan itu sudah tidak benar, Cuma saya tidak mau bahas lebih panjang disini. Paham? Jadi nomor 7 dihapus itu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Hanya ini komoditasnya tidak jelas Pak. Jadi sudah rekomendasi impor produk Hortikultura bawang putih.

KETUA RAPAT:

Kan belum saya bacakan Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, MS):

Mohon ijin Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi mau saya konsekuen, jadi jangan ganti Menteri ganti peraturan. Jadi dikaji dulu yang dalam, yang penting apa? Rakyat dan Pemerintah jangan dirugikan, itu saja yang paling penting. Kalau pengusaha mau rugi, mau apa, urusan dia, tidak ada urusan sama saya. Paham Pak?

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali rencana program wajib tanam sebelum atau sesudah rekomendasi impor produk hortikultura bawang putih dikeluarkan.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar menyampaikan data wajib tanam dan realisasi tanam bawang putih, baik yang dibiayai APBN maupun yang merupakan hasil wajib tanam oleh importir bawang putih.

Ini yang sudah wajib tanam, yang lalu ini.

Setuju?

Kan nanti disitu ada keterangan Pak, bahwa ini adalah perusahaan a, b, c, d, ini perusahaan yang abal-abal yang bilang aku tanam tetapi tumpang tindih. Nanti saya minta Satgas Pangan saja minta tolong cek ulang.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS)

Pak Ketua, tambahkan saja sesuai dengan lokasi.

KETUA RAPAT:

Iya, saya ulangi.

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar menyampaikan data wajib tanam dan realisasi tanam bawang putih, baik yang dibiayai APBN maupun yang merupakan hasil wajib tanam oleh importir bawang putih sesuai lokasinya.

Anggota?

Pemerintah?

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Sedikit tambahkan Pak, ini terkait evaluasi yang RIPH 2019 Pak ya, tahun 2018, 2019.

KETUA RAPAT:

Iya, cantumkan saja, itu wajib tanam mulai tahun berapa.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Wajib tanam pertengahan tahun 2017.

KETUA RAPAT:

2017 sampai 2019, cantumkan.

DIRJEN HORTIKULTURA (Dr. Ir. PRIHASTO SETYANTO, M.Sc.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Kalau itu berarti realisasi wajib tanamnya bagi importir tidak termasuk 2017-2019 dong. Itu hanya yang biayai APBN.

Anggota?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

9. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk bersama-sama mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah antara lain melalui kegiatan pelatihan kepada petani dan penyuluh, sosialisasi serta kegiatan peningkatan kapasitas petani dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Anggota?

Jadi paling tidak begini Pak, kalau ada pelatihan penyuluhan Anggota Dewannya diajak. Bukan diinfo harus diajak, diikuti sertakan supaya tahu ini penyuluhan abal-abal atau penyuluhan Cuma tanda tangan SPPD atau bagaimana.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Yang paling penting, kalau mau mengajak Anggota Komisi IV DPR RI kunjungan harus pakai etika sedikit. Saya tidak perlu etika banyak, etika sedikit saja. Jangan besok kunjungan sore ini di WA oleh stafnya kementerian ke staf Anggota, dari Anggota baru dikirim malam, besok acaranya. Itu namanya tidak niat ngajak, Cuma basa-basi saja, itu sampaikan itu, itu Menteri anda itu sampaikan. Kalau tidak mau ngajak juga tidak apa-apa, saya sudah ngomong berkali-kali.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sebelum kami menutup Rapat Dengar Pendapat ini kami persilakan saudara Sekjen Kementerian Pertanian untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Dengar Pendapat ini.

Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Saya atas nama Kementerian Pertanian mengucapkan banyak terima kasih atas masukan, saran yang cukup komprehensif.

KETUA RAPAT:

Omelan juga termasuk ya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Semoga hasil dari Rapat Dengar Pendapat ini betul-betul bisa mendukung implementasi dari program dan kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2020.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *alhamdulillah* Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.50 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001

